



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

**DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

**"Terwujudnya Derajat Kesehatan
Masyarakat yang Meningkat"**

**Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo**

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo

Telp. (0271) 593015 Fax. (0271) 592251

website: dkk.sukoharjokab.go.id, email: dkk@sukoharjokab.go.id



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah, strategi dan arahan dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
25. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
 - v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - x. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. Kecamatan Weru;
 - cc. Kecamatan Bulu;
 - dd. Kecamatan Tawang Sari;

- ee. Kecamatan Sukoharjo;
- ff. Kecamatan Nguter;
- gg. Kecamatan Bendosari;
- hh. Kecamatan Polokarto;
- ii. Kecamatan Mojolaban;
- jj. Kecamatan Grogol;
- kk. Kecamatan Baki;
- ll. Kecamatan Gatak; dan
- mm. Kecamatan Kartasura.

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 terdiri atas:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pertanian dan Perikanan;
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Weru;
29. Kecamatan Bulu;
30. Kecamatan Tawang Sari;
31. Kecamatan Sukoharjo;
32. Kecamatan Nguter;
33. Kecamatan Bendosari;
34. Kecamatan Polokarto;
35. Kecamatan Mojolaban;
36. Kecamatan Grogol;
37. Kecamatan Baki;
38. Kecamatan Gatak; dan
39. Kecamatan Kartasura.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514 Telp.(0271) 593015

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TRI TUTI RAHAYU, SKM., M.Kes

NIP : 19700902 199103 2 005

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Berdasar Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/024/2022 tanggal 28 Januari 2022. Bertugas untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan dr. Muwardi Nomor 66 Sukoharjo.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, Juni 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO



TRI TUTI RAHAYU, SKM., M.Kes

Pembina TK. I

NIP. 197009021991032005

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga Perubahan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026 dapat tersusun.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021-2026.

Kedepannya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam 5 Tahun.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyusunan perubahan renstra ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran guna perbaikan pada masa yang akan datang.

Sukoharjo, Juni 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS
KESEHATAN
TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 197009021991032005



DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-3
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
	1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO	II-1
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
	2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.....	II-4
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	II-27
	2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan.....	II-47
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
	3.2 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Perangkat Daerah Provinsi	III-10
	3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	III-12
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-14
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
	5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1

	6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
	7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-1
	7.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-3
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo dengan pembangunan kesehatan nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2020 – 2024.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo saat ini telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2026. Misi pembangunan daerah yaitu:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
- 3) Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi.
- 4) Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.
- 5) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai penjabaran pembentukan Penjabaran RPJMD, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo disusun sebagai upaya dalam mendukung pencapaian visi misi Pembangunan Daerah terutama pada misi ke-2 yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**. Penyusunan Renstra Perangkat daerah juga memperhatikan kebijakan Nasional dalam RPJMN, Renstra Kemenkes, Provinsi dalam RPJMD, Renstra Dinkes Provinsi. Dengan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan akan memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahun 2026 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dengan Kepala Daerah. Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk melakukan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Terdapat Perubahan Kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Terdapat penyesuaian indikator berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Terdapat beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang Renstra Perangkat khususnya, dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
 20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 -2026 untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pencapaian Visi – Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021– 2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan visi, misi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan urusan kesehatan tahun 2021-2026.
- 2) Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo untuk periode 5 tahun yaitu 2021-2026.
- 3) Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- 4) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	Memuat secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo serta Sistematika Penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
	Memuat informasi tentang peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang mash aktif berjalan, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan ini.

Bab II ini juga memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan; sumber daya yang dimiliki; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Bagian ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan; telaah visi, misi dan program Pembangunan Daerah telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota; telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan KLHS pada RPJMD serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memuat strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan akan tercapai, sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021-2026 maupun APBN yang dalam penganggarannya melalui mekanisme APBD. Indikator kinerja Dinas Kesehatan

yang merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur disesuaikan dengan RPJMD 2021 -2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU Dinas Kesehatan juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

Lampiran memuat *cascading* Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026, metadata indikator kinerja perangkat daerah dan metadata indikator kinerja program tahun 2021 – 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi:

- 1) Dalam Pasal 2.d Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- 2) Dalam pasal 48 ayat 1 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016, menyebutkan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

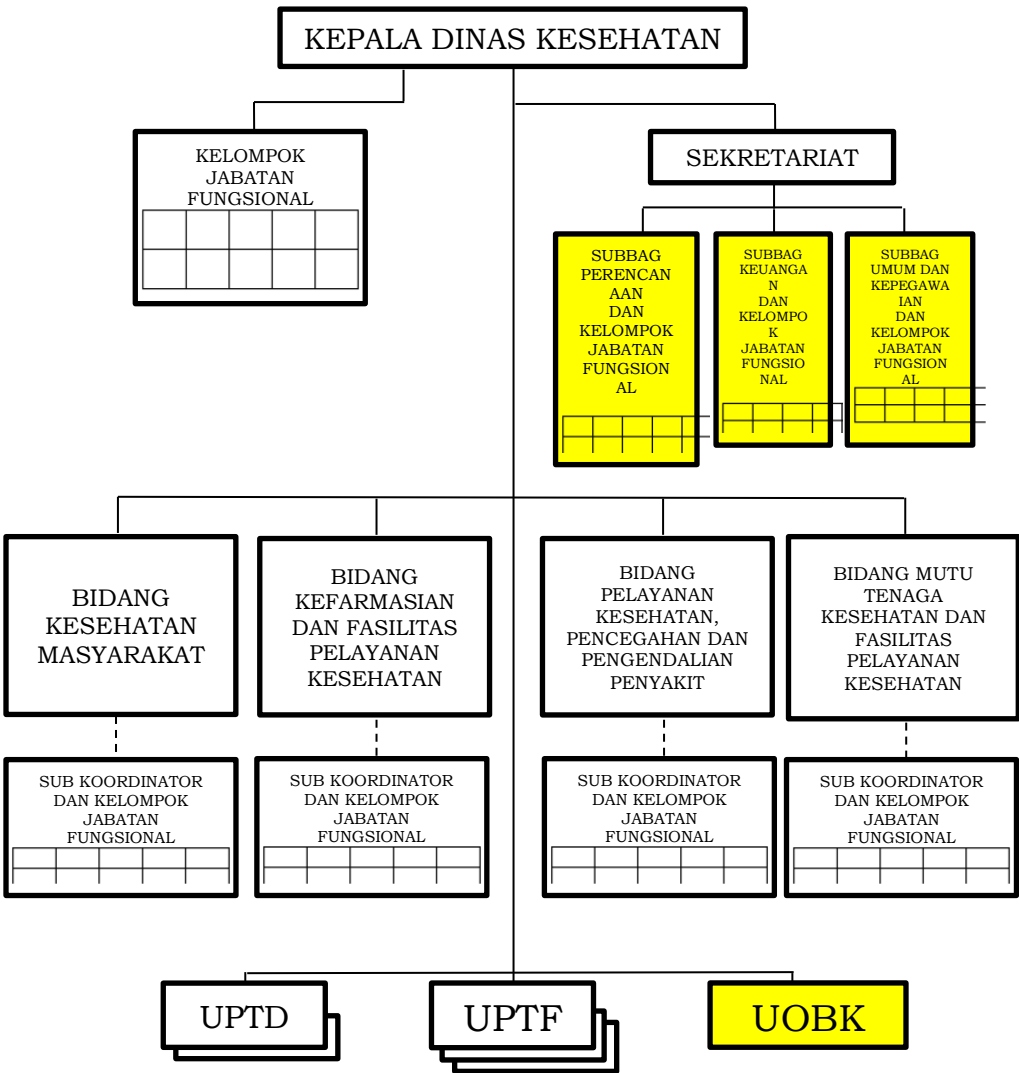
Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Sub Koordinator Kemitraan
3. Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - a. Sub Koordinator Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b. Sub Koordinator Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan
 - c. Sub Koordinator Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi Kesehatan
4. Bidang Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - c. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
5. Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- a. Sub Koordinator Perizinan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lainnya
 - b. Sub Koordinator Pembinaan dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan, Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. UPTD
 7. UPT Fungsional
 8. UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus)
 9. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Gambar II.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo:



2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

2.2.1. Ketersediaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo terdiri dari Sekretariat (terdiri dari 3 Sub Bagian), 4 Bidang (masing-masing terdiri dari 3 Sub Koordinator). Jumlah keseluruhan PNS dan Non PNS di Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah 156 Orang. Terdiri dari 9 Pejabat Struktural (Pejabat Struktural Dinas Kesehatan terdiri dari : 1 orang pejabat eselon II (dua), 5 orang pejabat eselon III (tiga), 3 orang pejabat eselon IV (empat), 77 orang Dukungan Manajemen, dan 70 orang yang terdiri dari Tenaga Fungsional Kesehatan dan Tenaga Fungsional Umum.

Tabel II.1 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Medis	0	0	0	0	0
2	Keperawatan	2	1	2	1	6
3	Kebidanan	0	5	0	3	8
4	Kefarmasian	2	6	0	2	10
5	Kesehatan Masyarakat	6	18	0	1	25
6	Kesehatan Lingkungan	2	3	0	0	5
7	Gizi	0	2	1	0	3
8	Keterapian Fisik	0	0	2	9	11
9	Teknik Biomedika	2	0	0	0	2
TOTAL		14	35	5	16	70
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	3	6	0	0	9

2	Dukungan Manajemen	15	22	18	22	77
TOTAL		20	26	18	22	86
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI DINAS KESEHATAN TAHUN 2022						156

1. Ketersediaan SDM Kesehatan Di UPT Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Sukoharjo mempunyai 12 Puskesmas yang terdiri dari 10 puskesmas perawatan dan 2 puskesmas non perawatan.

Untuk Puskesmas Rawat Inap Perkotaan, Standar Ketenagaan Minimal (SKM) mengacu pada Permenkes No. 43 Tahun 2019, Puskesmas harus memiliki : Dokter/Dokter Layanan Primer, Dokter gigi, Perawat, Bidan,Tenaga Kefarmasian,Tenaga Kesmas, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Sedangkan untuk Puskesmas selain Puskesmas Rawat Inap Perkotaan,Puskesmas harus memiliki : Dokter/Dokter Layanan Primer, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Apoteker dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Nutrisisionis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Tenaga Administrasi Keuangan, dan Tenaga Sistem Informasi Kesehatan.

Puskesmas Rawat Inap Perkotaan di Kabupaten Sukoharjo ada 3, yaitu Puskesmas Grogol, Puskesmas Baki, dan Puskesmas Kartasura. Puskesmas Rawat Inap Pedesaan

di Kabupaten Sukoharjo ada 6, yaitu Puskesmas Weru, Puskesmas Tawang Sari, Puskesmas Bulu, Puskesmas Nguter, Puskesmas Polokarto dan Puskesmas Gatak. Puskesmas NonRawat Inap Pedesaan di Kabupaten Sukoharjo yaitu Puskesmas Sukoharjo dan Puskesmas Bendosari.

Tabel II.2 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Puskesmas Weru Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	2	5	0	0	7
2	Dokter Gigi	1	1	0	0	2
3	Keperawatan	3	14	2	5	24
4	Kebidanan	0	37	0	3	40
5	Kefarmasian	0	2	0	0	2
6	Kesehatan Masyarakat	1	0	0	0	1
7	Kesehatan Lingkungan	0	1	0	0	1
8	Gizi	0	2	0	0	2
9	Keterapian Fisik	0	1	0	2	3
10	Keteknisian Medis	0	4	0	0	4
11	Teknik Biomedika	1	2	0	0	3
TOTAL		8	69	2	10	89
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	1	0	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	3	5	5	7	20
TOTAL		4	5	5	7	21
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS WERU TAHUN 2022						110

Tabel II.3 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Puskesmas Bulu Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	2	2	0	0	4
2	Dokter Gigi	0	1	0	0	1
3	Keperawatan	1	13	2	2	18
4	Kebidanan	0	23	0	8	31
5	Kefarmasian	0	3	0	0	3
6	Kesehatan Masyarakat	0	3	0	1	4
7	Kesehatan Lingkungan	0	1	0	0	1
8	Gizi	0	2	0	1	3
9	Keterapian Fisik	1	1	0	1	3
10	Keteknisian Medis	1	2	0	0	3
11	Teknik Biomedika	1	2	0	0	3
TOTAL		6	53	2	13	74
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	1	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	1	1	4	1	7
TOTAL		1	2	4	1	8
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS BULU TAHUN 2022						82

Tabel II.4 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Puskesmas Tawang Sari Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	1	8	0	3	12
2	Dokter Gigi	0	1	0	0	1

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
3	Keperawatan	3	14	0	5	22
4	Kebidanan	0	28	0	5	33
5	Kefarmasian	0	4	0	0	4
6	Kesehatan Masyarakat	0	2	1	1	4
7	Kesehatan Lingkungan	0	2	0	0	2
8	Gizi	1	1	0	0	2
9	Keterapian Fisik	0	1	0	0	1
10	Keteknisian Medis	1	3	0	0	4
11	Teknik Biomedika	1	1	0	0	2
TOTAL		7	65	1	14	87
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	0	0	0	0
2	Dukungan Manajemen	1	0	8	3	12
TOTAL		1	0	8	3	12
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS TAWANGSARI TAHUN 2022						99

Tabel II.5 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Sukoharjo Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	0	6	2	2	10
2	Dokter Gigi	2	0	0	0	2
3	Keperawatan	2	10	0	2	14
4	Kebidanan	0	30	0	3	33
5	Kefarmasian	0	3	1	1	5

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
6	Kesehatan Masyarakat	0	3	0	2	5
7	Kesehatan Lingkungan	0	0	0	1	1
8	Gizi	0	2	0	0	2
9	Keterapian Fisik	0	2	0	0	2
10	Keteknisian Medis	0	4	0	0	4
11	Teknik Biomedika	0	3	0	0	3
TOTAL		4	63	3	11	81
B.	Asisten Tenaga Kesehatan	0	1	0	0	1
		0	1	0	0	1
C. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	1	0	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	4	2	6	3	15
TOTAL		5	2	6	3	16
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2022						98

Keterangan : Terdapat 4 (empat) Dokter Umum Non PNS, yang merupakan tenaga kesehatan yang berasal dari Program Dokter Instership Indonesia (PIDI), pada saat penarikan data dilakukan.

Tabel II.6 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Nguter Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	2	6	0	0	8
2	Dokter Gigi	0	1	0	1	2

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
3	Keperawatan	4	15	1	7	27
4	Kebidanan	0	34	0	3	37
5	Kefarmasian	0	6	0	1	7
6	Kesehatan Masyarakat	0	0	0	2	2
7	Kesehatan Lingkungan	1	1	0	0	2
8	Gizi	1	1	0	1	3
9	Keterapian Fisik	0	1	0	0	1
10	Keteknisian Medis	1	4	1	1	7
11	Teknik Biomedika	0	2	0	0	2
TOTAL		9	71	2	16	98
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	0	0	0	0
2	Dukungan Manajemen	2	2	5	4	13
TOTAL		2	2	5	4	13
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS NGUTER TAHUN 2022						111

Keterangan : Terdapat 1 (satu) Dokter gigi Non PNS, yang merupakan tenaga kesehatan yang berasal dari program Nusantara Sehat pada saat penarikan data dilakukan.

Tabel II.7 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Bendosari Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	4	3	0	0	7
2	Dokter Gigi	0	2	0	0	2

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
3	Keperawatan	5	7	0	1	13
4	Kebidanan	0	31	0	4	35
5	Kefarmasian	0	2	0	1	3
6	Kesehatan Masyarakat	0	2	0	1	3
7	Kesehatan Lingkungan	0	2	0	1	3
8	Gizi	0	2	0	0	2
9	Keterapian Fisik	0	1	0	0	1
10	Keteknisian Medis	0	3	0	1	4
11	Teknik Biomedika	1	1	0	0	2
TOTAL		10	56	0	9	75
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	1	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	1	1	4	2	8
TOTAL		1	2	4	2	9
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS BENDOSARI TAHUN 2022						84

Tabel II.8 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Polokarto Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	4	4	0	0	8
2	Dokter Gigi	0	3	0	0	3
3	Keperawatan	4	8	0	3	15
4	Kebidanan	0	31	0	9	40
5	Kefarmasian	1	3	0	0	4

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
6	Kesehatan Masyarakat	0	1	0	2	3
7	Kesehatan Lingkungan	1	1	0	1	3
8	Gizi	0	3	0	1	4
9	Keterapian Fisik	0	1	0	1	2
10	Keteknisian Medis	1	3	0	1	5
11	Teknik Biomedika	2	1	0	0	3
TOTAL		13	59	0	18	90
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	1	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	4	7	6	3	20
TOTAL		4	8	6	3	21
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS POLOKARTO TAHUN 2022						111

Tabel II.9 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Puskesmas Mojolaban Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	1	4	0	0	5
2	Dokter Gigi	1	3	0	0	4
3	Keperawatan	1	14	0	5	20
4	Kebidanan	0	40	0	3	43
5	Kefarmasian	1	2	0	0	3
6	Kesehatan Masyarakat	0	4	0	0	4
7	Kesehatan Lingkungan	1	1	0	0	2

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
8	Gizi	0	3	0	0	3
9	Keterapian Fisik	0	2	0	0	2
10	Keteknisian Medis	2	3	0	1	6
11	Teknik Biomedika	1	2	0	0	3
TOTAL		8	78	0	9	95
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	1	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	1	0	8	2	11
TOTAL		3	5	8	6	12
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS MOJOLABAN TAHUN 2022						107

Tabel II.10 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Grogol Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	4	5	0	0	9
2	Dokter Gigi	0	2	0	0	2
3	Keperawatan	1	19	0	5	25
4	Kebidanan	0	40	0	5	45
5	Kefarmasian	0	4	0	0	4
6	Kesehatan Masyarakat	0	1	0	1	2
7	Kesehatan Lingkungan	1	2	0	1	4

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
8	Gizi	0	4	0	1	5
9	Keterapian Fisik	1	2	0	1	4
10	Keteknisian Medis	1	5	0	1	7
11	Teknik Biomedika	2	1	0	0	3
TOTAL		10	85	0	15	110
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	0	0	0	0
2	Dukungan Manajemen	1	3	6	3	13
TOTAL		1	3	6	3	13
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS GROGOL TAHUN 2022						123

Tabel II.11 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Baki Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	2	8	1	2	13
2	Dokter Gigi	0	2	0	0	2
3	Keperawatan	3	11	1	7	22
4	Kebidanan	0	33	0	2	35
5	Kefarmasian	0	3	0	0	3
6	Kesehatan Masyarakat	0	2	0	0	2

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
7	Kesehatan Lingkungan	0	1	0	1	2
8	Gizi	0	1	0	1	2
9	Keterampilan Fisik	0	2	1	0	3
10	Keteknisian Medis	0	4	0	0	4
11	Teknik Biomedika	0	4	0	0	4
TOTAL		5	71	3	13	92
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	1	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	0	4	7	5	16
TOTAL		0	5	7	5	17
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS BAKI TAHUN 2022						109

Keterangan : Terdapat 2 (dua) dokter umum Non PNS, yang merupakan tenaga kesehatan yang berasal dari Program Dokter Internship Indonesia (PIDI), pada saat penarikan data dilakukan.

Tabel II.12 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Gatak Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	1	6	0	0	7
2	Dokter Gigi	0	2	0	0	3
3	Keperawatan	3	15	2	3	23
4	Kebidanan	0	31	0	3	34
5	Kefarmasian	0	3	1	0	4
6	Kesehatan	0	0	0	3	3

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
	Masyarakat					
7	Kesehatan Lingkungan	1	1	0	0	2
8	Gizi	0	2	0	0	2
9	Keterapian Fisik	0	1	0	2	3
10	Keteknisian Medis	1	3	0	0	4
11	Teknik Biomedika	1	3	0	0	4
TOTAL		7	67	3	11	88
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	0	0	0	0
2	Dukungan Manajemen	4	2	6	5	17
TOTAL		4	2	6	5	17
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS GATAK TAHUN 2022						105

Tabel II.13 Data Ketersediaan SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Di Puskesmas Kartasura Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	2	10	0	0	12
2	Dokter Gigi	2	3	0	0	5
3	Keperawatan	5	15	1	5	26
4	Kebidanan	0	30	0	5	35
5	Kefarmasian	0	4	0	3	7
6	Kesehatan Masyarakat	0	1	0	0	1
7	Kesehatan Lingkungan	1	3	0	0	4

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
8	Gizi	0	3	0	0	3
9	Keterampilan Fisik	1	3	0	0	4
10	Keteknisian Medis	0	4	0	2	6
11	Teknik Biomedika	0	3	0	0	3
TOTAL		11	79	1	15	106
B.	Asisten Tenaga Kesehatan	0	2	0	1	3
TOTAL		0	2	0	1	3
C. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	0	1	0	0	1
2	Dukungan Manajemen	3	4	6	1	14
TOTAL		3	5	6	1	15
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS KARTASURA TAHUN 2022						124

Adapun rekapitulasi SDM kesehatan Puskesmas dan tenaga penunjang di Sukoharjo pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.14 Rekapitulasi SDM Kesehatan dan Tenaga Penunjang Puskesmas Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLA H
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	25	67	3	7	102
2	Dokter Gigi	6	21	0	1	28
3	Keperawatan	35	155	9	50	249
4	Kebidanan	0	388	0	53	441
5	Kefarmasian	2	39	2	6	49
6	Kesehatan	1	19	1	13	34

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
	Masyarakat					
7	Kesehatan Lingkungan	6	16	0	5	27
8	Gizi	2	26	0	5	33
9	Keterapian Fisik	3	18	1	7	29
10	Keteknisian Medis	8	42	1	7	58
11	Teknik Biomedika	10	25	0	0	35
TOTAL		98	816	17	154	1.085
B.	Asisten Tenaga Kesehatan	0	4	0	1	5
C. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	2	6	0	0	8
2	Dukungan Manajemen	25	31	71	38	165
TOTAL		27	37	71	38	173
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI PUSKESMAS SE- KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022						1.263

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Puskesmas se- Kabupaten Sukoharjo sebanyak 1.263 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tenaga Medis sebanyak 130 orang, yang terdiri dari Dokter Umum sebanyak 102 orang dan Dokter Gigi sebanyak 28 orang; Keperawatan sebanyak 249 orang; Kebidanan sebanyak 441 orang; Kefarmasian sebanyak 49 orang; Kesehatan Masyarakat sebanyak 34 orang; Kesehatan Lingkungan sebanyak 27 orang; Tenaga Gizi sebanyak 33 orang; Keterapian Fisik sebanyak 29 orang; Keteknisian Medis sebanyak 58 orang; Teknik Biomedika sebanyak 35 orang; Asisten Tenaga Kesehatan sebanyak 5 orang; Struktural sebanyak 8 orang; dan Dukungan Manajemen sebanyak 165 orang.

2. Ketersediaan SDM Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

.UPT Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan penunjang Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan PNS di UPT Labkesda berjumlah 18 Orang yang terdiri dari Dokter Umum 1 orang, Keperawatan 3 orang, Kesehatan Lingkungan 3 orang, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 1 orang, Ahli Teknologi Laboratorium Medik 6 orang (Analisis Kesehatan),Pejabat Struktural 2 orang (yaitu 1 orang Kepala UPT dan 1 orang Kepala Tata Usaha), dan Dukungan Manajemen 2 orang.

Tabel II.15 Data Ketersediaan SDM Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	0	1	0	0	1
2	Keperawatan	0	0	0	3	3
3	Kesehatan Lingkungan	2	1	0	0	3
4	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	0	0	1	0	1
5	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analisis Kesehatan)	2	2	0	2	6
TOTAL		4	4	1	5	14
B. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	1	1	0	0	2
2	Dukungan Manajemen	0	0	2	0	2
TOTAL		1	1	2	0	4
TOTAL SDM KESEHATAN & TENAGA PENUNJANG DI LABKESDA KAB. SUKOHARJO TAHUN 2022						18

3. Ketersediaan SDM Kesehatan Di Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karkteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan kemajuan teknologi. Dan kehidupan social ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit dan tenaga nonkesehatan. Berdasarkan data dari Rumah Sakit yang telah diinput dalam Aplikasi SISDMK, SDM Kesehatan dari 10 rumah sakit di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, antara lain sebagai berikut :

Tabel II.16 Ketersediaan SDM Kesehatan di RSUD
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
A. Tenaga Kesehatan						
1	Dokter Umum	4	4	9	11	28
2	Dokter Gigi	0	1	0	0	1
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	2	2	0	0	4
4	Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi - Kebidanan (Sp.OG)	1	1	1	0	3

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
5	Dokter Spesialis Anak (Sp.A)	0	4	0	0	4
6	Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)	2	0	1	0	3
7	Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	1	1	0	1	3
8	Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An)	1	0	0	0	1
9	Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK)	1	1	0	0	2
10	Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)	0	1	1	0	2
11	Dokter Spesialis Urologi (Sp.U)	0	0	1	0	1
12	Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin (Sp.KK)	0	1	0	1	2
13	Dokter Spesialis Neorologi/Saraf (Sp.S)	2	0	0	0	2
14	Dokter Spesialis Orthopedi & Traumatologi (Sp.OT)	1	0	1	0	2
15	Dokter Spesialis Paru - Pulmonologi (Sp.P)	1	1	0	1	3
16	Dokter Spesialis Psikiatri - Kedokteran Jiwa (Sp.KJ)	2	1	0	0	3

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
17	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi (Sp.KFR)	0	1	0	0	1
18	Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan THT Kl (Sp.THT-KL)	2	1	0	0	3
19	Dokter Spesialis Mata (Sp.M)	0	1	1	0	2
20	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (Sp.JP)	1	0	0	0	1
21	Dokter Gigi Spesialis Kawat Gigi - Orthodontis (Sp.Ort)	0	1	0	0	1
22	Dokter Gigi Spesialis Anak - Pedodontis (Sp.KGA)	0	1	0	0	1
23	Dokter Gigi Spesialis Gigi Tiruan (Prostodontis) (Sp.Pros)	1	0	0	0	1
24	Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA)	0	0	1	0	1
25	Dokter Spesialis Urologi (Sp.U)	0	0	1	0	1
26	Dokter Gigi Spesialis	1	2	0	0	3
27	Keperawatan	51	91	43	88	273

No.	JENIS SDM	PNS		Non PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
28	Kebidanan	0	28	0	4	32
29	Psikologi Klinis	0	1	0	0	1
30	Apoteker	0	11	0	3	14
31	Tenaga Teknik Kefarmasian	4	18	4	9	35
32	Kesehatan Masyarakat	0	0	0	1	1
33	Kesehatan Lingkungan	3	7	0	0	10
34	Gizi	0	16	0	0	16
35	Keterapian Fisik	2	7	2	3	14
36	Keteknisian Medis	4	11	4	7	26
37	Teknik Biomedika	5	14	6	15	40
	TOTAL	91	226	74	144	535
B.	Asisten Tenaga Kesehatan	1	9	3	0	13
C. Tenaga Penunjang						
1	Struktural	8	15	0	0	23
2	Dukungan Manajemen	26	16	99	43	184
	TOTAL	34	31	99	43	207
TOTAL SDM KESEHATAN dan TENAGA PENUNJANG RSUD KAB. SUKOHARJO TAHUN 2022		126	266	176	187	755

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi Standar Ketenagaan Minimal SDMK Rumah Sakit Umum Kelas B (Berdasarkan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit) untuk jenis SDMK Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Dasar, Dokter Spesialis Lain, Tenaga Kefarmasian, Keperawatan, Tenaga Kesehatan lain dan Tenaga Penunjang.

Kekurangan SDMK di RSUD Kabupaten Sukoharjo terdapat pada jenis SDMK Spesialis Penunjang Medik yaitu Spesialis Anestesiologi (1 orang) dan Spesialis Rehabilitasi Medik (1 orang).

4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Sukoharjo

Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di wilayah Kabupaten Sukoharjo sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.17 Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

NO.	TIPE FASYANKES	JUMLAH FASYANKES
1	Dinas Kesehatan	1
2	Puskesmas	12
3	Rumah Sakit	10
4	Klinik	93
5	Apotek	207
6	Laboratorium Kesehatan	4
7	Unit Transfusi Darah	1
8	Praktik Dokter Umum Perseorangan	1022
9	Praktik Dokter Gigi Perseorangan	161

NO.	TIPE FASYANKES	JUMLAH FASYANKES
10	Praktek Dokter Spesialis Perorangan	406
11	Praktik Pengobatan Tradisional	81
TOTAL FASYANKES DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022		1998

Sedangkan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan di tiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel II.18 Rekapitulasi Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tiap Kecamatan Sukoharjo Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jenis Fasyankes						Total
		RS	Puskesmas	Klinik	Apotek	Lab. Kes	Unit Transfusi Darah	
1.	Weru	0	1	2	9	0	0	12
2.	Bulu	0	1	1	2	0	0	4
3.	Tawang Sari	0	1	4	8	0	0	13
4.	Nguter	0	1	3	6	0	0	10
5.	Sukoharjo	2	1	9	33	3	1	49
6.	Bendosari	1	1	8	9	0	0	19
7.	Polokarto	0	1	5	19	0	0	25
8.	Mojolaban	0	1	12	14	0	0	27
9.	Grogol	2	1	15	39	0	0	58
10.	Baki	0	1	9	17	0	0	27
11.	Gatak	0	1	3	11	0	0	15
12.	Kartasura	5	1	22	40	1	0	68
Total		10	12	93	207	4	1	327

5. Sumber Daya Modal

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dilengkapi dengan berbagai fasilitas/aset berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.19 Daftar Fasilitas/Aset Dinas Kesehatan
Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

No	Fasilitas/ aset	Tahun			Satuan
		2020	2021	2022	
1	Tanah	10	10	10	Lokasi
2	Alat-alat besar	145	158	160	Unit
3	Alat-Alat Angkutan	224	200	201	Buah
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	210	314	309	Buah
5	Alat kantor dan rumah tangga	24.935	27.184	28.872	Buah
6	Alat - alat audio dan komunikasi	536	532	536	Unit
7	Alat - alat kedokteran	15.805	17.750	17.695	Buah
8	Alat - alat laboratorium	3.417	3.537	3.560	Buah
9	Bangunan Gedung	245	248	252	Lokasi
10	Instalasi	7	22	24	Buah
11	Kendaraan Roda 2	155	151	145	Unit
12	Kendaraan Roda 4	41	47	56	Unit
13	Buku dan Perpustakaan	220	220	220	Buah
14	Alat Pertanian (Spayer)	63	64	64	Unit
15	Komputer		2017	2098	Unit
16	Alat keselamatan kerja		11	14	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

2.3.1. Kinerja Umum

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan berkaitan dengan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan Puskesmas/UPTF, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk pelaksanaan Kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.3.2. Kinerja Khusus

Berdasarkan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat. Capaian pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini.

Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo maupun Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

2.3.3. Capaian Indikator Kinerja

Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran “Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau”, tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.20 Capaian Kinerja
Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Capaian 2021	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Harapan Hidup	tahun	77,70	77,82	100,15	100,16	99,90
2	Angka Kematian Ibu	100.000/KH	96	111,59	83,76	30,40	82,53
3	Angka Kematian Bayi	1.000/KH	7,3	6,23	114,66	140,77	111
Rata-rata Capaian					99,52	90,44	97,81

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-3.2, yaitu : Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dari 3 indikator kinerja yang ada, indikator yang pertama yakni Angka Harapan Hidup terealisasi 77,82 dari target yang ditentukan sebesar 77,70 dengan capaian kinerja 100,15 dan termasuk kategori sangat baik.

Sedangkan untuk 2 (dua) indikator kinerja lainnya,

yakni Angka Kematian Ibu masih terjadi 12 kasus kematian ibu atau realisasinya 111,59/100.000 Kelahiran Hidup. Meskipun belum mencapai target namun capaian kinerja untuk indikator ini meningkat dibandingkan tahun 2021 dan termasuk dalam kategori baik. Untuk indikator angka kematian bayi terjadi peningkatan kasus dibandingkan tahun 2021, namun masih dibawah target dengan capaian kinerja 114,66 dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka capaian kinerja 2022 mengalami peningkatan. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel II.21 Capaian Kinerja tahun 2021 dan 2022

Perbandingan Tahun 2021 dan 2022

“Sasaran Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat”

No	Indikator	Satuan	2021		Tahun 2022		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Harapan Hidup	tahun	77,73	100,16	77,70	77,82	100,15
2	Angka Kematian Ibu	10.000 /KH	172,60	30,40	96	111,59	83,76
3	Angka Kematian Bayi	1.000/ KH	5,52	140,77	7,3	6,23	114,66
Rata-rata Capaian				90,44			99,52

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja angka kematian ibu tahun 2021 adalah 172,60/100.000 KH menjadi 111,59/100.000 Kelahiran Hidup di tahun

2022, sedangkan angka kematian bayi tahun 2021 yaitu 5,52 /1.000 KH sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 7,3 / 1.000 KH. Capaian tahun 2021 ada 20 kasus kematian ibu melahirkan sedang tahun 2022 ada 12 kasus kematian ibu melahirkan sehingga ada penurunan kasus, sedangkan kematian bayi di tahun 2021 ada 64 kasus dan tahun 2022 ada 67 kasus kematian bayi sehingga ada kenaikan kasus namun masih dibawah target yang ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2022 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.22 Capaian Kinerja tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2022	Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2026)
1	2	3		7	8
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,82	77,9	99,90
2	Angka Kematian Ibu	100.00 0/KH	111,59	95	82,53
3	Angka Kematian Bayi	1.000/ KH	6,23	7	111
Rata-rata capaian kinerja					97,81

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dari 3 indikator yang sudah dapat terealisasi melampaui target adalah : Angka angka kematian bayi . Jika dibandingkan terhadap capaian kinerja akhir tahun RPJMD (tahun 2026) rata-rata capaian kinerja sebesar 97,81 %, hal menunjukkan kinerja pencapaian sasaran ini sudah cukup berhasil dan dapat dikategorikan baik.

Sedangkan realisasi indikator kinerja tahun 2022 yang dapat dibandingkan dengan target nasional, baik Standar Pelayanan Minimal (SPM), dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel II.23 Capaian Kinerja tahun 2022 dan Target Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3.2 dengan Target Nasional

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Nasional (SPM)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH.	111,59	183	Angka Kematian Ibu di bawah target nasional.
2.	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	6,23	16	Angka kematian bayi di bawah target nasional.

Berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan dengan target nasional baik SPM, maka pencapaian target indikator tahun 2022 untuk kedua indikator tersebut dibawah target nasional, artinya angka kematian ibu dan angka kematian bayi sudah dapat ditekan sehingga sudah capaian lebih rendah dari target nasional.

Tabel II.24 Kinerja Renstra Tahun 2016 – 2021
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

NO	Indikator Kinerja (Renstra)	Target Renstra PD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Angka Harapan Hidup	77,5	77,52	77,54	77,56	77,66	77,6	77,46	72	77,49	77,54	77,65	77,73	99,95	92,88	99,94	99,97	99,99	100,16
	Angka Kematian Ibu Melahirkan	140	130	120	110	102	102	94,80	31,94	31,87	39,84	57,08	172,60	132,28	175,43	173,00	163,78	144,00	30,40
	Angka Kematian Bayi	9,8	9,6	9,4	9,2	9,2	9,2	9,00	6,38	5,65	5,49	7,42	5,52	108,16	133,54	141,00	140,33	119,35	140,77
	Angka Kematian Balita	11,5	11	10,5	10	9,92	9,92	10,82	8,54	7,41	7,25	8,88	7,16	105,91	122,36	129,00	127,50	106,53	127,82
	Angka Kematian Neonatal	8	8	7	7	6	6	4,14	3,99	3,98	2,94	5,13	3,88	148,25	150,12	137,00	158,00	114,50	135,33
	Prevalensi Penderita Gizi Buruk	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,07	198,00	197,00	196,00	197,00	193,00	97
	Prevalensi Penderita Gizi Kurang	<5	<5	<5	<5	<5	<5	4,82	3,82	3,82	4,07	4,07	4,5	118,00	123,00	120,00	118,00	149,00	110
	Stunting	<28	<27	<26	<25	<25	<25	8,12	8,03	4,27	2,58	3,15	7,11	171,00	170,25	183,57	189,68	187,00	171,56
	Desa Siaga Aktif Mandiri	33	33	39	42	48	50	28,74	34	41	44	44	42	87,09	103,03	105,13	104,76	91,67	88
	Angka Kesakitan DBD	<49	<49	<49	<49	<49	<49	65	13,7	4,1	35,5	20	24,3	67,34	172,00	191,00	127,00	159,00	150,41
	Prosentase Desa ODF	20	30	45	75	100	100	44	100	100	100	100	100	494,90	333,33	222,22	133,33	100,00	100
	Desa/Kalurahan UCI	100	100	100	100	100	100	98,98	100	100	100	100	100	98,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100

NO	Indikator Kinerja (Renstra)	Target Renstra PD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentase Ketersediaan Obat dan vaksin Puskesmas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	Prosentase Puskesmas Rawat Inap Non Rawat Inap sesuai Standart	30	60	100	100	100	100	60	100	100	100	100	100	200,00	166,67	100,00	100,00	100,00	100
	Prosentase Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standart	30	40	45	50	55	60	75	75	78	78	78	-	250,00	187,50	173,33	156,00	141,82	-
	Prosentase Tempat Pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat	20	21	22	23	24	25	49	61	64,27	64,27	64,27	69,9	245,00	290,48	292,14	279,43	267,79	279,6
	Cakupan Pendampingan akreditasi faskes primer (25 Faskes)	0	5	5	5	5	5	0	0	12	20	20	-	-	-	240,00	400,00	400,00	-
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi	-	-	14	21	28	32	0	-	14	17	17	18	-	-	100,00	80,95	60,71	56,25
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjut terakreditasi	-	-	40	50	75	100	0	-	70	80	80	34	-	-	175,00	160,00	106,67	34
	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Terakreditasi	-	-	0	16	16	16	0	-	-	20	20	20	-	-	-	125,00	125,00	125
	Prosentase Perilaku Sehat (PHBS)	77	77,5	78	79	80	80	75	78	94,5	94,5	94,5		97,40	100,65	121,15	119,62	118,13	-
	Prosentase kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	77	77,5	78	79	80	80	75	78	94,5	94,5	94,5		97,40	100,65	121,15	119,62	118,13	-
	Prosentase Ibu Hamil Kekurangan energi Kronik (KEK)	15	14	13	12	11	10	7,52	7,49	6,04	6,41	6,4		50,13	53,50	46,46	53,42	58,18	-
	Prosentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah	90	90	90	90	90	90	94,32	92,02	93,26	93,26	93,2	100	104,80	102,24	103,62	103,62	103,56	111,11

NO	Indikator Kinerja (Renstra)	Target Renstra PD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	35	38	40	45	50	55	39,58	41,01	46,52	46,52	46,52	78,9	113,09	107,92	116,30	103,38	93,04	143,45
	Prosentase bayi baru lahir mendapat IMD	90	90	90	90	90	90	79,79	87,78	89,17	89,17	89,09	92,38	88,66	97,53	99,08	99,08	98,99	102,64
	Prosentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	20	20	20	25	30	30	24,93	71,49	67,1	67,1	67	-	124,65	357,45	335,50	268,40	223,33	-
	Prosentase Desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM	47	50	53	56	59	65	83,83	100	100	100	100	100	178,36	200,00	188,68	178,57	169,49	153,85
	Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	73,8	73,9	74	74,1	74,2	74,3	93,3	85	86,5	86,5	86	69,9	126,42	115,02	116,89	116,73	115,90	94,08
	Prosentase penduduk akses air minum	81,7	85	90	95	100	100	94,4	92,99	94,68	94,68	94,78	-	115,54	109,40	105,20	99,66	94,78	-
	Angka Kesakitan DBD <49/100.000 pddk	<49	<49	<49	<49	<49	<49	65	13,7	0	35,5	20	24,7	67,34	172,00	191,00	127,00	159,00	149,59
	Angka keberhasilan Pengobatan TB paru BTA Positif	>85	>85	>85	>85	>85	>85	93	85,2	87,71	92,4	92	81,9	109,41	100,24	103,19	108,71	108,24	96,35
	Angka Penemuan pnemonia balita	10	12,5	15	20	25	30	17,31	27,08	27,97	27,97	27,9	3,6	173,10	216,64	186,47	139,85	111,60	12
	Prosentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posbindu) PTM, Pemeriksaan Hipertensi, DM	25	30	35	40	45	50	23	32	53	53	53	-	92,00	106,67	151,43	132,50	117,78	-
	Prosentase Pemeriksaan Hipertensi diantara seluruh kasus di fasyankes	-	-	-	<30	<30	<30	-	-	11,22	11,41	46,4	43	-	-	-	91,96	45,33	43,33

NO	Indikator Kinerja (Renstra)	Target Renstra PD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentase Pemeriksaan DM diantara seluruh kasus di fasyankes		-	-	<50	<50	<50	-	-	14,53	13,57	6,61	-	-	-	-	136,78	186,78	-
	Prosentase Puskesmas/ Pustu dan jaringannya yang memiliki sarana &Prasarana sesuai standar	30	60	100	100	100	100	30	60	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	Persentase kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 100%,	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 50%	50	50	50	50	50	50	50	74,2	100	100	100	100	100,00	148,40	200,00	200,00	200,00	200
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	80	80	80	80	80	80	80	74,2	49,41	49,41	49	77,5	100,00	92,75	61,76	61,76	61,25	96,87
	Cakupan pemeriksaan Sediaan Makanan dan minuman Siap saji produk restoran aman dikonsumsi oleh masyarakat	540	540	540	540	540	2700	540	860	900	860	850	-	100,00	159,26	166,67	159,26	157,41	-
	Prosentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Antenatal minimal 4 kali (K4)	90	90	90	90	90	90	93,8	93,34	93,23	93,34	93	96	104,22	103,71	103,59	103,71	103,33	106,67

Tabel II.25 Proporsi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyediaan jasa surat menyurat	22.030.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	10.905.265	13.727.713	13.375.950	13.335.950	8.983.574	-	49,50	68,64	66,88	66,68	44,92	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	779.800.000	799.800.000	1.445.000.000	474.665.000	421.800.000	-	635.777.398	727.289.920	1.417.614.894	381.523.745	380.483.479	-	81,53	90,93	98,10	80,38	90,20	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	319.900.000	350.000.000	400.000.000	403.000.000	499.590.000	-	310.350.000	341.300.000	384.375.950	376.479.800	499.590.000	-	97,01	97,51	96,09	93,42	100,00	-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	140.000.000	170.000.000	150.000.000	87.000.000	80.000.000	-	135.115.000	137.990.000	83.667.000	69.135.000	73.180.000	-	96,51	81,17	55,78	79,47	91,48	-
	Penyediaan alat tulis kantor	115.000.000	121.000.000	110.000.000	81.110.000	75.000.000	-	106.825.000	111.837.575	96.429.000	74.766.256	70.915.000	-	92,89	92,43	87,66	92,18	94,55	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000.000	77.700.000	80.000.000	90.000.000	90.000.000	-	77.722.500	70.122.000	78.379.650	86.535.613	85.232.300	-	97,15	90,25	97,97	96,15	94,70	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	-	8.795.000	23.890.000	14.450.000	12.089.000	18.040.000	-	87,95	95,56	96,33	80,59	90,20	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	714.255.000	50.000.000	25.000.000	120.000.000	-	17.445.000	667.837.630	48.900.000	23.700.000	114.005.000	-	87,23	93,50	97,80	94,80	95,00	-
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga	203.000.000	277.036.000	516.330.000	439.600.000	624.336.000	-	172.622.740	32.716.242	446.611.007	367.019.515	395.485.897	-	85,04	11,81	86,50	83,49	63,35	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.160.000	5.160.000	-	5.320.000	4.016.000	3.957.200	3.780.400	4.074.800	-	76,00	57,37	56,53	73,26	78,97	-
	Penyediaan makanan dan minuman	88.000.000	136.300.000	1.005.900.000	124.000.000	124.000.000	-	71.133.000	106.297.900	903.450.000	122.692.000	119.424.000	-	80,83	77,99	89,82	98,95	96,31	-
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	114.970.000	114.970.000	110.000.000	119.550.000	100.400.000	-	106.821.020	114.201.482	109.859.084	95.603.843	61.057.660	-	92,91	99,33	99,87	79,97	60,81	-
	Pembangunan Gedung Kantor	11.404.475.000	-	-	-	-	-	11.304.552.000	-	-	-	-	-	99,12	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	pengadaan Mobil Operasional Dinas	-	-	-	245.500.000	1.195.225.000	-	-	-	-	245.425.000	1.111.665.000	-				99,97	93,01	-
	Pengadaan Meubelair	29.000.000	186.450.000	50.000.000	207.500.000	32.500.000	-	29.000.000	181.175.000	49.830.000	199.700.000	31.165.000	-	100,00	97,17	99,66	96,24	95,89	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.000.000	90.000.000	410.000.000	3.036.160.000	108.235.000	-	71.210.175	82.854.000	403.374.000	3.004.628.000	104.389.500	-	92,48	92,06	98,38	98,96	96,45	-
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000	2.927.960.000	100.000.000	125.235.000	2.175.000.000	-	9.995.000	2.858.450.996	94.900.797	122.128.575	2.145.945.300	-	99,95	97,63	94,90	97,52	98,66	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	208.895.000	243.175.000	330.075.000	374.505.000	702.300.000	-	170.557.000	205.410.000	197.105.000	340.514.100	5.853.000	-	81,65	84,47	59,72	90,92	0,83	-
	Pendidikan dan pelatihan formal	300.000.000	400.000.000	562.745.000	430.000.000	8.306.467.505	-	288.867.000	396.156.500	547.469.600	423.502.900	8.270.766.445	-	96,29	99,04	97,29	98,49	99,57	-
	Studi Banding	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	7.688.900	11.890.900	7.127.000	-	-	-	64,07	99,09	47,51	-	-	
	Seminar/Lokakarya	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	9.785.000	9.676.500	14.910.000	14.791.000	-	-	97,85	96,77	99,40	98,61	-	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD	39.000.000	113.100.000	55.000.000	19.460.000	10.000.000	-	25.890.000	97.022.239	42.277.514	14.902.600	8.021.000	-	66,38	85,78	76,87	76,58	80,21	-
	Penyerapan Aspirasi (Forum PD)	8.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	17.000.000	-	4.775.000	7.150.000	5.600.000	9.055.000	16.989.600	-	59,69	79,44	56,00	90,55	99,94	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	13.060.000	21.150.000	20.000.000	19.700.000	10.000.000	-	12.860.000	14.550.000	16.974.000	16.730.000	8.021.000	-	98,47	68,79	84,87	84,92	80,21	-
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.089.069.000	4.002.644.000	5.478.858.000	3.214.542.000	3.041.333.000	-	3.564.275.634	3.490.260.080	4.379.756.195	3.098.748.532	2.785.950.789	-	87,17	87,20	79,94	96,40	91,60	-
	Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	-	4.940.000	-	-	-	-	-	4.940.000	-	-	-	-	-	100,00	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya	2.700.000.000	4.700.000.000	14.362.440.000	26.247.607.000	36.225.387.000	-	2.677.739.414	4.478.997.218	11.962.217.847	20.786.822.222	31.516.044.456	-	99,18	95,30	83,29	79,20	87,00	-
	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	75.000.000	32.887.000	9.630.088.000	11.682.000.000	1.230.133.000	-	75.000.000	24.912.000	8.196.042.743	7.860.780.574	812.539.840	-	100,00	75,75	85,11	67,29	66,05	-
	Revitalisasi sistem kesehatan	404.756.000	255.725.000	340.000.000	249.840.000	190.440.000	-	344.852.609	175.523.797	275.551.004	234.373.088	185.785.000	-	85,20	68,64	81,04	93,81	97,56	-
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	3.305.050.000	1.231.952.000	300.000.000	406.000.000	284.336.000	-	2.933.748.000	920.189.946	216.197.200	365.350.800	250.383.900	-	88,77	74,69	72,07	89,99	88,06	-
	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	25.000.000	46.000.000	50.820.000	36.000.000	18.420.000	-	24.664.000	41.295.500	17.036.400	13.450.000	15.841.900	-	98,66	89,77	33,52	37,36	86,00	-
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	125.000.000	240.000.000	100.000.000	252.000.000	115.675.000	-	95.363.000	220.700.700	53.383.000	222.756.145	108.327.280	-	76,29	91,96	53,38	88,40	93,65	-
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	8.490.375.000	8.767.789.000	6.050.000.000	846.576.000	-	-	7.507.134.383	7.779.132.145	5.489.634.697	804.576.000	-	-	88,42	88,72	90,74	95,04	-	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60.000.000	657.480.000	40.000.000	35.500.000	22.500.000	-	56.745.400	431.941.000	35.285.000	33.139.500	15.995.000	-	94,58	65,70	88,21	93,35	71,09	-
	pengelolaan kegawatdaruratan medis bagi Masyarakat	-	-	639.000.000	314.500.000	237.875.000	-	-	-	298.243.171	245.702.964	191.512.275	-	-	-	46,67	78,12	80,51	-
	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat	-	-	-	20.000.000	17.920.000	-	-	-	-	18.211.800	10.952.500	-	-	-	-	91,06	61,12	-
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Weru.	3.509.288.000	4.164.047.000	4.608.208.000	-	-	-	1.669.639.631	1.956.756.728	2.410.368.247	-	-	-	47,58	46,99	52,31	-	-	-
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bulu.	1.621.004.000	2.000.225.000	2.103.053.000	-	-	-	937.603.878	1.313.834.883	1.492.913.021	-	-	-	57,84	65,68	70,99	-	-	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tawangsari.	3.453.732.000	4.096.423.000	4.099.907.000	-	-	-	1.709.405.807	2.277.539.433	2.446.896.503	-	-	-	49,49	55,60	59,68	-	-	-
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Nguter	3.445.557.000	4.174.021.000	4.250.460.000	-	-	-	1.585.615.596	2.323.071.238	2.506.031.256	-	-	-	46,02	55,66	58,96	-	-	-
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sukoharjo	4.421.091.000	4.983.840.000	4.777.082.000	-	-	-	2.109.898.881	2.954.952.204	3.284.832.677	-	-	-	47,72	59,29	68,76	-	-	-
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bendosari	2.711.304.000	2.874.513.000	2.918.477.000	-	-	-	1.628.198.264	1.862.214.573	2.139.904.995	-	-	-	60,05	64,78	73,32	-	-	-
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Polokarto	4.146.335.000	5.712.210.000	5.676.790.000	-	-	-	2.427.368.448	3.245.743.892	3.904.765.450	-	-	-	58,54	56,82	68,78	-	-	-
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Mojolaban	4.749.754.000	5.606.452.000	5.343.708.000	-	-	-	2.100.319.489	3.126.675.861	3.372.678.940	-	-	-	44,22	55,77	63,11	-	-	-
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Grogol	5.291.955.000	5.788.467.000	5.933.198.000	-	-	-	2.847.594.119	3.363.712.541	4.009.400.095	-	-	-	53,81	58,11	67,58	-	-	-
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Baki.	3.148.122.000	3.444.022.000	3.414.273.000	-	-	-	1.580.837.679	2.029.354.605	2.049.055.304	-	-	-	50,22	58,92	60,01	-	-	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Gatak.	3.081.611.000	3.287.507.000	3.335.190.000	-	-	-	1.934.865.633	2.077.394.116	2.437.377.622	-	-	-	62,79	63,19	73,08	-	-	-
	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kartasura	4.510.331.000	4.877.560.000	4.778.898.000	-	-	-	2.169.104.537	2.657.917.600	3.671.700.057	-	-	-	48,09	54,49	76,83	-	-	-
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	150.000.000	322.572.000	100.000.000	34.993.000	284.775.000	-	129.976.117	297.039.163	93.387.000	34.484.400	250.626.160	-	86,65	92,08	93,39	98,55	88,01	-
	Perijinan pelayanan Kesehatan dan pelayanan kesehatan Rumah tangga (PKRT)	-	-	34.690.000	48.000.000	14.504.000	-	-	-	30.860.000	31.070.000	14.391.800	-	-	-	88,96	64,73	99,23	-
	pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	-	-	600.000.000	300.000.000	127.185.000	-	-	-	586.424.800	286.660.311	81.447.800	-	-	-	97,74	95,55	64,04	-
	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	125.000.000	1.220.770.000	500.000.000	-	-	-	123.233.060	1.147.600.000	493.750.000	-	-	-	98,59	94,01	98,75	-	-	-
	Pelayanan laboratorium kesehatan daerah	-	-	-	2.206.660.000	1.209.651.000	-	-	-	-	2.052.129.303	1.140.307.482	-	-	-	-	93,00	94,27	-
	Fasilitasi Pengembangan Obat dan penelitian teknologi tanaman obat	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	138.765.560	-	-	-	-	-	69,38	-	-	-
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	235.000.000	211.200.000	125.000.000	107.000.000	104.350.000	-	227.709.500	208.280.000	125.000.000	98.459.900	73.499.900	-	96,90	98,62	100,00	92,02	70,44	-
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	225.000.000	638.935.000	850.000.000	646.500.000	989.055.000	-	225.000.000	624.000.000	836.660.000	625.069.900	978.554.900	-	100,00	97,66	98,43	96,69	98,94	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	25.000.000	100.000.000	30.000.000	25.175.000	-	-	24.850.000	100.000.000	30.000.000	25.175.000	-	-	99,40	100,00	100,00	100,00		-
	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	50.000.000	184.751.000	160.815.000	70.000.000	70.000.000	-	48.050.000	172.986.000	157.295.000	68.758.000	67.393.700	-	96,10	93,63	97,81	98,23	96,28	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000	49.750.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000	-	10.000.000	45.795.166	37.885.000	20.000.000	17.189.600	-	100,00	92,05	94,71	100,00	85,95	-
	peningkatan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	-	-	-	287.000.000	116.190.000	-	-	-	-	272.494.900	113.090.000	-	-	-	-	94,95	97,33	-
	Peningkatan kesehatan kerja	-	-	70.000.000	17.475.000	21.750.000	-	-	-	69.150.000	17.445.000	21.599.600	-	-	-	98,79	99,83	99,31	-
	Peningkatan kesehatan Olah raga	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	39.144.800	-	-	-	-	-	78,29		-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	3.370.000	9.400.000	-	-	-	-	2.460.000	8.855.000	-	-	-	-	73,00	94,20	-
	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	10.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	14.001.000	-	9.750.000	9.945.000	18.750.000	29.883.900	13.999.900	-	97,50	99,45	93,75	99,61	99,99	-
	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	60.000.000	2.955.472.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2.956.800.000	-	54.554.210	2.955.187.477	2.999.400.000	2.989.698.400	2.955.870.000	-	90,92	99,99	99,98	99,66	99,97	-
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	120.000.000	135.000.000	67.500.000	73.800.000	23.890.000	-	112.200.000	129.045.000	65.000.000	73.800.000	23.889.700	-	93,50	95,59	96,30	100,00	100,00	-
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	120.000.000	4.475.270.000	4.350.000.000	4.350.000.000	4.679.550.000	-	120.000.000	4.437.208.400	4.345.800.000	4.344.749.700	4.667.731.750	-	100,00	99,15	99,90	99,88	99,75	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28.000.000	35.000.000	20.000.000	20.950.000	10.000.000	-	27.532.500	33.882.000	18.934.000	20.788.000	9.999.800	-	98,33	96,81	94,67	99,23	100,00	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	50.000.000	198.590.000	50.000.000	483.025.000	20.963.000	-	50.000.000	195.670.400	46.766.000	481.412.700	16.962.700	-	100,00	98,53	93,53	99,67	80,92	-
	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	160.000.000	661.095.000	100.000.000	12.500.000	67.762.000	-	146.151.253	631.925.000	96.790.000	9.519.800	50.038.000		91,34	95,59	96,79	76,16	73,84	-
	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	20.000.000	127.550.000	100.000.000	192.000.000	60.225.000	-	18.700.000	121.225.000	80.695.000	161.100.000	25.810.367		93,50	95,04	80,70	83,91	42,86	-
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	30.000.000	116.760.000	50.000.000	20.000.000	10.475.000	-	29.983.500	94.905.000	39.645.000	19.066.500	9.949.800		99,95	81,28	79,29	95,33	94,99	-
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	265.000.000	305.000.000	150.000.000	190.100.000	191.440.000	-	215.030.455	165.049.415	17.541.000	53.711.961	102.078.849		81,14	54,11	11,69	28,25	53,32	-
	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan - bahan Fogging	155.000.000	105.200.000	50.000.000	110.200.000	53.764.000	-	132.008.020	93.018.000	37.558.000	101.834.000	53.713.800		85,17	88,42	75,12	92,41	99,91	-
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	55.000.000	60.000.000	99.940.000	77.000.000	40.654.000	-	54.548.500	55.501.000	99.456.500	76.739.900	40.624.000		99,18	92,50	99,52	99,66	99,93	-
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	150.000.000	811.360.000	420.000.000	298.840.000	152.776.000	-	135.861.400	733.192.600	411.232.868	292.916.800	147.499.200		90,57	90,37	97,91	98,02	96,55	-
	Peningkatan Immunisasi	264.000.000	617.880.000	52.940.000	52.940.000	23.627.000	-	245.432.750	556.065.677	52.664.000	52.729.800	13.626.800		92,97	90,00	99,48	99,60	57,67	-
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	75.000.000	80.000.000	174.375.000	150.000.000	132.053.000	-	71.674.000	56.168.000	169.317.348	144.121.500	109.699.650		95,57	70,21	97,10	96,08	83,07	-
	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	50.000.000	315.690.000	75.000.000	50.000.000	13.551.000	-	46.153.500	288.563.750	68.025.000	48.577.400	7.595.900		92,31	91,41	90,70	97,15	56,05	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	26.000.000	77.615.000	12.090.000	10.000.000	5.050.000	-	21.910.000	55.557.000	12.090.000	9.994.500	3.455.000		84,27	71,58	100,00	99,95	68,42	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Akreditasi Rumah Sakit/Puskesmas	-	-	150.000.000	646.981.000	231.942.000	-	-	-	137.600.000	580.418.892	164.102.793	-			91,73	89,71	70,75	-
	Pembangunan Puskesmas	11.614.831.000	4.911.925.000	6.605.645.000	11.264.649.000	4.250.502.000	-	10.549.928.000	4.872.381.000	6.031.515.000	10.128.411.500	-	-	90,83	99,19	91,31	89,91	-	-
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1.383.950.000	574.800.000	940.011.000	3.903.932.000	1.631.922.000	-	1.360.043.500	547.163.000	918.243.020	2.196.215.041	1.588.059.230	-	98,27	95,19	97,68	56,26	97,31	-
	Penyuluhan kesehatan anak balita	56.000.000	364.170.000	85.000.000	50.625.000	2.306.000	-	56.000.000	363.565.000	82.985.000	49.127.900	2.305.800	-	100,00	99,83	97,63	97,04	99,99	-
	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	86.000.000	89.800.000	20.000.000	19.375.000	22.420.000	-	86.000.000	88.270.000	20.000.000	19.375.000	22.418.700	-	100,00	98,30	100,00	100,00	99,99	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	28.000.000	33.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	28.000.000	30.405.000	10.000.000	9.965.000	10.000.000	-	100,00	92,14	100,00	99,65	100,00	-
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan lansia	26.000.000	167.950.000	20.000.000	19.000.000	10.770.000	-	26.000.000	158.984.000	19.700.000	18.999.800	10.769.700	-	100,00	94,66	98,50	100,00	100,00	-
	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	30.000.000	35.000.000	10.000.000	11.220.000	11.220.000	-	28.674.500	34.840.000	10.000.000	11.219.800	9.919.600	-	95,58	99,54	100,00	100,00	88,41	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.000.000	24.000.000	10.000.000	9.780.000	-	-	19.750.000	24.000.000	10.000.000	9.720.800	-	-	98,75	100,00	100,00	99,39		-
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan Rumah tangga	-	-	120.000.000	100.000.000	19.170.000	-	-	-	103.415.000	89.016.000	19.170.000	-	-	-	86,18	89,02	100,00	-
	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant	35.000.000	47.750.000	25.000.000	20.000.000	10.835.000	-	31.620.000	34.750.500	10.305.000	19.999.700	9.284.000	-	90,34	72,78	41,22	100,00	85,69	-
	Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu dan KB	1.130.950.000	996.922.000	30.000.000	20.000.000	14.840.000	-	17.040.000	635.598.500	30.000.000	19.534.000	13.890.900	-	1,51	63,76	100,00	97,67	93,60	-
	Pelatihan dan Pendidikan Kesehatan Ibu dan KB	145.000.000	856.250.000	100.000.000	100.000.000	34.495.000	-	144.350.000	615.000.000	95.540.000	98.668.300	32.299.100	-	99,55	71,82	95,54	98,67	93,63	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60.000.000	117.290.000	20.000.000	10.000.000	2.975.000	-	59.700.000	116.370.000	20.000.000	9.999.600	2.974.800	-	99,50	99,22	100,00	100,00	99,99	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	-	-	350.000.000	-	-	-	-	-	155.575.000	-	-	-	-	-	44,45	-	-	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Weru	-	-	-	5.967.468.000	6.147.815.000	-	-	-	-	3.609.684.972	3.315.279.554	-	-	-	-	60,49	53,93	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bulu	-	-	-	3.215.509.000	3.260.990.000	-	-	-	-	1.923.031.344	2.036.017.235	-	-	-	-	59,80	62,44	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tawangsari	-	-	-	4.621.918.000	4.981.910.000	-	-	-	-	3.411.231.064	3.168.447.437	-	-	-	-	73,81	63,60	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Nguter	-	-	-	4.732.840.000	5.577.087.000	-	-	-	-	3.172.212.576	3.659.368.594	-	-	-	-	67,03	65,61	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sukoharjo	-	-	-	6.304.515.000	5.865.688.000	-	-	-	-	3.329.531.745	3.720.185.002	-	-	-	-	52,81	63,42	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bendosari	-	-	-	2.899.052.000	3.358.935.000	-	-	-	-	2.346.745.994	2.708.637.551	-	-	-	-	80,95	80,64	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Polokarto	-	-	-	6.362.267.000	6.488.111.000	-	-	-	-	4.664.496.375	4.022.404.136	-	-	-	-	73,32	62,00	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Mojolaban	-	-	-	6.806.861.000	6.825.301.000	-	-	-	-	3.816.498.882	4.043.134.149	-	-	-	-	56,07	59,24	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Grogol	-	-	-	6.439.039.000	6.538.427.000	-	-	-	-	5.189.677.918	5.214.835.207	-	-	-	-	80,60	79,76	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Baki	-	-	-	3.949.096.000	4.442.547.000	-	-	-	-	3.029.693.790	2.790.667.066	-	-	-	-	76,72	62,82	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gatak	-	-	-	3.374.411.000	3.770.110.000	-	-	-	-	2.761.014.297	2.581.914.361	-	-	-	-	81,82	68,48	-
	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kartasura	-	-	-	4.221.668.000	4.460.041.000	-	-	-	-	3.534.824.452	3.150.211.602	-	-	-	-	83,73	70,63	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Weru	-	-	-	-	626.253.000	-	-	-	-	-	212.687.300	-	-	-	-	-	33,96	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bulu	-	-	-	-	556.651.000	-	-	-	-	-	231.129.325	-	-	-	-	-	41,52	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tawangsari	-	-	-	-	557.230.000	-	-	-	-	-	333.833.100	-	-	-	-	-	59,91	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nguter	-	-	-	-	674.251.000	-	-	-	-	-	261.273.720	-	-	-	-	-	38,75	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukoharjo	-	-	-	-	835.265.000	-	-	-	-	-	338.503.019	-	-	-	-	-	40,53	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendosari	-	-	-	-	678.458.000	-	-	-	-	-	396.649.200	-	-	-	-	-	58,46	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Polokarto	-	-	-	-	858.249.000	-	-	-	-	-	423.097.370	-	-	-	-	-	49,30	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mojolaban	-	-	-	-	761.775.000	-	-	-	-	-	320.240.260	-	-	-	-	-	42,04	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Grogol	-	-	-	-	752.143.000	-	-	-	-	-	485.763.980	-	-	-	-	-	64,58	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Baki	-	-	-	-	573.907.000	-	-	-	-	-	277.792.280	-	-	-	-	-	48,40	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gatak	-	-	-	-	512.364.000	-	-	-	-	-	301.643.620	-	-	-	-	-	58,87	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartasura	-	-	-	-	751.054.000	-	-	-	-	-	179.701.500	-	-	-	-	-	23,93	-

NO	URAIAN	Anggaran						Realisasi						Rasio					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
																			-

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

2.4.1. Tantangan/kendala

1. Kendala Eksternal

- a. Mobilitas penduduk yang tinggi antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo dan antar Kabupaten mempercepat sebaran penyakit menular. Hal ini mengakibatkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular meningkat misalnya HIV/AIDS, Covid-19 dan DBD.
- b. Pola makan dan gaya hidup masyarakat yang tidak sehat misalnya merokok, mengkonsumsi *junk food* dan mengkonsumsi narkoba, hal ini berdampak buruk terhadap kesehatan khususnya pada penyakit degeneratif /penyakit tidak menular misalnya Diabetes Miletus (DM), kardiovaskuler dan kanker (keganasan).
- c. Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak pada rendahnya kualitas lingkungan berupa, pembuangan sampah /limbah pabrik pada aliran sungai, penggunaan pestisida yang tidak tepat yang pada akhirnya berdampak pada masalah kesehatan misalnya gangguan kesehatan terutama penyakit yang berbasis lingkungan.
- d. Perubahan iklim yang ekstrem sebagai dampak dari *global warming* mengakibatkan adanya mutasi virus beberapa penyakit seperti DBD dan siklus hidup vektor yang semakin cepat. Semakin luas daerah endemis DBD dan Chikungunya. Pada kejadian banjir yang semakin meluas dapat berdampak pada peningkatan kejadian penyakit diare, ISPA, kulit dan Leptospirosis.
- e. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum optimal.

- f. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu di daerah perbatasan berpotensi peningkatan penyakit menular.
- g. Masih ada budaya/mitos/kepercayaan yang menghambat program kesehatan. Misalnya dalam menolak imunisasi, pantang makanan tertentu baik pada ibu hamil maupun saat menyusui, banyak anak banyak rejeki dan masih banyak yang lainnya.
- h. *Networking* / jejaring penanganan masalah kesehatan dengan sektor terkait belum optimal. Pembagian tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan upaya kesehatan dan hubungan antara pelayanan kesehatan oleh pemerintah, swasta, dunia usaha dan sektor lain belum optimal. Pemecahan masalah kesehatan belum mengacu pada pendekatan komprehensif lintas program dan lintas sektor, hal ini disebabkan belum ada persamaan persepsi.
- i. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha belum optimal. Kemitraan yang telah dibangun belum menampilkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya kesehatan. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk stakeholder belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam pemberdayaan di bidang kesehatan
- j. Pemerataan dan keterjangkauan masyarakat terhadap obat publik dan perbekalan kesehatan yang bermutu di unit pelayanan obat dan perbekalan kesehatan pemerintah maupun swasta, belum sesuai dikarenakan sistem yang ada belum tertata secara optimal. Penyusunan dan pelaksanaan kerjasama antar lintas program

(Badan POM, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota), lintas sektor dan organisasi profesi terkait serta lembaga masyarakat, dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sejak dari produksi, distribusi sampai dengan pemanfaatannya, belum optimal. Disamping itu, masih ditemukan peredaran sediaan farmasi, makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan kesehatan.

k. Mutu, pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional belum tertata secara optimal, baik mutu bahan baku, produksi serta pemanfaatan di sarana pelayanan kesehatan formal.

2. Kendala Internal :

- a. Kemampuan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan pembinaan teknis bidang kesehatan kurang sehingga banyak yang tidak menindaklanjuti hasil pembinaan misalnya dengan memberikan umpan balik dan solusi pemecahan masalah.
- b. Kurangnya advokasi, sosialisasi, promosi / pemasaran program / kegiatan bidang kesehatan kepada stakeholders.
- c. Belum optimalnya deteksi dini, surveilans dan penanganan ditingkat pelayanan Primer.
- d. Tenaga yang kompeten masih kurang dan penempatan tenaga tidak sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan serta kedisiplinan masih rendah.
- e. Penyelenggaraan manajemen kesehatan di berbagai tingkat administrasi, belum terpadu dan berkesinambungan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta

belum semua pelayanan umum bidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, adalah:

1. Peluang Eksternal

a. Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan ayat (2), bahwa Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peraturan perundangan tersebut merupakan peluang untuk mengembangkan sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan, dana Kapitasi dan TJJSP (Tanggung Jawab Sosial dari Lingkungan Perusahaan).

- 2) Perundangan yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Bidang Kesehatan yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat (1) e, yang menyebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama pasal 2 ayat (3), bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Kemudian dalam pelaksanaan kedua undang-undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 128 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan, ayat (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga, ayat (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

- b. Terdapat dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan. Selanjutnya pada Ayat (4) yang berbunyi bahwa Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan, dan salah satunya (pada point b) adalah kesehatan;
- c. Terdapat komitmen global, regional dan nasional yang menyangkut masalah kesehatan, mewajibkan pemerintah memberi perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan. Program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), menggantikan program sebelumnya Millennium Development Goals (MDGs) yang selesai pada akhir tahun 2015. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan. Tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) tidak berbeda jauh dari Millennium Development Goals (MDGs) yang di antaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. Secara umum SDG's memiliki 17 sasaran, di mana sasaran 14 berisikan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya samudera, laut dan kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. Goal 14 SDG's bisa menjadi visi kita

bersama dalam menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tentunya dengan pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan.

- d. Budaya gotong royong masih melekat pada masyarakat Kabupaten Sukoharjo sehingga masalah kesehatan dapat diatasi secara bersama. Budaya harus dipertahankan dalam bentuk program bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
- e. Peluang peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan, seminar, workshop, PKB (Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan).
- f. Jejaring dengan pelayanan swasta pada pelayanan rujukan.
- g. Adanya dukungan finansial dan sumber daya dari lembaga donor baik dalam maupun luar negeri.

2. Peluang Internal

- a. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi (APBD), Pemerintah pusat (Dana Alokasi Khusus) maupun anggaran hibah serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah (APBD).
- b. Kesempatan mengalokasikan formasi kebutuhan tenaga melalui cara *out sourcing* contoh tenaga cleaning service, satpam, tenaga medis, paramedis dan tenaga lainnya.
- c. Keberadaan UPT dan UOBK Dinas Kesehatan memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- d. Keberadaan jaringan Puskesmas di setiap desa memberikan kemudahan masyarakat memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mendasarkan pada isu strategis Kabupaten Sukoharjo yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, maka tidak lepas dari peran Dinas Kesehatan untuk mewujudkannya. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dapat terwujud apabila masyarakat Kabupaten Sukoharjo terpenuhi kebutuhan dasar termasuk pelayanan kesehatannya.

Permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan sumber daya kesehatan dan evaluasi kinerja pelayanan umum dan khusus, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat lihat pada tabel berikut:

Tabel. III.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	No	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingginya Angka Kesakitan dan Angka Kematian	1.	Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi/balita, gizi buruk dan stunting pada balita.	Kematian ibu karena penyebab tidak langsung seperti jantung, kanker dan ibu tidak bersedia menunda kehamilannya serta pergeseran penyebab kematian ibu dari perdarahan menjadi pre eklamsi dan

No	Masalah Pokok	No	Masalah	Akar Masalah
				kematian ibu nifas. Kematian bayi karena kasus riwayat BBLR. Masih ada kasus gizi buruk dan stunting pada balita karena pola asuh dan riwayat penyakit penyerta.
		2.	Masih adanya kasus penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak Menular	Penemuan dan pengobatan HIV/ AIDS, TB belum optimal, semakin tingginya kasus TB MDR (<i>Multi Drug Resistance</i>) disebabkan tidak tuntas/ tidak teratur dalam meminum obat TB, kenaikan penemuan TB pada anak sebesar 300%, kasus DBD meningkat (angka kesakitan 69,8 per 100 ribu penduduk) dan angka bebas jentik masih rendah kurang dari 95 %. Masih terdapat penolakan imunisasi di masyarakat serta kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko hipertensi,

No	Masalah Pokok	No	Masalah	Akar Masalah
				diabetes mellitus, kanker/ keganasan dan kesehatan jiwa masih kurang.
		3.	Pelayanan kesehatan dalam penanggulangan bencana/ KLB/ krisis kesehatan belum optimal	Posisi geografis Kabupaten Sukoharjo yang merupakan daerah rawan bencana; timbulnya penyakit Infeksi Emerging baru/strain baru yang dapat/ berpotensi menimbulkan KLB/ Krisis Kesehatan.
		4.	Cakupan UCI yang belum 100%	Masih ada penolakan masyarakat terhadap pemberian vaksin di beberapa kelompok tertentu yang berhubungan dengan keyakinan.
2.	Akses dan Mutu pelayanan kesehatan belum sesuai standar	5.	Masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang belum sesuai standar/ ketentuan	Adanya Pandemi COVID-19 sehingga ada penundaan survei akreditasi maupun reakreditasi bagi semua Fasyankes berdasar Surat Edaran dari Kemenkes Nomor Hk.02.01/Menkes/455/2020 Tentang Perizinan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan ,

No	Masalah Pokok	No	Masalah	Akar Masalah
				dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
		6.	Belum semua fasyankes melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan	Peraturan baru belum tersosialisasi secara maksimal ke semua fasyankes, terutama klinik dan tempat praktek dokter umum/gigi
		7.	Belum semua masyarakat Kabupaten Sukoharjo ikut jaminan kesehatan.	Minat masyarakat untuk mendaftar secara mandiri masih sangat minim (kurangnya kesadaran dan pemahaman akan manfaat JKN) ; masih terdapat penduduk miskin dan atau tidak mampu belum terdaftar sebagai peserta JKN. Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional, terdapat 3 kendala dalam pencapaian UHC yakni kepesertaan (minat masyarakat), distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum merata serta komitmen pemangku kepentingan

No	Masalah Pokok	No	Masalah	Akar Masalah
		8.	Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis di Kabupaten Sukoharjo	Belum tersedia BMHP untuk melaksanakan skrining faktor resiko pada lansia, peran jejaring dan jaringannya dalam skrining kesehatan belum optimal dalam pelaporannya; Skrining TB belum optimal dilaksanakan terutama di dokter praktek mandiri dan praktek klinik.
3.	Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sukoharjo	9.	Beberapa indikator yang capaiannya masih rendah yaitu keluarga mengikuti program KB, penderita TB paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat teratur, penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak merokok dan keluarga menjadi anggota JKN	Kurangnya pendampingan Pengawas Menelan Obat (PMO), kurangnya motivasi pasien terhadap terapi yang sifatnya rutinitas, stigma masyarakat yang salah terhadap ODGJ, rendahnya minat masyarakat untuk mendaftar JKN secara mandiri dan edukasi dari tenaga kesehatan belum efektif serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.

No	Masalah Pokok	No	Masalah	Akar Masalah
4.	Tata kelola pemerintahan yang belum akuntabel	10.	Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, <i>unpredictable</i> dan <i>unbounderless</i> menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan.	Kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang masing kurang Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai <i>feed back</i> dalam proses pembangunan daerah masih kurang
		11.	Belum efektif dan efisien dalam perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan	Hasil monitoring dan evaluasi program belum dianalisa secara mendalam sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya, Dalam membuat perencanaan program/kegiatan belum melihat indikator kinerja program/ kegiatan
		12.	Belum dilakukan pengawasan terhadap	Hasil monitoring evakuasi di bagian tata kelola kearsipan masih

No	Masalah Pokok	No	Masalah	Akar Masalah
			pengelolaan kearsipan	terdapat surat dan dokumen yang hilang, sulitnya menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat, penumpukan arsip di sembarang tempat, pengelolaan arsip yang tidak sesuai kaidah-kaidah kearsipan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah

3.2.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo 2021–2026 adalah **“Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur”** dengan slogan MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020. Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

MAJU, Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita

ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikir dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN, Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL, Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP, Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo. UNGGUL, Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik. RAPI, Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur ,tertib, beres.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
- 3) Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi.
- 4) Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.
- 5) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

3.2.2. Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka yang menjadi penekanan adalah misi ke-2 yakni “ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas” Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera. Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

Dari misi kedua yakni “ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas” ini Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tujuannya adalah “Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang diukur dengan indikator berupa “Angka Harapan Hidup (AHH)”

3.2.3. Program Prioritas (unggulan) Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo maka dibidang Kesehatan Program unggulanya adalah Penguatan Sistem Kesehatan dan Penanganan Pandemi Covid-19, melalui:

- a. Vaksinasi Covid-19 gratis;
- b. Memperluas deteksi Covid-19 melalui rapid test massal dan pengadaan PCR (Polymerase Chain Reaction) Swab test;
- c. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19;
- d. Memfasilitasi bagi masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan dengan penjemputan pasien;
- e. Berobat gratis bagi keluarga miskin melalui Jamkesda, Jampersal dan pengelolaan Premi Asuransi Kesehatan;
- f. Membudayakan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS);
- g. Pembangunan Rumah Sakit di Eks - Terminal Kartasura.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam Perubahan Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022, tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pembangunan yaitu:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Visi Presiden Republik Indonesia dan juga visi Kementerian Kesehatan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” ini sejalan dan searah dengan visi Bupati Sukoharjo, yaitu “Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur”,

Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden yang ke-5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Misi ini juga selaras dengan misi ke 2 Bupati Sukoharjo, yaitu “ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”.

Guna tercapainya indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD.

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031 yang kemungkinan akan berdampak ke permasalahan kesehatan , meliputi Arah pengembangan struktur ruang Pengembangan struktur ruang berupa pengembangan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang dikategorikan berdasar sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan meliputi:

1. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) memiliki cakupan skala layanan tingkat kabupaten atau regional terdiri atas Kawasan Perkotaan Kecamatan Kartasura dan Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo.
2. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) memiliki cakupan skala layanan tingkat kecamatan atau lintas kecamatan, terdiri atas Kawasan Perkotaan Kecamatan: Grogol, Mojolaban, Tawang Sari, Gatak, Baki, Polokarto, Bendosari, Nguter, Weru dan Bulu.
3. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) memiliki cakupan skala layanan tingkat kawasan perdesaan, terdiri atas: Palur

(Mojolaban), Sragen dan Jati (Gatak), Lengking (Bulu), Kayuapak (Polokarto), Jatingarang (Weru), Kepuh (Nguter), Mojorejo (Bendosari) dan Kedungjambal (Tawang Sari).

Adapun sistem jaringan prasarana yang akan dikembangkan meliputi:

1. Sistem jaringan transportasi, terdiri atas sistem jaringan jalan, sistem jaringan KA dan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
2. Sistem jaringan energi, terdiri atas jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
3. Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas jaringan tetap dan jaringan bergerak.
4. Sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas sumber air, prasarana sumber daya air, jaringan air baku untuk air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
5. Sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas: sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem jaringan drainase

Selain hal tersebut diatas adalah kaitan dengan beberapa wilayah Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai kerawanan bencana berupa, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, dan tanah longsor.

Sedangkan integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Rencana Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yaitu pada Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, berkaitan dengan hal tersebut permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan;

2. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.

Selanjutnya dari permasalahan tersebut Sasaran yang ditengttukan adalah tercapainya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Kesehatan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, implikasi RTRW dan KLHS Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo maka isu strategis Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Letak geografis Kabupaten Sukoharjo yang merupakan daerah rawan bencana.
2. Timbulnya penyakit infeksi *emerging* baru.
3. Masih ditemukannya permasalahan gizi pada balita di Kabupaten Sukoharjo dengan penyebab langsung adanya penyakit penyerta dan pola asuh.
4. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kematian bayi dari 5,52 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2021 menjadi 6,23 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun penyebab terbesar kematian bayi di Kabupaten Sukoharjo yaitu kelainan kongenital, berat badan lahir rendah dan sangat rendah, dan asfiksia.
5. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan angka kematian balita dari 7,16 per 1.000

kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 7,99 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Adapun penyebab kematian balita Kabupaten Sukoharjo terbanyak adalah riwayat BBLR/BLSR, kelainan kongenital, dan kanker.

6. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kematian ibu dari 172,60 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 111,59 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun penyebab kematian ibu terbanyak Kabupaten Sukoharjo disebabkan oleh pre eklamsia dan penyakit jantung yang diderita ibu.
7. Rendahnya penemuan kasus TB. Masih ditemukannya kasus impor malaria dan adanya *Anopheles sp* yang berpotensi menjadi vektor malaria di Sukoharjo yang berpotensi menimbulkan KLB. Adanya mobilitas populasi kunci HIV/AIDS yang kurang patuh berpotensi menimbulkan insidensi/kasus baru termasuk pada ibu rumah tangga.
8. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit tidak menular (PTM).
9. Peningkatan Mutu Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Keberhasilan proses pembangunan daerah didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu membangun aparatur yang berkualitas, kompeten dan berkinerja baik menjadi syarat mutlak agar mampu mengimplementasikan semua bentuk cita-cita pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 adalah:

Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat, dengan indikator tujuan yaitu “Angka Harapan Hidup”

4.1.2. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yaitu Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat, dengan indikator tujuan yaitu “Angka Harapan Hidup” maka sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian dan dengan indikator sasaran :
 - 1) AKI (Angka Kematian Ibu)
 - 2) AKB (Angka Kematian Bayi)

- 3) AKABA (Angka Kematian Balita)
 - 4) Stunting
 - 5) Persentase Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
 - 6) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - 7) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan
2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik dengan indikator sasaran:
 - 1) Nilai SAKIP

Tujuan dan sasaran serta indikator dan target diuraikan dalam tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel. IV.1 Tujuan dan Sasaran serta Indikator dan Target Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja pada							
					2021 (transisi)		2022		2023	2024	2025	2026
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
Sebelum Perubahan												
1	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkatkan		Angka Harapan hidup	tahun	77,65	77,73	77,70	77,82	77,75	77,8	77,85	77,9
1.1		Menurunnya angka kesakitan dan kematian	AKI (Angka Kematian Ibu)	Per 100.000 KH	97	172,6	96	111,59	95	94	93	92
			AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1.000 KH	7,4	5,52	7,3	6,23	7,2	7,1	7	6,9
			AKABA (Angka Kematian Balita)	Per 1.000 KH	8,5	7,16	8,5	7,99	8,4	8,3	8,2	8,1
			Persentase Stunting	%	7,75	7,1	7,7	8,1	7,65	7,6	7,55	7,5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja pada							
					2021 (transisi)		2022		2023	2024	2025	2026
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
			Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	≥ 95	100	≥ 95	100	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
			Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	62	66,01	64	70,07	66	69	72	75
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	21	21	27	22,6	36	45	54	65

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja pada							
					2021 (transisi)		2022		2023	2024	2025	2026
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai Sakip	Poin	72	72,24	75	85,5	76	77	78	80
Sesudah Perubahan												
1	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat		Angka Harapan hidup	tahun	77,65	77,73	77,70	77,82	77,75	77,8	77,85	77,9
1.1		Menurunnya angka kesakitan dan kematian	AKI (Angka Kematian Ibu)	Per 100.000 KH	97	172,6	96	111,59	95	94	93	92
			AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1.000 KH	7,4	5,52	7,3	6,23	7,2	7,1	7	6,9
			AKABA (Angka Kematian Balita)	Per 1.000 KH	8,5	7,16	8,5	7,99	8,4	8,3	8,2	8,1
			Persentase Stunting	%	7,75	7,1	7,7	8,1	7,65	7,6	7,55	7,5
			Ketercapaian upaya pencegahan	%	≥ 95	100	≥ 95	100	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja pada							
					2021 (transisi)		2022		2023	2024	2025	2026
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
			dan pengendalian Penyakit Menular									
			Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	62	66,01	64	70,07	66	69	72	75
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	21	21	27	22,6	36	45	54	65
		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai Sakip	Poin	72	72,24	75	85,5	76	77	78	80

Target indikator sasaran di tahun 2023 tidak mengalami perubahan target. Beberapa penyebab indikator sasaran ada yang tidak mencapai target adalah:

1. Angka Kematian Ibu

Di tahun 2022, angka kematian ibu masih jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu 111,59/ 100.000 KH dari target 96/100.000 KH. Kematian ibu di Kabupaten Sukoharjo disebabkan oleh beberapa faktor penyebab tidak langsung seperti penyakit jantung dan kanker. Ibu dengan penyakit tersebut hendaknya tidak diperbolehkan untuk hamil karena dapat membahayakan nyawa ibu. Namun kondisi di lapangan, ibu tidak bersedia menunda kehamilannya. Selain itu terjadi pergeseran penyebab kematian ibu dari perdarahan menjadi pre eklampsia dan kematian ibu nifas.

2. Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kematian bayi yaitu 6,23% dari 5,52% pada tahun 2021. Peningkatan angka kematian bayi di Kabupaten Sukoharjo karena penyebab BBLR dan kelainan kongenital.

3. Persentase Stunting

Pada tahun 2022, keterisian aplikasi e-PPGBM sebagai instrumen pencatatan pelaporan surveilans gizi telah mencapai 93,5%. Sedangkan di tahun 2021 keterisian e-PPGBM baru mencapai 77,05%. Persentase keterisian e-PPGBM akan berpengaruh terhadap capaian persentase stunting, karena semakin banyak input pengukuran tinggi badan anak di aplikasi maka deteksi stunting dengan penemuan kasus lebih dini bisa dilakukan. Selain itu pelaporan kasus stunting dari rumah sakit negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya mulai aktif di tahun 2022 sehingga kasus lebih banyak ditemukan dan terpantau oleh tenaga kesehatan.

4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan

Pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan tertunda pelaksanaannya selama masa pandemi karena diskresi dari Kementerian Kesehatan berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan

Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam periode 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

VISI : “Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur”

MISI: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan di dalam BAB IV Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, telah ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Peningkatan sarana prasarana dan jenis layanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, kepatuhan petugas dalam melaksanakan SOP pelayanan kesehatan, sarana prasarana pelayanan kesehatan dan penguatan pembiayaan kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi	Peningkatan pelayanan maternal neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta, perbaikan gizi anak, remaja putri dan ibu hamil serta peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
		Menurunkan prevalensi balita stunting, gizi kurang dan gizi buruk, dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan memberdayakan kader kesehatan di desa bersama masyarakat.	Peningkatan gizi balita dengan menumbuhkan kemandirian masyarakat sadar gizi, pemantauan pertumbuhan balita baik oleh tenaga kesehatan, kader kesehatan masyarakat serta penguatan sistem surveilans gizi
		Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di seluruh tatanan institusi melalui advokasi, bina swasana dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran pemerintah,	Menciptakan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; Peningkatan Desa ODF, STBM, lingkungan sehat, cakupan pelayanan kesehatan kerja, mutu makanan di kantin sekolah, penjamah makanan & minuman tidak mengandung bahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		dunia usaha dalam pembangunan kesehatan	berbahaya serta upaya promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif.
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular melalui kompetensi tenaga kesehatan, kerjasama lintas program, lintas sektor dan peran serta masyarakat.	Penurunan angka kesakitan dan kematian Penyakit menular dan tidak menular dengan peningkatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Mewujudkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dengan melibatkan peran lintas program, lintas sektor dan peran serta masyarakat.
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Melaksanakan manajemen pengelolaan pemerintah dibidang kesehatan yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada visi dan misi Bupati Sukoharjo tahun 2021 – 2026, serta tujuan, sasaran dan strategi yang mendukung tercapainya visi dan misi tersebut dari bidang kesehatan, maka program-program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang disusun untuk kurun waktu 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Pembinaan Tehnis, Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten / Kota;
- c. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman

- a. Pemberian Izin Apotek Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan

Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;

- c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- i. Peningkatan Pelayanan BLUD

Tabel VI.1 Persandingan Indikator Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang meningkat								
				Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun			
	Menurunnya angka kesakitan dan kematian							
				Angka Kematian Ibu (AKI).	per 100.000 KH			Bidang Kesmas
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	per 1.000 KH			Bidang Kesmas
				Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	per 1.000 KH			Bidang Kesmas
				Persentase Stunting	Persen			Bidang Kesmas
				Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	Persen			Bidang Yankes P2P
				Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persen			Bidang Yankes P2P
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	Persen			Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasyankes
		1.2.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
			Kesehatan Masyarakat					
				Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit menular	Persen			Bidang Yankes P2P
				Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	Persen			Bidang Yankes P2P
				Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	Persen			Bidang Yankes P2P
				Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi	Persen			Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasyankes
				Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	Persen			Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasyankes
				Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	Persen			Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasyankes
				Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	Persen			Bidang Kesmas
				Persentase Capaian UHC	Persen			Bidang Kesmas
				Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	Persen			Bidang Kesmas
				Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	Persen			Bidang Kesmas
				Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	Persen			Bidang Kesmas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	Persen			Bidang Kesmas
				Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	Persen			Bidang Kesmas
				Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reproduksi	Persen			Bidang Kesmas
				Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia	Persen			Bidang Kesmas
				Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen			Bidang Yankes P2P
				Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	Persen			Bidang Yankes P2P
				Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	Persen			Bidang Yankes P2P
				Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	Persen			RSUD
				NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap- tiap 1000 pasien keluar	Persen			RSUD
				Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Persen			RSUD
		1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase tingkat ketersediaan obat dan bmhp	Persen			
				Persentase capaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP kewenangan daerah kabupaten kota (RSUD)	Persen			
		1.2.2.2.01.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				<i>Tersusunnya DED</i>	<i>dok</i>	<i>Jumlah Rumah Sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000</i>	<i>unit</i>	RSUD
				<i>Pembangunan Rumah Sakit Type D di Kecamatan</i>	<i>Paket</i>			
				<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung Rumah sakit Type D di Kecamatan</i>	<i>Paket</i>			
		1.2.2.2.0 1.2	<i>Pembangunan Puskesmas</i>					
				<i>Pembangunan Gedung Puskesmas terlaksana</i>	<i>puskesmas</i>	<i>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun</i>	<i>Unit</i>	
		1.2.2.2.0 1.5	<i>Pengembangan Rumah Sakit</i>					
				<i>Jumlah gedung IGD terpadu yang dibangun</i>	<i>unit</i>	-	-	
		1.2.2.2.0 1.7	<i>Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>					
				<i>Jumlah Produk simplisia/minuman jamu yang dikembangkan produksinya di P4TO</i>	<i>produk</i>	<i>Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar</i>	<i>unit</i>	
		1.2.2.2.0 1.8	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit</i>					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Jumlah ruangan yang direnovasi untuk mencapai standarisasi kelas program JKN	ruang	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Rumah Sakit	unit	
		1.2.2.2.0 1.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
				Pemeliharaan peralatan dan gedung P4TO	Paket	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	unit	
		1.2.2.2.0 1.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Pembuatan sarana fasilitas pelayanan kesehatan tradisional	Paket	-	-	
		1.2.2.2.0 1.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Pembangunan masjid di lingkungan RSUD Sukoharjo	Paket	-	-	
				Antropometri Set	Paket			
		1.2.2.2.0 1.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Pengadaan alat kesehatan /Alat Penunjang Medik di Labkesda	item	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit	
				Jumlah alat kesehatan /Alat Penunjang Medik yang diadakan di RSUD Sukoharjo	unit			
		1.2.2.2.0 1.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Jumlah alat kalibrasi yang diadakan	unit	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kaliberasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ Regional Maintenance Center	unit	
				Alat kesehatan di puskesmas terkalibrasi	unit			
				Kalibrasi alat kesehatan di Gudang Farmasi	item			
		1.2.2.2.0 1.16	Pengadaan Obat, Vaksin					
				Pengadaan obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan	item	-	-	
				Review Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 2021 dan Tersusunnya RKO 2022	dok			
				Jumlah item Pengadaan obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan	item			
		1.2.2.2.0 1.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai					
				Jumlah item Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan kesehatan	item	-	-	
				Pengadaan BMHP untuk puskesmas	item			
				Pengadaan BMHP untuk Labkes	item			
		1.2.2.2.0 1.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Panjang kabel listrik yang diganti dari genset ke panel yang sesuai standard untuk menunjang pelayanan kesehatan	m	-	-	
		1.2.2.2.0 1.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				<i>Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar</i>	<i>unit</i>	<i>Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar</i>	<i>unit</i>	
				<i>Jumlah pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik besar yang sesuai standard di RSUD Sukoharjo</i>	<i>unit</i>			
				<i>Kalibrasi alat kesehatan di Gudang Farmasi</i>	<i>item</i>			
				<i>Pemeliharaan dan Kalibrasi alat kesehatan di Labkes</i>	<i>unit</i>			
		1.2.2.2.0 1.21	<i>Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>					
				<i>Terlaksananya pendistribusian obat, bmhp, vaksin, reagen ke Puskesmas</i>	<i>k</i>	-	-	
		1.2.2.2.0 1.23	<i>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</i>					
				-	-	<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	<i>Paket</i>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
			<i>Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan</i>					
				-	-	<i>Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>	<i>Paket</i>	
		1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer terakreditasi	Persen			
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan terakreditasi	Persen			
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya terakreditasi	Persen			
				Persentase Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Persen			
				Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau potensi Bencana	Persen			
				Capaian Universal Health Coverage (UCI Desa/Kelurahan)	Persen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Persentase Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu	Persen			
				Persentase Pasien HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan standar	Persen			
				Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	Persen			
				Desa/Kalurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam	Persen			
				Imunisasi lanjutan anak SD sederajat	Persen			
				Imunisasi dasar lengkap	Persen			
				Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persen			
				Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen			
				Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Persen			
				Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa	Persen			
				Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar selama periode kehamilan (K4,K6)	Persen			
				Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen			
				Persentase kunjungan Bayi baru lahir	Persen			
				Persentase pelayanan anak balita	Persen			
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persen			
				Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk)	Persen			
				Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Persen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans gizi	Persen			
				Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita	Persen			
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persen			
				Prosentase ketercapaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	Persen			
		1.2.2.2.0 2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
				Pembahasan Deteksi Penyakit Penyerta pada Ibu Hamil bagi Petugas	O/Th	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	
				Removal Program Kesga Gizi	k			
				Penguatan Pengisian Buku KIA bagi Petugas Kesehatan	O/Th			
				Orientasi Petugas dalam melaksanakan antenatal care dan post natal care	O/Th			
				Penguatan MPDN(Maternal Perinatal Death Notification) bagi petugas kesehatan	O/Th			
				Penyusunan Regulasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	dok			
				Sosialisasi Perbub Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	orang			
				Peningkatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan kelas ibu hamil dan ibu balita	orang			
				Penguatan Rujukan Terpadu Maternal Neonatal bagi Petugas	orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				<i>Orientasi Simatneo ,MPDN dan e-kohort tingkat kabupaten</i>	<i>k</i>			
				<i>Orientasi Kelas Ibu (Ibu Hamil dan Ibu Balita) bagi tenaga kesehatan di Puskesmas</i>	<i>k</i>			
				<i>Pembentukan dan Koordinasi Tim AMPSR Kabupaten</i>	<i>k</i>			
		1.2.2.2.0 2.2	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>					
				<i>Pelaksanaan Penyeliaan Fasilitatif KIA bagi Puskesmas,TMB,dan klinik</i>	<i>puskesmas</i>	<i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	<i>Orang</i>	
				<i>Transport pengiriman sampel</i>	<i>kasus</i>			
				<i>Peningkatan Kualitas KN/ KF bagi Tenaga Kesehatan</i>	<i>orang</i>			
				<i>Jampersal</i>	<i>kasus</i>			
				<i>Koordinasi LS/LP dalam rangka AKI/ AKB</i>	<i>k</i>			
				<i>Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tim Kesga Gizi dalam Akselerasi Penurunan AKI,AKB dan Stunting</i>	<i>k</i>			
		1.2.2.2.0 2.3	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>					
				<i>Kajian AMP oleh Tim AMP Kabupaten</i>	<i>k</i>	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</i>	<i>Orang</i>	
				<i>Pembelajaran Hasil Rekomendasi AMP</i>	<i>k</i>			
				<i>Peningkatan Kapasitas SDM dalam neonatal esensial</i>	<i>k</i>			
				<i>Penguatan Pelayanan BBL (Screning hipotiroid)</i>	<i>k</i>			
				<i>Pengkajian AMP</i>	<i>k</i>			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				<i>Orientasi Skrining Hipotiroid Sindrom (SHK)</i>	<i>k</i>			
		1.2.2.2.0 2.4	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>					
				<i>Jumlah Dokumen Perencanaan</i>	<i>dok</i>	<i>Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	<i>Orang</i>	
				<i>Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor Program Imunisasi balita</i>	<i>k</i>			
				<i>Monev Program Imunisasi balita</i>	<i>k</i>			
				<i>Peningkatan Kapasitas Program Imunisasi balita</i>	<i>orang</i>			
				<i>Bimbingan dan Pembinaan Teknis Program Imunisasi balita</i>	<i>k</i>			
				<i>Penyediaan Vaksin dan Logistik Program Imunisasi, serta pendistribusian ke Fasyankes</i>	<i>bln</i>			
	Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangannya			<i>Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-ray</i>	<i>k</i>			
				<i>Penyusunan dan Penyediaan media KIE</i>	<i>k</i>			
				<i>Koordinasi Yankes Anak Balita dalam SDIDTK</i>	<i>k</i>			
				<i>Penguatan Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah</i>	<i>k</i>			
				<i>Monev Pemanfaatan Buku KIA di Puskesmas</i>	<i>puskesmas</i>			
		1.2.2.2.0 2.5	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>					
				<i>Perencanaan BIAS tingkat Kabupaten</i>	<i>dok</i>	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	<i>Orang</i>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Monitoring dan Evaluasi BIAS	k			
				Bimbingan dan Pembinaan Teknis BIAS	k			
				Pelaksanaan BIAS	sekolah			
				Penyediaan Vaksin dan Logistik Program Imunisasi Anak Sekolah, serta pendistribusian ke Fasyankes	k			
				Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-raya	k			
				Penguatan Kabupaten dalam membina posyandu remaja	k			
				Penyusunan dan Penyediaan media KIE	k			
				Koordinasi pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri	k			
				Koordinasi pelayanan Kesehatn Peduli Remaja	k			
		1.2.2.2.0 2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
				Penguatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	k	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	
				Calon Pengantin Bagi Tenaga Kesehatan				
				Pertemuan Koordinasi LS/LP dalam	k			
				Penguatan Implementasi Pelayanan				
				Kesehatan Masa Sebelum Hamil				
				Pertemuan Koordinasi Provider IVA	k			
				Pembinaan Teknis TT WUS	k			
				Orientasi Penggunaan panduan Praktis untuk	orang			
				Caregiver/ Informal pada perawatan Jangka				
				Panjang bagi Lansia				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Sosialisasi PANDU PTM	puskesmas			
				Pelatihan PANDU PTM di Puskesmas	puskesmas			
				Integrasi SIMPUS dengan Si PTM dan	puskesmas			
				Pelayanan PANDU PTM				
				Pelaksanaan PANDU PTM	puskesmas			
				Jumlah Pembentukan Posbindu	pos			
				Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posbindu	orang			
				BMHP Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit	stick			
				Tidak Menular				
				Jumlah Puskesmas melaksanakan	puskesmas			
				Pembelian kit Posbindu				
				Jumlah peserta pelatihan Provider IVA	orang			
				Bimbingan Teknis Provider IVA oleh dr Spesialis	k			
				KIE kepada wanita usia 30-50 tahun beserta pasangannya	k			
				Jumlah Puskesmas melaksanakan pengadaan Krio teraphi dan pemeliharaannya	puskesmas			
				Jumlah terdeteksi Dini Ca Serviks dan Ca payudara	orang			
				Monitoring evaluasi kegiatan IVA	k			
				Deteksi dini FR PTM pada usia produktif	orang			
		1.2.2.2.0 2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
				Rapat Koordinasi Puskesmas Santun Lansia di DKK	k	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	
				Pembinaan Program Lansia di Puskesmas	puskesmas			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				<i>Refreshing Buku Kesehatan Lansia bagi Kader Lansia</i>	<i>kader</i>			
				<i>Koordinasi hari ulang tahun lansia tingkat Kabupten</i>	<i>k</i>			
				<i>Pertemuan Program Kesehatan Lansia</i>	<i>k</i>			
				<i>Koordinasi dan konsultasi kegiatan program Lansia ke Semarang</i>	<i>k</i>			
				<i>Refresing dan Evaluasi peran kader kesehatan lansia</i>	<i>k</i>			
				<i>CERDIK dalam Penanggulangan Hipertensi</i>	<i>k</i>			
		1.2.2.2.0 2.8	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>					
				<i>Pengumpulan data Hipertensi dari jejaring</i>	<i>k</i>	<i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	<i>Orang</i>	
				<i>Pemanfaatan data Hipertensi dari PISPK/ Data lainnya</i>	<i>k</i>			
				<i>CERDIK dalam Penanggulangan Hipertensi</i>	<i>k</i>			
				<i>Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Dengan Jejaring PTM Puskesmas dalam Rangka CERDIK dalam Penanggulangan Hipertensi</i>	<i>k</i>			
		1.2.2.2.0 2.9	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>					
				<i>Pengumpulan data DM dari jejaring</i>	<i>k</i>	<i>Jumlah penderita dibates mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	<i>Orang</i>	
				<i>CERDIK dalam Penanggulangan DM</i>	<i>k</i>			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
		1.2.2.2.0 2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat					
				Rujukan ODGJ	k	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Orang	
				Koordinasi Stake Holder terkait penanganan ODGJ	k			
				KIE terhadap keluarga dan lingkungan terkait penanganan ODGJ	k			
				Terbentuknya Rumah Singgah untuk pasien ODGJ	rumah			
				Kunjungan Rumah pada pasien ODGJ	k			
				Terapi aktifitas Fisik Bagi Penderita ODGJ	puskesmas			
				Advokasi dan koordinasi ODGJ tingkat Daerah	k			
				OJT Kesehatan Jiwa	orang			
		1.2.2.2.0 2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
				Penguatan investasi kontak TB	kasus	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	
				Pengiriman sampel TBC untuk uji silang	k			
				Penguatan program P2TB	k			
				Penguatan, pembinaan, supervisi, bintek, monitoring dan evaluasi jejaring fasyankes	Faskes			
				Penyediaan media KIE program TBC	bh			
				Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik P2TBC	k			
				Penguatan diagnosis dan tata laksana TB	Faskes			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan serta validasi data P2TBC	Faskes			
		1.2.2.2.0 2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV					
				Penemuan kasus HIV ADIS	%	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	
				Penguatan dan advokasi terhadap lintas sektor terkait	k			
				Penguatan, pembinaan, supervisi, bintek, monitoring dan evaluasi jejaring fasyankes	Faskes			
				Penguatan, advokasi dan pendampingan terhadap KDS ODHA	k			
				Peningkatan kapasitas Tim HIV Puskesmas dan RS untuk kegiatan Orientasi Tes and Treat (OTT)	Faskes			
				Logistik HIV	jns			
				Penyediaan media KIE HIV	bh			
				Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik P2HIV	k			
				Operasional penguatan kegiatan HIV (KPA)	Paket			
				Penguatan program P2HIV	k			
		1.2.2.2.0 2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					
				Penanganan dan Penanggulangan COVID-19	keg	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa(KLB) sesuai standar	Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
		1.2.2.2.0 2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ Atau Berpotensi Bencana					
				Jumlah Puskesmas respon cepat penanggulangan bencana < 24 jam	puskesmas	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana sesuai standar	Dokumen	
				Jumlah Kegiatan Pelayanan vaksinasi covid	keg			
		1.2.2.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
				Pertemuan koordinasi LS/LP dalam Pemantauan tumbuh kembang balita	k	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	
				Orientasi pemanfaatan buku KIA/ KMS	k			
				Penyediaan media dalam rangka penurunan stunting	lbr			
				Pelaksanaan Rembuk Stunting	k			
				Koordinasi kegiatan program gizi ke Semarang	k			
				Pendampingan balita gizi buruk	anak			
				Pemantauan distribusi tablet tambah darah bagi remaja putri	sekolah			
				Optimalisasi peran duta anemia terhadap pencegahan Anemia remaja putri di kabupaten sukoharjo	k			
				PMT Penyuluhan di Posyandu	pos			
				PMT Penyuluhan bagi anak difabel di sanggar inklusi	anak			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Pertemuan analisis dan mapping permasalahan gizi	k			
				Validasi Data Gizi ke Puskesmas	puskesmas			
				Pelacakan dan Konfirmas masalah Gizi (Surveilans Gizi)	anak			
				Pengumpulan dan Pelaporan Data Gizi Terintegrasi	k			
				Peningkatan Kapasitas Petugas dan kader dalam pemberian makan bayi dan anak	orang			
				Konvergensi LS/LP untuk penurunan Stunting melalui pemberian TTD bagi remaja dan Ibu hamil	k			
				Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tatalaksana Gizi Buruk	orang			
				Advokasi percepatan penurunan stunting melalui perintisan rumah Gizi	k			
				Monitoring evaluasi kegiatan program Gizi	k			
				Pemantauan pemberian PMT Balita Kurus dan Bumil KEK	puskesmas			
				Pemetaan dan analisis situasi program stunting	k			
				Pembinaan KPM	orang			
				Pengukuran dan publikasi stunting	k			
				Penguatan sistem manajemen data (pencatatan dan pelaporan) dalam rangka penurunan stunting	k			
				Review kinerja tahunan aksi integrasi stunting	k			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Penyediaan PKMK (Pangan olahan keperluan medis khusus) bagi balita dengan masalah gizi	Paket			
		1.2.2.2.0 2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
				Pembinaan dan pembentukan Pos UKK/ GP2SP/ K3 Perkantoran	k	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	
				Kampanye Aktifitas Fisik Melalui senam Bersama	bln			
				Monev program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	k			
				Advokasi dan Sosialisasi Program Kesehatan Kerja	k			
				Pengukuran Kebugaran Jasmani	k			
		1.2.2.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
				Pembinaan Pengelolaan Sanitasi TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)	k	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	
				Pengelolaan Sampah Medis oleh Pihak ke II	bln			
				Monev Program Kesehatan Lingkungan	k			
				Pengembangan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	k			
				Pembinaan Pengelolaan Sanitasi TTU (Tempat-Tempat Umum)	k			
				Pembinaan Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes	k			
				Bantuan Sosial Jamban	orang			
		1.2.2.2.0 2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
				Penyediaan Informasi Media KIE	jns	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Penyelenggaraan Gelar Potensi Daerah	k			
				Orientasi Program unggulan untuk mengatasi masalah kesehatan	k			
				Jumlah video kegiatan promosi kesehatan	judul			
		1.2.2.2.0 2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					
				Jumlah item BMHP pelayanan kesehatan tradisional	item	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	
				Puskesmas melakukan pelayanan kestrad 50%	puskesmas			
		1.2.2.2.0 2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Perencanaan program Surveilans	dok	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	
				Koordinasi Lintas Program/ Lintas Sektor Program Surveilans/ COVID-19	k			
				Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis program surveilans/ COVID-19	keg			
				Penyediaan Logistik Program Surveilans	k			
				Monitoring dan Evaluasi Program surveilans	k			
				Penyediaan APD dan Hand Sanitizer	Paket			
				Surveilans Epidemiologi penyakit Potensial KLB/ COVID-19	bln			
				Rujukan, Pengiriman sampel/ specimen PD3I/keracunan pangan	minggu			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Peningkatan Kapasitas tenaga surveilans/pengolah data, Tracer dan tenaga lainnya	orang			
				Biaya Komunikasi Pelacakan COVID-19	orang			
				Penyusunan dan Penyediaan media KIE	k			
				Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-raya	k			
		1.2.2.2.0 2.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
				Forum Komunikasi Lintas Sektor PTM dan Keswa	orang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	
				Deteksi Dini Kesehatan Jiwa	puskesmas			
				Desa Siaga Sehat Jiwa	ds			
				Bimtek/Sosialisasi Desa Siaga Sehat Jiwa	ds			
				Kader terlatih tentang Desa Siaga Sehat Jiwa	orang			
		1.2.2.2.0 2.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
				Pembinaan TPKJM	kec	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	
				Pelatihan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa bagi petugas Puskesmas	puskesmas			
				Koordinasi Lintas sektor / Program Dengan Kader P2PTM dan Kesehatan Jiwa	k			
				Bimbingan Teknis Bagi Pengurus Desa Siaga Sehat Jiwa Dalam Rangka Deteksi Dini Kesehatan Jiwa	k			
		1.2.2.2.0 2.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Event/kegiatan yang memerlukan pendampingan tenaga kesehatan	keg	-	-	
				Sanggar inklusi melakukan pelayanan kesehatan fisioterapi/rehabilitasi	sanggar			
				Operasional Kader sanggar Inklusi	kader			
				Koordinasi LP/LS Program kesehatan haji	k			
				Pendampingan rujukan	k			
				Sosialisasi persiapan keberangkatan Calon Jemaah haji	k			
				Pendampingan Calon Jemaah haji ke embarkasi/haji dari debarkasi	kel			
				Pengendalian faktor risiko penyakit (K3JH)	k			
				Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan haji	k			
				Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan haji	k			
		1.2.2.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
				Pemantauan Jentik Berkala (PJB)	ds	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	
				Penguatan diagnosa dan tatalaksana kasus DBD	k			
				Penguatan kegiatan PSN (larvasida, G1R1 Jumantik, Pengelolaan TTG	ds			
				Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Paket			
				Penyediaan Insektisida dan larvasida	Paket			
				Koordinasi lintas program pengendalian penyakit menular	k			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Koordinasi lintas sektor pengendalian penyakit menular tingkat kabupaten	k			
				Desa/ Kelurahan yang melaksanakan layanan Posbindu PTM	ds			
				Penyusunan dan Penyediaan media KIE	k			
				Koordinasi LP/LS Program kesehatan haji	k			
				Logistik program Surveilans dan Imunisasi	Paket			
				Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis program surveilans dan Imunisasi	k			
				Monitoring dan Evaluasi Program surveilans dan Imunisasi	k			
				Konsultasi/ Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-raja Program Surveilans dan	k			
				Bimtek dan Monev Program P2PTM dan Keswa Ke Puskesmas	OH			
				Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi Program P2PTM dan Keswa	k			
				Koordinasi Ke Soloraya Program P2PTM dan keswa	k			
				Pertemuan Koordinasi Program P2PTM/ Keswa/ Indera	k			
				Penguatan, pembinaan, supervisi, bintek, monitoring dan evaluasi jejaring fasyankes	Faskes			
				Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik P2PM	k			
				Penguatan program P2ISPA	k			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Cetak Media KIE Program P2PTM & Keswa	lbr			
				Konsultasi/ Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-roya	k			
				Konsultasi & Koordinasi ke provinsi program P2PTM dan Keswa	OH			
				Koordinasi ke Soloraya program P2PTM & Keswa	k			
				Koordinasi/konsultasi/pertemuan/pengambilan logistik program P2PM	k			
				Koordinasi lintas Program dalam rangka Validasi data program P2PTM,Keswa & Indra	k			
				Koordinasi LP/LS Program Surveilans dan Imunisasi	k			
				Pertemuan Desinfo/ Sosialisasi LS/Toga/Toma tentang Vaksinasi COVID-19	k			
		1.2.2.2.0 2.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					
				Penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang di daftarkan menjadi peserta JKN	OB	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	
				Peserta PBPB dan BP Kelas III yang mendapat bantuan iuran premi	OB			
				Pasien yang menerima bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi kasus tertentu	O/Th			
		1.2.2.2.0 2.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah					
				Pelatihan Petugas Deteksi Napza Dengan metode ASSIST	puskesmas	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan sekolah	Orang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Generasi Muda Bebas Napza dengan Skrining menggunakan Methode ASSIST	lok			
		1.2.2.2.0 2.29	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat					
				Monitoring dan evaluasi program Kabupaten/ Kota Sehat	k	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Dokumen	
				Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina, Tim Teknis dan Forum Kabupaten/ Kota Sehat	k			
				Advokasi dan Koordinasi Pokja Desa Sehat	des/ kel			
		1.2.2.2.0 2.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
				Jumlah item Pengadaan layanan telemedicine	item	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan Telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Unit	
				Jumlah layanan telemedicine DKK	Paket			
		1.2.2.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas					
				Operasional Pelayanan Puskesmas berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku	%	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Dokumen	
		1.2.2.2.0 2.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
				Pemeriksaan klinis	sample	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	
				Pemeriksaan Sampel Makanan Minuman	sample			
				Pemeriksaan Sampel Air	sample			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Pemeriksaan Sampel Air Bersih dan Fasilitas Sanitasi Rumah Sakit dan TTU Lainnya	sample			
				Jumlah SDM pelayanan umum yang disediakan	OB			
				Jumlah SDM Ahli (Analis Kesehatan) yang disediakan	orang			
				Terpenuhinya Biaya Operasional sebagai pendukung kegiatan	keg			
				Terpenuhinya Biaya Operasional sebagai pendukung kegiatan	keg			
		1.2.2.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					
				Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Rumah Sakit	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	
				Puskesmas terakreditasi	puskesmas			
				FKTP (Klinik Pratama) terakreditasi	Faskes			
				FKTU (Klinik Utama) terakreditasi	Klinik Utama			
				Labkesda terakreditasi	Labkesda			
				Laboratorium swasta sesuai standar/ memenuhi syarat Faskes	Laboratorium Swasta			
				Faskes mendapatkan pembinaan dalam rangka akreditasi	Faskes			
				Penilaian akreditasi rumah sakit Paripurna	%			
		1.2.2.2.0 2.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					
				Penguatan jejaring dengan fasyankes	Faskes	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	
				Penyelidikan Epidemiologi penyakit menular potensial KLB	kasus			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Koordinasi terpadu keluar wilayah untuk kewaspadaan dini dan respon penyakit menular potensial KLB	k			
				Penguatan diagnosis dan tatalaksana kasus penyakit potensial KLB	Faskes			
				Penguatan pelaporan pengendalian penyakit Hepatitis, Infeksi Saluran Pencernaan (P2HISP)	k			
				Penyediaan media KIE KLB	bh			
				Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik kasus penyakit menular potensial KLB	k			
				Jumlah item Pengadaan Alat pelindung Diri (APD) untuk nakes RSUD Sukoharjo	item			
				Penguatan program P2ISPA	k			
		1.2.2.2.0 2.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					
				Tersedianya Ambulance	unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119), Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	
				RS yang terintegrasi dengan sistem aplikasi PSC 119	Rumah Sakit			
		1.2.2.2.0 2.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
				-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
		1.2.2.2.0 2.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
				-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	
		1.2.2.2.0 2.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	
		1.2.2.2. 03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					
				Prosentase ketercapaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (RSUD)	%			
				Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	%			
		1.2.2.2.0 3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					
				Jumlah item Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Rekam Medis elektronik untuk mendukung pelayanan kesehatan	item	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	
		1.2.2.2.0 3.3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet					
				Jumlah item Pengadaan Alat /Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet untuk mendukung pelayanan kesehatan	item	-	-	
		1.2.2.2. 04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Persentase fasilitas kesehatan yang diterbitkan ijin	%			
		1.2.2.2.0 4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D					
				Pendampingan dan verifikasi obyek perijinan	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	
		1.2.2.2.0 4.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
				Faskes yang menerapkan SISROUTE	FKTP	-	-	
		1.2.2.2.0 4.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					
				FKTP yang memenuhi standar pelayanan 60%	puskesmas	-	-	
				Puskesmas dengan kinerja pelayanan 100%	puskesmas			
				Jumlah Puskesmas yang melakukan survey kepuasan masyarakat	k			
				Koordinasi petugas pengelola obat puskesmas	sarana			
				Pembinaan dan bimbingan ke sarana pelayanan kefarmasian (Puskesmas. rumah sakit. klinik)	k			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Konsultasi dan koordinasi tentang Kefarmasian. Alkes dan Perbekes	k			
				Konsultasi dan koordinasi tentang Kefarmasian. Alkes dan Perbekes	k			
		1.2.2.2.0 4.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					
				Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi standar 80%	Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	
		1.2.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
				Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)	%	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)	%	
				Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	%	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	%	
		1.2.3.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota					
				Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Sukoharjo	%	Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Sukoharjo	%	
		1.2.3.2.0 1.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
			<i>Tenaga Kesehatan</i>					
				<i>Pembinaan, Pengawasan, koordinasi dan konsultasi Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>k</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	<i>Dokumen</i>	
		1.2.3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					
				Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM sesuai kebutuhan	%	Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM sesuai kebutuhan	%	
				Persentase Ketercapaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP di wilayah Kabupaten/ Kota (RSUD)	%	Persentase Ketercapaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP di wilayah Kabupaten/ Kota (RSUD)	%	
		1.2.3.2.02.1	<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>					
				<i>Pemutakhiran data PPSDMK</i>	<i>dok</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>Dokumen</i>	
				<i>Penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK</i>	<i>dok</i>			
				<i>Penyusunan Perencanaan kebutuhan perencanaan pendidikan dan pelatihan</i>	<i>k</i>			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
		1.2.3.2.0 2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar					
				Koordinasi Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	k	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Layanan Kesehatan	Orang	
				Jumlah nakes non ASN penerima Insentif penanganan covid	OB			
		1.2.3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Persentase Ketercapaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	%	Persentase Ketercapaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	%	
				Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	
		1.2.3.2.0 3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Jumlah SDM yang mengikuti Capacity Building untuk mendukung pelayanan kesehatan	orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	
				Capacity Building	orang			
				Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	kategori			
				Studi banding	k			
				Seminar / Lokakarya Bidang Kesehatan	orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Bimtek kepada pengelola fasilitas kefarmasian	orang			
				Pelatihan Teknis dan Fungsional Tenaga Kesehatan	orang			
		1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	
		1.2.4.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
				Sarana kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT))memiliki izin operasional yang masih aktif.	%	Sarana kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT))memiliki izin operasional yang masih aktif.	%	
		1.2.4.2.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
				Terlaksananya binwas ke sarana Apotek dan toko obat	sarana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
		1.2.4.2.0 1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
				Pembinaan dan pengawasan ke sarana Apotek dan toko obat	sarana	-	-	
				Pendampingan dan Verifikasi Izin apotek, Toko obat, TKA, Optikal dan UMOT	sarana			
		1.2.4.2.0 1.3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
				Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi dan Solo raya	k	-	-	
				Koordinasi program ke puskesmas	puskesmas			
				Pembahasan hasil visitasi	k			
				Pembinaan pemilik sarana izin apotek, toko obat, alkes, dan UMOT	k			
				Sosialisasi peraturan terkait izin apotek, toko obat, toko alkes, optik dan UMOT	sarana			
		1.2.4.2. 03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Indikator Baru	Satuan	Unit Kerja Perangkat Daerah
				Visitasi lokasi pemohon Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%	Prosentase Sarana IRTP yang penerbitan SPPIRT melalui OSS-RBA sudah sesuai dengan ketentuan	%	

		1.2.4.2.0 3.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
				Persentase jumlah sarana IRTP berSPPIRT yang dibinwas	sarana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	
				Penerbitan SPPIRT bagi IRTP baru	sarana			
				Pendampingan dan Verifikasi penerbitan Sertifikat Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Kelas 1 dan PKRT kelas 1	sarana			
				Pendampingan dan Verifikasi penerbitan sertifikat PIRT	sarana			
		1.2.4.2. 04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
				Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene	%	Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene	%	

		1.2.4.2.0 4.1	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>					
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

				<i>Penerbitan SPPIRT bagi IRTP baru</i>	<i>sarana</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	<i>Dokumen</i>	
				<i>Pendampingan dan Verifikasi penerbitan sertifikat Laik Hygiene sanitasi, tempat Pengelolaan Makanan jasa boga, Rumah Makan/restoran dan Dopot Air Minum (DAM)</i>	<i>%</i>			
				<i>Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene</i>	<i>k</i>			
				<i>Pertemuan Koordinasi Pengawasan Jasa boga</i>	<i>lok</i>			
				<i>Pembinaan dan Pengawasan Jasa boga</i>	<i>orang</i>			
				<i>Fasilitasi Kantin Sekolah Dasar</i>	<i>orang</i>			
				<i>Kursus Higiene Sanitasi Pangan Pada Penjamah Makanan</i>	<i>k</i>			
				<i>Advokasi dan Sosialisasi Pada Tim Pembina Jasa Boga</i>	<i>orang</i>			
		1.2.4.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					
				Stikerisasi laik sehat pada Pedagang kaki lima	orang			
		1.2.4.2.05.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					

				<i>Puskesmas melaksanakan program stikerisasi Makanan jajanan dan sentra makanan jajanan</i>	<i>puskesmas</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>	<i>Dokumen</i>	
		1.2.4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					
				Persentase jumlah sarana IRTP berSPPIRT yang dibinwas	%	Persentase jumlah sarana IRTP berSPPIRT yang dibinwas	%	
		1.2.4.2.06.1	<i>Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</i>					
				<i>Pengujian sampel pangan (makanan dan minuman) yang dicurigai mengandung bahan berbahaya</i>	<i>sample</i>	<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>	<i>unit</i>	
				<i>Pengawasan peredaran pangan dan obat di sarana produksi, distributor, outlet, pasar/ swalayan/ minimarket</i>	<i>sarana</i>			
				<i>Sarana Binwas ke IRTP</i>	<i>sarana</i>			
				<i>Pengujian sampel pangan IRTP</i>	<i>sample</i>			

		1.2.4.2.0 6.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga					
				Koodinasi dan konsultasi ke Solo Raya dan Provinsi	k	-	-	
		1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Desa siaga aktif mandiri	%	Persentase Desa siaga aktif mandiri	%	
		1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
				Persentase kecamatan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	Persentase kecamatan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	
		1.2.5.2.0 1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
				Advokasi Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	k	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	
				Koordinasi Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten	k			

				<i>Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten</i>	<i>k</i>			
				<i>Penggerakan GERMAS</i>	<i>orang</i>			
				<i>Kampanye Lokal Dalam Mendukung Pelaksanaan GERMAS</i>	<i>orang</i>			
				<i>Lokakarya Forum Kesehatan Desa (FKD)</i>	<i>orang</i>			
				<i>Pemberdayaan Kader Kesehatan</i>	<i>orang</i>			
				<i>Pengiriman peserta Pertihusada Tingkat Provinsi</i>	<i>Paket</i>			
				<i>KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat</i>	<i>orang</i>			
				<i>Penyebarluasan Informasi Kesehatan</i>	<i>M</i>			
		1.2.5.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
				Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	%	Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	%	
		1.2.5.2.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					
				<i>Penyuluhan Kelompok</i>	<i>orang</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	<i>Dokumen</i>	
				<i>Orientasi kader Dasiat / kader Posyandu dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang program unggulan</i>	<i>orang</i>			
				<i>Penyediaan Media sosial dalam rangka pelaksanaan GERMAS</i>	<i>orang</i>			

		1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Persentase kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 %	%	Persentase kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 %	%	
				Persentase Posyandu Aktif Mandiri	%	Persentase Posyandu Aktif Mandiri	%	
		1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
				Evaluasi Pelaksana Terbaik Desa Siaga Ber - PHBS	kec	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	
				Konsultasi dan koordinasi program promkes dan pemberdayaan masyarakat	k			
				Bimtek UKBM	lap			
				Pembinaan Masyarakat dalam rangka Evaluasi Program Kesehatan	lok			
				Operasional Kader Posyandu	kader			
				Pemantauan Operasional Posyandu	k			
				Penggerakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	orang			
		1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik					

				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	
		0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
				Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD)	%	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD)	%	
		0.0.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	
		0.0.1.2.02.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>					
				<i>Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan</i>	<i>orang</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Orang</i>	
		0.0.1.2.02.3	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>					
				<i>Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan</i>	<i>dok</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Dokumen</i>	
		0.0.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	
		0.0.1.2.05.2	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>					
				<i>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan</i>	<i>stel</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Paket</i>	

		0.0.1.2.0 5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
				Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 jpl per tahun per orang	orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	
				Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	pegawai			
		0.0.1.2.0 5.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
				Jumlah Sarpras Disiplin pegawai yang diadakan	unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	
		0.0.1.2.0 5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
				Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun	lap	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	
		0.0.1.2.0 5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
				Jumlah ASN yang memanfaatkan Sistem Informasi Kepegawaian	pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	
		0.0.1.2.0 5.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
				Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	dok	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	
		0.0.1.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					

				<i>Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>pegawai</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Orang</i>	
		0.0.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	
		0.0.1.2.07.1	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					
				<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan</i>	<i>unit</i>	<i>Jumlah Unit Peningkatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	<i>Unit</i>	
		0.0.1.2.07.2	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>					
				<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan</i>	<i>unit</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>Unit</i>	
		0.0.1.2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>					
				<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan</i>	<i>unit</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Unit</i>	
		0.0.1.2.07.5	<i>Pengadaan Mebel</i>					
				<i>Jumlah Mebel yang diadakan</i>	<i>unit</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang diadakan</i>	<i>Unit</i>	
		0.0.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					
				Persentase ketercapaian pelayanan BLUD	%	Persentase ketercapaian pelayanan BLUD	%	
		0.0.1.2.10.1	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>					

				<i>Pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang medik dan non medik serta pelayanan administrasi pendukung pelayanan kesehatan</i>	<i>%</i>	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	<i>Unit Kerja</i>	
		0.0.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>%</i>	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>%</i>	
		0.0.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	<i>dok</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Dokumen</i>	
		0.0.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	<i>dok</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Dokumen</i>	
		0.0.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	<i>dok</i>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Dokumen</i>	
		0.0.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					

				<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun</i>	<i>dok</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>Dokumen</i>	
		0.0.1.2.0 1.5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>					
				<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun</i>	<i>dok</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>Dokumen</i>	
		0.0.1.2.0 1.7	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
				<i>Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>	<i>dok</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan</i>	
		0.0.1.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
				Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	
		0.0.1.2.0 3.5	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>					
				<i>Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun</i>	<i>dok</i>	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Laporan</i>	
		0.0.1.2.0 3.6	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>					
				<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun</i>	<i>Lap</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Laporan</i>	
		0.0.1.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	

		0.0.1.2.0 6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Jumlah komponen listrik yang disediakan	bh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	
		0.0.1.2.0 6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	bh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	
		0.0.1.2.0 6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
				Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	bh	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	
		0.0.1.2.0 6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Jumlah logistik kantor yang disediakan	jns	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	
		0.0.1.2.0 6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
				Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	jns	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	
		0.0.1.2.0 6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
				Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	bh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	
		0.0.1.2.0 6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
				Jumlah Tamu yang difasilitasi	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	
		0.0.1.2.0 6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

				<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>k</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Laporan</i>	
		0.0.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	
		0.0.1.2.08.1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>					
				<i>Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar</i>	<i>surat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Laporan</i>	
		0.0.1.2.08.2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>					
				<i>Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan</i>	<i>rekening</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	
		0.0.1.2.08.4	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>					
				<i>Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan</i>	<i>orang</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	
		0.0.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	

		0.0.1.2.0 9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/ difasilitasi	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	
		0.0.1.2.0 9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara/ difasilitasi	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	
		0.0.1.2.0 9.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					
				Jumlah Alat Besar yang dipelihara/ difasilitasi	unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	
		0.0.1.2.0 9.5	Pemeliharaan Mebel					
				Jumlah mebeleur yang dipelihara	unit	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	
		0.0.1.2.0 9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
				Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
		0.0.1.2.0 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

				<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</i>	<i>unit</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	
		0.0.1.2.0 9.10	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>					
				<i>Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</i>	<i>unit</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	

Keterangan :	
	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Kegiatan

Tabel VI.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang meningkat		1		Angka Harapan Hidup (AHH)	T	77,65		77,7		Angka Harapan Hidup (AHH)	T	77,75	77,8	77,85	77,9	77,9	77,9					
	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	1.1		Angka Kematian Ibu (AKI).	%	97		96		Angka Kematian Ibu (AKI).	%	95	94	93	92	92	92					
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	%	7,4		7,3		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	%	7,2	7,1	7	6,9	6,9	6,9					
				Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	%	8,5		8,5		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	%	8,4	8,3	8,2	8,1	8,1	8,1					
				Persentase Stunting	%	7,75		7,7		Persentase Stunting	%	7,65	7,6	7,55	7,5	7,5	7,5					
				Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	95		95		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	95	95	95	95	95	95					
				Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	62		64		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	66	69	72	75	75	75					
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	21		27		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	36	45	54	65	65	65					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				84.334.611,94		327.813.164,23				369.110.204,31		342.949.982,57		394.038.587,51		317.395.910,68		1.835.642.461,24	
				Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit menular	%	100	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit menular	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	100	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	%	100	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi	%	18	84.334.611,94	22	327.813.164,23	Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi	%	22	369.110.204,31	30	342.949.982,57	40	394.038.587,51	50	317.395.910,68	50	1.835.642.461,24	
				Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	%	34	84.334.611,94	43	327.813.164,23	Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	%	43	369.110.204,31	50	342.949.982,57	65	394.038.587,51	80	317.395.910,68	80	1.835.642.461,24	
				Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	%	20	84.334.611,94	40	327.813.164,23	Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	%	40	369.110.204,31	60	342.949.982,57	80	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	%	50	84.334.611,94	49	327.813.164,23	Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	%	50	369.110.204,31	52	342.949.982,57	53	394.038.587,51	53	317.395.910,68	53	1.835.642.461,24	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Persentase Capaian UHC	%	81	84.334.611,94	85	327.813.164,23	Persentase Capaian UHC	%	90	369.110.204,31	95	342.949.982,57	95	394.038.587,51	95	317.395.910,68	95	1.835.642.461,24	
				Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	%	100	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	%	100	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	%	100	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	%	100	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase Puskesmas dengan cakupan kesehatan pada kesehatan reprodksi	%	100	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Persentase Puskesmas dengan cakupan kesehatan pada kesehatan reprodksi	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Persentase Puskesmas dengan cakupan kesehatan pada lansia	%	100	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Persentase Puskesmas dengan cakupan kesehatan pada lansia	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	%	58	84.334.611,94	67	327.813.164,23	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	%	78	369.110.204,31	89	342.949.982,57	94	394.038.587,51	97	317.395.910,68	97	1.835.642.461,24	
				Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	%	42	84.334.611,94	58	327.813.164,23	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	%	67	369.110.204,31	75	342.949.982,57	92	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	%	92	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	
				Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	80	84.334.611,94	82	327.813.164,23	Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	84	369.110.204,31	85	342.949.982,57	86	394.038.587,51	87	317.395.910,68	87	1.835.642.461,24	RSUD
				NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	%	<46‰	84.334.611,94	<45‰	327.813.164,23	NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	%	<40‰	369.110.204,31	<35‰	342.949.982,57	<30‰	394.038.587,51	<25‰	317.395.910,68	25	1.835.642.461,24	RSUD
				Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100	84.334.611,94	100	327.813.164,23	Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100	369.110.204,31	100	342.949.982,57	100	394.038.587,51	100	317.395.910,68	100	1.835.642.461,24	RSUD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				4.147.375		257.357.113,00				299.352.165,00		267.505.600,00		321.310.850,00		242.537.130,00		1.392.210.233,00	
				Persentase tingkat ketersediaan obat dan bmhp	%	100	4.147.375	100	257.357.113,00	Persentase tingkat ketersediaan obat dan bmhp	%	100	299.352.165,00	100	267.505.600,00	100	321.310.850,00	100	242.537.130,00	100	1.392.210.233,00	
				Persentase capaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP kewenangan daerah kabupaten kota (RSUD)	%	0	4.147.375	100	257.357.113,00	Persentase capaian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP kewenangan daerah kabupaten kota (RSUD)	%	100	299.352.165,00	100	267.505.600,00	100	321.310.850,00	100	242.537.130,00	100	1.392.210.233,00	RSUD
		1.2.2.2.01.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		0,00	
				Tersusunnya DED	dok	0	0	0	0	Jumlah Rumah Sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Unit	0	150.000	1	26.000.000	0	80.000.000	0	0	1	106.150.000,00	
				Pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan	Paket	0	0	0	0												0,00	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung Rumah sakit Tipe D di Kecamatan	Paket	0	0	0	0												0,00	
		1.2.2.2.01.2	Pembangunan Puskesmas																		0,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pembangunan Gedung Puskesmas terlaksana	puskesmas	0	0	1	4.000.000,00	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	8.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	5	24.000.000,00	
		1.2.2.2.01.5	Pengembangan Rumah Sakit																		0,00	
				Jumlah gedung IGD terpadu yang dibangun	unit	0	0	0	0	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1: 1000	unit	1	62.230.000	0	0	0	0	0	0	1	62.230.000,00	
		1.2.2.2.01.6	Pengembangan Puskesmas																		0,00	
						0	0	1	3.000.000,00	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	3.000,000	1	1.000,000	1	1.000,000	1	1.000,000	5	#VALUE!	
		1.2.2.2.01.7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		0,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Produk simplisia/ minuman jamu yang dikembangkan produksinya di P4TO	produk	8	0	10	114.165,00	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	unit	1	114.165	1	125.000	1	125.000	1	140.000	1	618.330,00	
		1.2.2.2.01.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		0,00	
				Jumlah ruangan yang direnovasi untuk mencapai standarisasi kelas program JKN	ruang	3	5.509.900	16	1.000.000,00	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Rumah Sakit	unit	3	3.000.000	0	0	0	0	0	0	6	9.509.900,00	
		1.2.2.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		0,00	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	0	0	1	1.000.000,00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	1.000.000	6	1.200.000	6	1.200.000	6	1.200.000	20	#VALUE!	
		1.2.2.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		0,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pemeliharaan peralatan dan gedung P4TO	Paket	0	0	0	60.000,00	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	unit	2	60.000	2	70.000	2	70.000	2	80.000	2	340.000,00	
		1.2.2.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		0,00	
				Pembuatan sarana fasilitas pelayanan kesehatan tradisional	Paket	0	0	1	790.000,00	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	790.000,00	
		1.2.2.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		0,00	
				Pembangunan masjid di lingkungan RSUD Sukoharjo	Paket	0	298.915	1	5.198.000,00	Jumlah prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit	0	198.000	0	0	0	0	0	0	1	5.396.000,00	
				Antropometri Set	Paket	30	298.915	12	5.198.000,00												5.496.915,00	
		1.2.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		0,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pengadaan alat kesehatan /Alat Penunjang Medik di Labkesda	item	0	12.733.052	6	24.312.340,00	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit	61	5.000.000	63	14.316.000	60	14.031.000	60	13.147.500	259	83.539.892,00	
				Jumlah alat kesehatan /Alat Penunjang Medik yang diadakan di RSUD Sukoharjo	unit	22	12.733.052	9	24.312.340,00												37.045.392,00	
		1.2.2.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		0,00	
				Jumlah alat kalibrasi yang diadakan	unit	0	99.100	3	930.000,00	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan an alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ Regional Maintenance Center	unit	1	260.000	1	270.000	1	270.000	1	280.000	1	2.109.100,00	
				Alat kesehatan di puskesmas terkalibrasi	unit	304	99.100	0	930.000,00												1.029.100,00	
				Kalibrasi alat kesehatan di Gudang Farmasi	item	0	99.100	9	930.000,00												1.029.100,00	
		1.2.2.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin																		0,00	
				Pengadaan obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan	item	147	2.464.705,31	30	3.500.000,00	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Paket	50	3.600.000	0	0	0	0	0	0	50	9.564.705,31	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Review Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 2021 dan Tersusunnya RKO 2022	dok	2	2.464.705,31	2	3.500.000,00												9.564.705,31	
				Jumlah item Pengadaan obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan	item	0	2.464.705,31	116	3.500.000,00												9.564.705,31	
		1.2.2.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai																		0,00	
				Jumlah item Pengadaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan kesehatan	item	0	1.240.902,69	40	2.500.000,00	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	Paket	62	2.500.000	0	0	0	0	0	0	62	6.240.902,69	
				Pengadaan BMHP untuk puskesmas	item	30	1.240.902,69	30	2.500.000,00												6.240.902,69	
				Pengadaan BMHP untuk Labkes	item	100	1.240.902,69	125	2.500.000,00												6.240.902,69	
		1.2.2.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		0,00	
				Panjang kabel listrik yang diganti dari genset ke panel yang sesuai standard untuk menunjang pelayanan kesehatan	m	500	300.000	1000	847.670,00	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	unit	1	200.000	0	0	0	0	0	0	1	1.347.670	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.2.2.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		0,00	
				Jumlah pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik besar yang sesuai standard di RSUD Sukoharjo	unit	0	5.658	3	214.000.000,00	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit	310	214.000.000	509	216.000.000	524	216.000.000	534	218.000.000	1915	1.078.005.658,00	
				Kalibrasi alat kesehatan di Gudang Farmasi	item	9	5.658	23	214.000.000,00												1.078.005.658,00	
				Pemeliharaan dan Kalibrasi alat kesehatan di Labkes	unit	10	5.658	12	214.000.000,00												1.078.005.658,00	
		1.2.2.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya																		0,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Terlaksananya pendistribusian obat, bmhp, vaksin, reagen ke Puskesmas	k	144	38.094	144	104.938,00	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Paket	144	40.000	0	0	0	0	0	0	144	183.032	
		1.2.2.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
				-	-	-	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	-	-	130	5.200.000	130	5.300.000	130	5.400.000	390	15.900.000	
		1.2.2.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket			144	50.000	144	50.000	144	50.000	144	150.000	
		1.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	0,00		
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer terakreditasi	%	18	62.682.810,99	22	68.908.641,23	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer terakreditasi	%	22	68.511.762	30	74.615.893	40	71.946.939	50	74.078.312	50	420.744.358,54	
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan terakreditasi	%	34	62.682.810,99	43	68.908.641,23	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan terakreditasi	%	43	68.511.762	50	74.615.893	65	71.946.939	80	74.078.312	80	420.744.358,54	
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya terakreditasi	%	20	62.682.810,99	40	68.908.641,23	Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya terakreditasi	%	40	68.511.762	60	74.615.893	80	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Persentase Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	%	0	62.682.810,99	20	68.908.641,23	Persentase Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	%	20	68.511.762	30	74.615.893	40	71.946.939	40	74.078.312	40	420.744.358,54	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ Atau potensi Bencana	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ Atau potensi Bencana	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Capaian Universal Health Coverage (UCI Desa/ Kelurahan)	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Capaian Universal Health Coverage (UCI Desa/ Kelurahan)	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Persentase Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu	%	92	62.682.810,99	90	68.908.641,23	Persentase Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu	%	90	68.511.762	90	74.615.893	90	71.946.939	90	74.078.312	90	420.744.358,54	
				Persentase Pasien HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan standar	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Persentase Pasien HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan standar	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Desa/ Kalurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Desa/ Kalurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Imunisasi lanjutan anak SD sederajat	%	96	62.682.810,99	98	68.908.641,23	Imunisasi lanjutan anak SD sederajat	%	98	68.511.762	98	74.615.893	98	71.946.939	98	74.078.312	98	420.744.358,54	
				Imunisasi dasar lengkap	%	96	62.682.810,99	95	68.908.641,23	Imunisasi dasar lengkap	%	95	68.511.762	95	74.615.893	95	71.946.939	95	74.078.312	95	420.744.358,54	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Pelayanan Kesehatan Penderita DM	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar selama periode kehamilan (K4,K6)	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar selama periode kehamilan (K4,K6)	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Persentase kunjungan Bayi baru lahir	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Persentase kunjungan Bayi baru lahir	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Persentase pelayanan anak balita	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Persentase pelayanan anak balita	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk)	%	7	62.682.810,99	7,5	68.908.641,23	Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk)	%	7,3	68.511.762	7	74.615.893	7	71.946.939	7	74.078.312	7	420.744.358,54	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	%	3,03	62.682.810,99	14,5	68.908.641,23	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	%	13	68.511.762	10	74.615.893	10	71.946.939	10	74.078.312	10	420.744.358,54	
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans gizi	%	51	62.682.810,99	90	68.908.641,23	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans gizi	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
				Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita	%	8,1	62.682.810,99	20	68.908.641,23	Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita	%	30	68.511.762	45	74.615.893	60	71.946.939	60	74.078.312	60	420.744.358,54	
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	75,3	62.682.810,99	45	68.908.641,23	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	80	68.511.762	81	74.615.893	82	71.946.939	83	74.078.312	83	420.744.358,54	
				Prosentase ketercapaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	%	0	62.682.810,99	100	68.908.641,23	Prosentase ketercapaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	%	100	68.511.762	100	74.615.893	100	71.946.939	100	74.078.312	100	420.744.358,54	
		1.2.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
				Pembahasan Deteksi Penyakit Penyerta pada Ibu Hamil bagi Petugas	O/Th	55	31.930	60	87.247,20	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	11713	43.260	12298	51.912	12883	62.294	13468	74.753	13468	351.396,88	
				Removal Program Kesga Gizi	k	2	31.930	2	87.247,20													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penguatan Pengisian Buku KIA bagi Petugas Kesehatan	O/Th	50	31.930	45	87.247,20													
				Orientasi Petugas dalam melaksanakan antenatal care dan post natal care	O/Th	0	31.930	45	87.247,20													
				Penguatan MPDN(Maternal Perinatal Death Notification) bagi petugas kesehatan	O/Th	0	31.930	45	87.247,20													
				Penyusunan Regulasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	dok	0	31.930	1	87.247,20													
				Sosialisasi Perbub Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	orang	0	31.930	20	87.247,20													
				Peningkatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan kelas ibu hamil dan ibu balita	orang	0	31.930	50	87.247,20													
				Penguatan Rujukan Terpadu Maternal Neonatal bagi Petugas	orang	0	31.930	53	87.247,20													
				Orientasi Simatneo ,MPDN dan e-kohort tingkat kabupaten	k	0	31.930	1	87.247,20													
				Orientasi Kelas Ibu (Ibu Hamil dan Ibu Balita) bagi tenaga kesehatan di Puskesmas	k	0	31.930	1	87.247,20													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pembentukan dan Koordinasi Tim AMPSR Kabupaten	k	0	31.930	2	87.247,20													
		1.2.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
				Pelaksanaan Penyelidikan Fasilitas KIA bagi Puskesmas, TMB, dan klinik	puskesmas	12	1.152.721,95	12	1.394.482,34	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	11183	1.664.379	11.742	1.997.255	12301	2.396.705	12860	2.876.047	12860	11.481.589,70	
				Transport pengiriman sampel	kasus	0	1.152.721,95	100	1.394.482,34													
				Peningkatan Kualitas KN/KF bagi Tenaga Kesehatan	orang	78	1.152.721,95	53	1.394.482,34													
				Jampersal	kasus	78	1.152.721,95	78	1.394.482,34													
				Koordinasi LS/LP dalam rangka AKI/ AKB	k	0	1.152.721,95	1	1.394.482,34													
				Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tim Kesga Gizi dalam Akselerasi Penurunan AKI,AKB dan Stunting	k	0	1.152.721,95	1	1.394.482,34													
		1.2.2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
				Kajian AMP oleh Tim AMP Kabupaten	k	1	39.238	2	52.655,00	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	10650	47.508	11.182,00	57.010	11714	68.412	12246	82.094	12246	346.915,94	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pembelajaran Hasil Rekomendasi AMP	k	1	39.238	2	52.655,00													
				Peningkatan Kapasitas SDM dalam neonatal esensial	k	50	39.238	43	52.655,00													
				Penguatan Pelayanan BBL (Screening hipotiroid)	k	0	39.238	1	52.655,00													
				Pengkajian AMP	k	0	39.238	1	52.655,00													
				Orientasi Skrining Hipotiroid Sindrom (SHK)	k	0	39.238	1	52.655,00													
		1.2.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
				Jumlah Dokumen Perencanaan	dok	1	95,161	1	120.585,00	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	45.880	127.545	45.880	130.906	45.880	134.939	45.880	139.779	45.880	653.848,32	
				Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor Program Imunisasi balita	k	1	95,161	2	120.585,00													
				Monev Program Imunisasi balita	k	1	95,161	2	120.585,00													
				Peningkatan Kapasitas Program Imunisasi balita	orang	0	95,161	72	120.585,00													
				Bimbingan dan Pembinaan Teknis Program Imunisasi balita	k	1	95,161	5	120.585,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penyediaan Vaksin dan Logistik Program Imunisasi, serta pendistribusian ke Fasyankes	bln	0	95,161	12	120.585,00													
				Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-raya	k	0	95,161	3	120.585,00													
				Penyusunan dan Penyediaan media KIE	k	0	95,161	1	120.585,00													
				Koordinasi Yankes Anak Balita dalam SDIDTK	k	1	95,161	1	120.585,00													
				Penguatan Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah	k	0	95,161	1	120.585,00													
				Monev Pemanfaatan Buku KIA di Puskesmas	puskesmas	0	95,161	12	120.585,00													
		1.2.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
				Perencanaan BIAS tingkat Kabupaten	dok	1	4.775	1	137.810	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	110808	142.382	110808	147.868	110808	154.452	110808	162.353	110808	749.639,98	
				Monitoring dan Evaluasi BIAS	k	1	4.775	2	137.810													
				Bimbingan dan Pembinaan Teknis BIAS	k	1	4.775	2	137.810													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Peringkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pelaksanaan BIAS	sekolah	560	4.775	560	137.810													
				Penyediaan Vaksin dan Logistik Program Imunisasi Anak Sekolah, serta pendistribusian ke Fasyankes	k	0	4.775	2	137.810													
				Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten/kabupaten Solo-raya	k	0	4.775	3	137.810													
				Penguatan Kabupaten dalam membina posyandu remaja	k	0	4.775	1	137.810													
				Penyusunan dan Penyediaan media KIE	k	0	4.775	1	137.810													
				Koordinasi pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri	k	0	4.775	1	137.810													
				Koordinasi pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	k	0	4.775	1	137.810													
		1.2.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Penguatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Bagi Tenaga Kesehatan	k	0	91.396,80	1	220.468	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	595608,16	642.664	625389	771.196	656658	925.436	689491	1.110.523	576629	3.761.683,00	
				Pertemuan Koordinasi LS/LP dalam Penguatan Implementasi Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil	k	0	91.396,80	1	220.468													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pertemuan Koordinasi Provider IVA	k	0	91.396,80	1	220.468													
				Pembinaan Teknis TT WUS	k	0	91.396,80	2	220.468													
				Orientasi Penggunaan panduan Praktis untuk Caregiver/In formal pada perawatan Jangka Panjang bagi Lansia	orang	0	91.396,80	60	220.468													
				Sosialisasi PANDU PTM	puskesmas	12	91.396,80	0	220.468													
				Pelatihan PANDU PTM di Puskesmas	puskesmas	1	91.396,80	0	220.468													
				Integrasi SIMPUS dengan Si PTM dan Pelayanan PANDU PTM	puskesmas	0	91.396,80	0	220.468													
				Pelaksanaan PANDU PTM	puskesmas	5	91.396,80	6	220.468													
				Jumlah Pembentukan Posbindu	pos	156	91.396,80	167	220.468													
				Jumlah Peserta Pelatihan Kader Posbindu	orang	258	91.396,80	313	220.468													
				BMHP Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	stik	14.400	91.396,80	28.800	220.468													
				Jumlah Puskesmas melaksanakan Pembelian kit Posbindu	puskesmas	0	91.396,80	12	220.468													
				Jumlah peserta pelatihan Provider IVA	orang	41	91.396,80	41	220.468													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Bimbingan Teknis Provider IVA oleh dr Spesialis	k	0	91.396,80	1	220.468													
				KIE kepada wanita usia 30-50 tahun beserta pasangannya	k	12	91.396,80	12	220.468													
				Jumlah Puskesmas melaksanakan nakan pengadaan Krio teraphi dan pemeliharaannya	puskesmas	0	91.396,80	0	220.468													
				Jumlah terdeteksi Dini Ca Serviks dan Ca payudara	orang	0	91.396,80	0	220.468													
				Monitoring evaluasi kegiatan IVA	k	2	91.396,80	2	220.468													
				Deteksi dini FR PTM pada usia produktif	orang	0	91.396,80	28800	220.468													
		1.2.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
				Rapat Koordinasi Puskesmas Santun Lansia di DKK	k	1	13.855	1	73.142,80	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	135947	49.353	142744	55.112	149541	62.022	156338	70.315	156338	323.799,99	
				Pembinaan Program Lansia di Puskesmas	puskesmas	12	13.855	12	73.142,80													
				Refreshing Buku Kesehatan Lansia bagi Kader Lansia	kader	64	13.855	96	73.142,80													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Koordinasi hari ulang tahun lansia tingkat Kabupten	k	0	13.855	1	73.142,80													
				Pertemuan Program Kesehatan Lansia	k	0	13.855	1	73.142,80													
				Koordinasi dan konsultasi kegiatan program lansia ke Semarang	k	0	13.855	3	73.142,80													
				Refresing dan Evaluasi peran kader kesehatan lansia	k	0	13.855	1	73.142,80													
				CERDIK dalam Penanggulangan Hipertensi	k	0	13.855	12	73.142,80													
		1.2.2.2.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
				Pengumpulan data Hipertensi dari jejaring	k	0	32.260	0	22.560,00	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	166936,8	27.072	183630	32.486	201994	38.984	222.193	46.780	222193	200.142,50	
				Pemanfaatan data Hipertensi dari PISPK/ Data lainnya	k	1	32.260	0	22.560,00													
				CERDIK dalam Penanggulangan Hipertensi	k	12	32.260	12	22.560,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Dengan Jejaring PTM Puskesmas dalam Rangka CERDIK dalam Penanggulangan Hipertensi	k	0	32.260	2	22.560,00													
		1.2.2.2.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
				Pengumpulan data DM dari jejaring	k	0	34.240	1	19.740,00	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	18.227	23.688	18683	28.426	19150	34.111	19629	40.933	19629	181.137,18	
				CERDIK dalam Penanggulangan DM	k	12	34.240	12	19.740,00													
		1.2.2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat																			
				Rujukan ODGJ	k	24	27.460	36	38.242,00	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Orang	1649	57.470	1814	68.964	1995	82.757	2247	99.309	2247	374.203,11	
				Koordinasi Stake Holder terkait penanganan ODGJ	k	0	27.460	1	38.242,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				KIE terhadap keluarga dan lingkungan terkait penanganan ODGJ	k	0	27.460	12	38.242,00													
				Terbentuknya Rumah Singgah untuk pasien ODGJ	rumah	0	27.460	0	38.242,00													
				Kunjungan Rumah pada pasien ODGJ	k	0	27.460	12	38.242,00													
				Terapi aktifitas Fisik Bagi Penderita ODGJ	puskesmas	4	27.460	12	38.242,00													
				Advokasi dan koordinasi ODGJ tingkat Daerah	k	0	27.460	1	38.242,00													
				OUT Kesehatan Jawa	orang	0	27.460	1	38.242,00													
		1.2.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
				Penguatan investasi kontak TB	kasus	0	75.428	400	97.495,00	Jumlah orang terduga penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	8818	97.495	8818	97.495	8818	97.495	8818	97.495	8818	562.903,00	
				Pengiriman sampel TBC untuk uji silang	k	0	75.428	6	97.495,00													
				Penguatan program P2TB	k	0	75.428	3	97.495,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penguatan, pembinaan, supervisi, bintek, monitoring dan evaluasi jejaring fasyankes	Fas kes	22	75.428	22	97.495,00													
				Penyediaan media KIE program TBC	bh	0	75.428	4	97.495,00													
				Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik P2TBC	k	10	75.428	10	97.495,00													
				Penguatan diagnosis dan tata laksana TB	Fas kes	22	75.428	22	97.495,00													
				Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan serta validasi data P2TBC	Fas kes	22	75.428	22	97.495,00													
		1.2.2.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
				Penemuan kasus HIV ADIS	%	40	188.705	45	299.411,00	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	14239	300.831	14239	300.831	14239	300.831	14239	300.831	14239	1.691.440,00	
				Penguatan dan advokasi terhadap lintas sektor terkait	k	1	188.705	1	299.411,00													
				Penguatan, pembinaan, supervisi, bintek, monitoring dan evaluasi jejaring fasyankes	Fas kes	18	188.705	18	299.411,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penguatan, advokasi dan pendampingan terhadap KDS ODHA	k	12	188.705	2	299.411,00													
				Peningkatan kapasitas Tim HIV Puskesmas dan RS untuk kegiatan Orientasi Tes and Treat (OTT)	Fas kes	9	188.705	14	299.411,00													
				Logistik HIV	jns	0	188.705	2	299.411,00													
				Penyediaan media KIE HIV	bh	0	188.705	3	299.411,00													
				Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik P2HIV	k	0	188.705	10	299.411,00													
				Operasional penguatan kegiatan HIV (KPA)	Paket	1	188.705	1	299.411,00													
				Penguatan program P2HIV	k	0	188.705	4	299.411,00													
		1.2.2.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
				Penanganan dan Penanggulangan COVID-19	keg	1	1.067.908	1	4.175.588,00	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa(KLB) sesuai standar	Dokumen	1	3.824.588	1	3.824.588	1	3.824.588	1	3.824.588	5	20.541.848,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.2.2.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ Atau Berpotensi Bencana																			
				Jumlah Puskesmas respon cepat penanggulangan bencana < 24 jam	puskesmas	12	1.080.400	12	1.127.000,00	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana sesuai standar	Dokumen	1	1.127.000	1	1.127.000	1	1.127.000	1	1.127.000	6	6.715.400,00	
				Jumlah Kegiatan Pelayanan vaksinasi covid	keg	0	22.000	96	1.127.000,00													
		1.2.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
				Pertemuan koordinasi LS/ LP dalam Pemantauan tumbuh kembang balita	k	0	3.339.209	1	3.314.663,75	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	3.951.101	1	4.713.205	1	5.614.380	1	6.709.955	6	27.642.512,79	
				Orientasi pemanfaatan buku KIA/ KMS	k	0	3.339.209	1	3.314.663,75													
				Penyediaan media dalam rangka penurunan stunting	lbr	0	3.339.209	12140	3.314.663,75													
				Pelaksanaan Rembuk Stunting	k	1	3.339.209	13	3.314.663,75													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Koordinasi kegiatan program gizi ke Semarang	k	3	3.339.209	4	3.314.663,75													
				Pendampingan balita gizi buruk	anak	0	3.339.209	30	3.314.663,75													
				Pemantauan distribusi tablet tambah darah bagi remaja putri	sekolah	12	3.339.209	12	3.314.663,75													
				Optimalisasi peran duta anemia terhadap pencegahan Anemia remaja putri di kabupaten sukoharjo	k	0	3.339.209	1	3.314.663,75													
				PMT Penyuluhan di Posyandu	pos	1191	3.339.209	1193	3.314.663,75													
				PMT Penyuluhan bagi anak difabel di sanggar inklusi	anak	300	3.339.209	300	3.314.663,75													
				Pertemuan analisis dan mapping permasalahan gizi	k	0	3.339.209	1	3.314.663,75													
				Validasi Data Gizi ke Puskesmas	puskesmas	0	3.339.209	12	3.314.663,75													
				Pelacakan dan Konfirmas masalah Gizi (Surveilans Gizi)	anak	0	3.339.209	240	3.314.663,75													
				Pengumpulan dan Pelaporan Data Gizi Terintegrasi	k	0	3.339.209	2	3.314.663,75													
				Peningkatan Kapasitas Petugas dan kader dalam pemberian makan bayi dan anak	orang	0	3.339.209	48	3.314.663,75													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Konvergensi LS/LP untuk penurunan Stunting melalui pemberian TTD bagi remaja dan Ibu hamil	k	0	3.339.209	1	3.314.663,75													
				Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tatalaksana Gizi Buruk	orang	0	3.339.209	36	3.314.663,75													
				Advokasi percepatan penurunan stunting melalui perintisan rumah Gizi	k	0	3.339.209	1	3.314.663,75													
				Monitoring evaluasi kegiatan program Gizi	k	0	3.339.209	2	3.314.663,75													
				Pemantauan pemberian PMT Balita Kurus dan Bumil KEK	puskesmas	0	3.339.209	12	3.314.663,75													
				Pemetaan dan analisis situasi program stunting	k	1	3.339.209	1	3.314.663,75													
				Pembinaan KPM	orang	167	3.339.209	167	3.314.663,75													
				Pengukuran dan publikasi stunting	k	1	3.339.209	1	3.314.663,75													
				Penguatan sistem manajemen data (pencatatan dan pelaporan) dalam rangka penurunan stunting	k	1	3.339.209	1	3.314.663,75													
				Review kinerja tahunan aksi integrasi stunting	k	1	3.339.209	1	3.314.663,75													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penyediaan PKMK (Pangan olahan keperluan medis khusus) bagi balita dengan masalah gizi	Paket	0	3.339.209	650	3.314.663,75													
		1.2.2.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
				Pembinaan dan pembentukan Pos UKK/ GP2SP /K3 Perkantoran	k	5	439.770	5	496.310,00	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	517.400	2	570.800	2	598.880	2	643.776	11	3.266.936,00	
				Kampanye Aktifitas Fisik Melalui senam Bersama	bln	12	439.770	12	496.310,00													
				Monev program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	k	6	439.770	3	496.310,00													
				Advokasi dan Sosialisasi Program Kesehatan Kerja	k	0	439.770	13	496.310,00													
				Pengukuran Kebugaran Jasmani	k	0	439.770	13	496.310,00													
		1.2.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
				Pembinaan Pengelolaan Sanitasi TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)	k	0	926.245	13	1.076.245,00	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1.094.380	1	1.258.000	1	1.273.000	1	1.292.000	5	6.919.870,00	
				Pengelolaan Sampah Medis oleh Pihak ke II	bln	0	926.245	12	1.076.245,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Monev Program Kesehatan Lingkungan	k	0	926.245	3	1.076.245,00													
				Pengembangan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	k	14	926.245	13	1.076.245,00													
				Pembinaan Pengelolaan Sanitasi TTU (Tempat-Tempat Umum)	k	4	926.245	13	1.076.245,00													
				Pembinaan Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes	k	1	926.245	3	1.076.245,00													
				Bantuan Sosial Jamban	orang	300	926.245	300	1.076.245,00													
		1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
				Penyediaan Informasi Media KIE	jns	3	36.780	3	377.831,00	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	8	241.131	8	4.737.140	8	292.140	8	292.140	34	5.977.162,00	
				Penyelenggaraan Gelar Potensi Daerah	k	0	36.780	1	377.831,00													
				Orientasi Program unggulan untuk mengatasi masalah kesehatan	k	1	36.780	1	377.831,00													
				Jumlah video kegiatan promosi kesehatan	judul	0	36.780	4	377.831,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.2.2.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																			
				Jumlah item BMHP pelayanan kesehatan tradisional	item	0	8.895	25	109.784,50	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	110.763	1	111.839	1	113.023	1	114.325	5	568.630,36	
				Puskesmas melakukan pelayanan kestrad 50%	puskesmas	1	8.895	2	109.784,50													
		1.2.2.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
				Perencanaan program Surveilans	dok	1	74.130,2	1	180.395,20	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	180.395	1	180.395	1	180.395	1	180.395	5	976.106,20	
				Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor Program Surveilans/ COVID-19	k	0	74.130,2	6	180.395,20													
				Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis program surveilans/ COVID-19	keg	0	74.130,2	1	180.395,20													
				Penyediaan Logistik Program Surveilans	k	2	74.130,2	6	180.395,20													
				Monitoring dan Evaluasi Program surveilans	k	0	74.130,2	2	180.395,20													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penyediaan APD dan Hand Sanitizer	Paket	0	74.130,2	1	180.395,20													
				Surveilans Epidemiologi penyakit Potensial KLB/ COVID-19	bln	12	74.130,2	12	180.395,20													
				Rujukan, Pengiriman sampel/ specimen PD3I/ keracunan pangan	minggu	48	74.130,2	48	180.395,20													
				Peningkatan Kapasitas tenaga surveilans/ pengolahan data, Tracer dan tenaga lainnya	orang	0	74.130,2	530	180.395,20													
				Biaya Komunikasi Pelacakan COVID-19	orang	0	74.130,2	5	180.395,20													
				Penyusunan dan Penyediaan media KIE	k	0	74.130,2	1	180.395,20													
				Konsultasi/ Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-roya	k	4	74.130,2	6	180.395,20													
		1.2.2.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
				Forum Komunikasi Lintas Sektor PTM dan Keswa	orang		10.315	30	32.720,00	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	1000	21.960	1500	26.352	1700	31.622	2000	37.947	2000	160.916,28	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Deteksi Dini Kesehatan Jiwa	puskesmas		10.315	0	32.720,00													
				Desa Siaga Sehat Jiwa	ds	12	10.315	24	32.720,00													
				Bimtek/ Sosialisasi Desa Siaga Sehat Jiwa	ds	0	10.315	0	32.720,00													
				Kader terlatih tentang Desa Siaga Sehat Jiwa	orang	100	10.315	0	32.720,00													
		1.2.2.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
				Pembinaan TPKJM	kec	12	9.700	12	20.940,00	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	40	25.128	60	30.154	80	36.184	100	43.421	100	165.527,10	
				Pelatihan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa bagi petugas Puskesmas	puskesmas	0	9.700	12	20.940,00													
				Koordinasi Lintas sektor / Program Dengan Kader P2PTM dan Kesehatan Jiwa	k	0	9.700	1	20.940,00													
				Bimbingan Teknis Bagi Pengurus Desa Siaga Sehat Jiwa Dalam Rangka Deteksi Dini Kesehatan Jiwa	k	0	9.700	1	20.940,00													
		1.2.2.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Event/kegiatan yang memerlukan pendampingan tenaga kesehatan	keg	50	498.209,8	50	577.320,00	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dokumen	2	609.632	0	0	0	0	0	0	2	1.685.161,8	
				Sanggar inklusi melakukan pelayanan kesehatan fisioterapi/rehabilitasi	sanggar	12	498.209,8	12	577.320,00													
				Operasional Kader sanggar Inklusi	kader	60	498.209,8	60	577.320,00													
				Koordinasi LP/LS Program kesehatan haji	k	1	498.209,8	2	577.320,00													
				Pendampingan rujukan	k	2	498.209,8	2	577.320,00													
				Sosialisasi persiapan keberangkatan Calon Jemaah haji	k	1	498.209,8	1	577.320,00													
				Pendampingan Calon Jemaah haji ke embarkasi/haji dari debarkasi	kel	3	498.209,8	3	577.320,00													
				Pengendalian faktor risiko penyakit (K3JH)	k	1	498.209,8	1	577.320,00													
				Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan haji	k	1	498.209,8	1	577.320,00													
		1.2.2.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
				Pemantauan Jentik Berkala (PJB)	ds	12	315.035,40	24	380.402,80	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Dokumen	4	462.238	4	512.311	4	566.269	4	624.890	18	2.861.146,50	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										Menular												
				Penguatan diagnosa dan tatalaksana kasus DBD	k	0	315.035,40	22	380.402,80													
				Penguatan kegiatan PSN (larvasida, GIRI Jumentik, Pengelolaan TTG	ds	24	315.035,40	36	380.402,80													
				Penyempromprota n/ Fogging Sarang Nyamuk	Paket	80	315.035,40	100	380.402,80													
				Penyediaan Insektisida dan larvasida	Paket	1	315.035,40	1	380.402,80													
				Koordinasi lintas program pengendalian penyakit menular	k	2	315.035,40	2	380.402,80													
				Koordinasi lintas sektor pengendalian penyakit menular tingkat kabupaten	k	2	315.035,40	2	380.402,80													
				Desa/Kelurahan yang melaksanakan layanan Posbindu PTM	ds	159	315.035,40	167	380.402,80													
				Penyusunan dan Penyediaan media KIE	k	1	315.035,40	1	380.402,80													
				Koordinasi LP/LS Program kesehatan haji	k	0	315.035,40	1	380.402,80													
				Logistik program Surveilans dan Imunisasi	Paket	0	315.035,40	11	380.402,80													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis program surveilans dan Imunisasi	k	0	315.035,40	2	380.402,80													
				Monitoring dan Evaluasi Program surveilans dan Imunisasi	k	0	315.035,40	4	380.402,80													
				Konsultasi/Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-raya Program Surveilans dan	k	0	315.035,40	2	380.402,80													
				Bimtek dan Monev Program P2PTM dan Keswa Ke Puskesmas	OH	0	315.035,40	48	380.402,80													
				Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi Program P2PTM dan Keswa	k	0	315.035,40	5	380.402,80													
				Koordinasi Ke Soloraya Program P2PTM dan keswa	k	0	315.035,40	2	380.402,80													
				Pertemuan Koordinasi Program P2PTM/ Keswa/ Indera	k	0	315.035,40	3	380.402,80													
				Penguatan, pembinaan, supervisi, bimtek, monitoring dan evaluasi jejaring fasyankes	Fas kes	0	315.035,40	22	380.402,80													
				Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik P2PM	k	0	315.035,40	10	380.402,80													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penguatan program P2ISPA	k	0	315.035,40	2	380.402,80													
				Cetak Media KIE Program P2PTM & Keswa	lbr	0	315.035,40	6810	380.402,80													
				Konsultasi/ Koordinasi ke Provinsi dan lintas kabupaten Solo-roya	k	0	315.035,40	2	380.402,80													
				Konsultasi & Koordinasi ke provinsi program P2PTM dan Keswa	OH	0	315.035,40	10	380.402,80													
				Koordinasi ke Soloraya program P2PTM & Keswa	k	0	315.035,40	2	380.402,80													
				Koordinasi/ konsultasi/ pertemuan/ pengambilan logistik program P2PM	k	0	315.035,40	10	380.402,80													
				Koordinasi lintas Program dalam rangka Validasi data program P2PTM, Keswa & Indra	k	0	315.035,40	2	380.402,80													
				Koordinasi LP/LS Program Surveilans dan Imunisasi	k	0	315.035,40	1	380.402,80													
				Pertemuan Desinfo/ Sosialisasi LS/ Toga/ Torma tentang Vaksinasi COVID-19	k	0	315.035,40	2	380.402,80													
		1.2.2.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang di daftarkan menjadi peserta JKN	OB	76.500	40.296.380,8	76.500	40.296.380,80	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	40.296.381	1	40.296.381	1	40.296.381	1	40.296.381	6	241.778.284,80	
				Peserta PBP dan BP Kelas III yang mendapat bantuan iuran premi	OB	87.678	40.296.380,8	87.678	40.296.380,80													
				Pasien yang menerima bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi kasus tertentu	O/Th	530	40.296.380,8	530	40.296.380,80													
		1.2.2.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																			
				Pelatihan Petugas Deteksi Napza Dengan metode ASSIST	puskesmas	0	7.875	0	9.450,00	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan sekolah	Orang	100	11.340	100	13.608	150	16.330	150	19.596	150	78.198,12	
				Generasi Muda Bebas Napza dengan Skrining menggunakan Metode ASSIST	lok	0	7.875	2	9.450,00													
		1.2.2.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Monitoring dan evaluasi program Kabupaten/ Kota Sehat	k	12	432.383	2	432.383,00	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Dokumen	1	435.000	1	435.000	1	435.000	1	435.000	5	2.604.766,00	
				Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina, Tim Teknis dan Forum Kabupaten/ Kota Sehat	k	0	432.383	3	432.383,00													
				Advokasi dan Koordinasi Pokja Desa Sehat	des/ke l	167	432.383	167	432.383,00													
		1.2.2.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
				Jumlah item Pengadaan layanan telemedicine	item	0	0	6	260.000,00	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan Telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Unit	1	260.000	1	260.000	1	260.000	1	260.000	1	1.300.000,00	
				Jumlah layanan telemedicine DKK	Paket	0	0	0	260.000,00													
		1.2.2.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Tersedianya dokumen operasional pelayanan rumah sakit	dokumen	0	0	1	140.400,00	Tersedianya dokumen operasional pelayanan rumah sakit	dokumen	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	5	740.400,00	
		1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
				Operasional Pelayanan Puskesmas berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku	%	100	6.926.262,24	100	6.926.262,84	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Dokumen	12	6.926.263	12	6.926.263	12	6.926.263	12	6.926.263	12	41.557.576,44	
		1.2.2.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
				Pemeriksaan klinis	sampel	1800	1.595.060	2000	2.494.000,00	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	2	1.660.000	2	2.624.000	2	2.724.000	2	2.824.000	10	13.921.060,00	
				Pemeriksaan Sampel Makanan Minuman	sampel	1700	1.595.060	1900	2.494.000,00													
				Pemeriksaan Sampel Air	sampel	2200	1.595.060	2400	2.494.000,00													
				Pemeriksaan Sampel Air Bersih dan Fasilitas Sanitasi Rumah Sakit dan TTU Lainnya	sampel	2200	1.595.060	2400	2.494.000,00													
				Jumlah SDM pelayanan umum yang disediakan	OB	0	1.595.060	3	2.494.000,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah SDM Ahli (Analisis Kesehatan) yang disediakan	orang	0	1.595.060	2	2.494.000,00													
				Terpenuhihnya Biaya Operasional sebagai pendukung kegiatan	kegiatan	0	1.595.060	100	2.494.000,00													
				Terpenuhihnya Biaya Operasional sebagai pendukung kegiatan	kegiatan	0	1.595.060	100	2.494.000,00													
		1.2.2.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota																			
				Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Rumah Sakit	7	350.000	7	1.775.280,00	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/ Kota	unit	35	1.406.820	38	1.406.820	51	1.406.820	63	1.406.820	63	7.752.560,00	
				Puskesmas terakreditasi	puskesmas	12	300.000	12	1.775.280,00													
				FKTP (Klinik Pratama) terakreditasi	Fasilitas	3	300.000	3	1.775.280,00													
				FKTU (Klinik Utama) terakreditasi	Klinik Utama	0	300.000	0	1.775.280,00													
				Labkesda terakreditasi	Labkesda	1	300.000	1	1.775.280,00													
				Laboratorium swasta sesuai standar/ memenuhi syarat Faskes	Laboratorium Swasta	0	300.000	0	1.775.280,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Fas kes mendapatkan pembinaan dalam rangka akreditasi	Fas kes	24	300.000	29	1.775.280,00													
				Penilaian akreditasi rumah sakit Paripurna	%	100	300.000	100	1.775.280,00													
		1.2.2.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
				Penguatan jejaring dengan fasyankes	Fas kes	20	3.220.531	20	1.046.870,00	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	846.870	1	846.870	1	846.870	1	846.870	6	7.654.881,00	
				Penyelidikan Epidemiologi penyakit menular potensial KLB	kasus	120	3.220.531	120	1.046.870,00													
				Koordinasi terpadu keluar wilayah untuk kewaspadaan dini dan respon penyakit menular potensial KLB	k	10	3.220.531	10	1.046.870,00													
				Penguatan diagnosis dan tatalaksana kasus penyakit potensial KLB	Fas kes	0	3.220.531	20	1.046.870,00													
				Penguatan pelaporan pengendalian penyakit Hepatitis, Infeksi Saluran Pencernaan (P2HISP)	k	1	3.220.531	1	1.046.870,00													
				Penyediaan media KIE KLB	bh	3	3.220.531	3	1.046.870,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Konsultasi, koordinasi dan pengambilan logistik kasus penyakit menular potensial KLB	k	10	3.220.531	10	1.046.870,00													
				Jumlah item Pengadaan Alat pelindung Diri (APD) untuk nakes RSUD Sukoharjo	item	0	3.220.531	9	1.046.870,00													
				Penguatan program P2ISPA	k	0	3.220.531	2	1.046.870,00													
		1.2.2.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																			
				Tersedianya Ambulance	unit	0	240.000	0	1.234.976,00	Jumlah Public Safety Center (PSC 119), Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1.279.726	1	843.906,3	1	1.028.000	1	1.130.800	1	5.757.408,3	
				RS yang terintegrasi dengan sistem aplikasi PSC 119	Rumah Sakit	0	240.000	2	1.234.976,00													
		1.2.2.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				-	-	0	0	0	0	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2191	0	2191	9.000	2191	38.240	2191	38.622,4	2191	85.862,40	
		1.2.2.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
				-	-	0	0	0	0	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	142	0	142	31.770	142	44.209	142	44.651	142	120.630,00	
		1.2.2.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
				-	-	0	0	0	0	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	1000	0	1000	52.243	1000	82.190	1000	90.409	1000	224.842,00	
		1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																			
				Prosentase ketercapaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (RSUD)	%	0		100	1.350.000,00			100	1.036.250	100	605.000	100	538.800	100	528.130	100	4.058.180,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	%	100		100	1.350.000,00			100	1.036.250	100	605.000	100	538.800	100	528.130	100	4.058.180,00	
		1.2.2.2.03.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan																			
				-	-	0	0	0	0,00	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	Dokumen	1	24.800	0	0	0	0		0	1	24.800,00	
		1.2.2.2.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
				Jumlah item Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Rekam Medis elektronik untuk mendukung pelayanan kesehatan	item	0	0	7	1.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	836.250	4	429.800	4	341.280	4	352.930	16	2.960.260,00	
		1.2.2.2.03.3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet																			
				Jumlah item Pengadaan Alat /Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet untuk mendukung pelayanan kesehatan	item	0	0	2	350.000,00	Jumlah Alat /Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	unit	1	200.000	0	0	0	0	0	0	1	550.000,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.2.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/ Kota																			
				Persentase fasilitas kesehatan yang diterbitkan ijin	%	96	154.156	99	197.410,00			100	210.027	100	223.490	100	241.999	100	252.338	100	1.279.419,75	
		1.2.2.2.04.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D																			
				Pendampingan dan verifikasi obyek perijinan	Fas kes	42	23.300	69	30.000,00	Jumlah Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	12	30.000	15	35.000	15	40.000	15	40.000	15	198.300,00	
		1.2.2.2.04.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Faskes yang menerapkan SISROUTE	Faskes	16	0	22	17.800,00	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	25	20.000	0	0	0	0	0	0	25	37.800,00	
		1.2.2.2.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
				FKTP yang memenuhi standar pelayanan 60%	FKTP	0	130.856	16	134.210,00	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	38	139.027	51	147.490	63	156.999	76	167.238	76	875.819,75	
				Puskesmas dengan kinerja pelayanan 100%	puskesmas	0	130.856	7	134.210,00													
				Jumlah Puskesmas yang melakukan survey kepuasan masyarakat	puskesmas	0	130.856	12	134.210,00													
				Koordinasi petugas pengelola obat puskesmas	k	3	130.856	3	134.210,00													
				Pembinaan dan bimbingan ke sarana pelayanan kefarmasian (Puskesmas, rumah sakit, klinik)	sarana	12	130.856	12	134.210,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Konsultasi dan koordinasi tentang Kefarmasian . Alkes dan Perbekes	k	10	130.856	10	134.210,00													
				Konsultasi dan koordinasi tentang Kefarmasian . Alkes dan Perbekes	k	10	130.856	10	134.210,00													
		1.2.2.2.04.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																			
				Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi standar 80%	Rumah Sakit	3	0	6	15.400,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	21.000	1	50.000	1	57.500	1	63.250	4	207.150	
		1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																			
				Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)	%	0	9.175.793,6	100	9.170.557,00	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)	%	100	8.748.029	100	8.346.628	100	7.965.296.000	100	7.603.032.000	100	15.603.769,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	%	100	9.175.793,6	100	9.170.557,00	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	%	100	400.000	100	450.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	1.119.196.350,60	
		1.2.3.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/ Kota																			
				Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Sukoharjo	%	25	26.669,6	90	66.500,00	Persentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Sukoharjo	%	90	70.000	90	75.000	95	75.000	95	75.000	95	388.169,60	
		1.2.3.2.01.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																			
				Pembinaan, Pengawasan, koordinasi dan konsultasi Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	k	25	26.669,6	21	66.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1200	70.000	1300	75.000	1400	75.000	1500	75.000	1500	388.169,60	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.2.3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota																			
				Persentase Ketercapaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP di wilayah Kabupaten/ Kota	%	95	8.955.264	95	8.543.660,00	Persentase Ketercapaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP di wilayah Kabupaten/ Kota	%	100	8.541.580	100	8.172.750	100	7.690.670	100	6.998.340	100	48.902.264,00	RSUD, DKK
				Persentase Ketercapaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP di wilayah Kabupaten/ Kota (RSUD)	%	0	8.955.264	100	8.543.660,00													
		1.2.3.2.02.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
				Pemutakhiran data PPSDMK	dok	1	49.740	2	86.390,00	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	115.000	1	120.000	1	125.000	1	130.000	1	626.130,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penyusunan perencanaan kebutuhan SDM	dok	1	49.740	1	86.390,00													
				Penyusunan Perencanaan kebutuhan perencanaan pendidikan dan pelatihan	k	0	49.740	2	86.390,00													
		1.2.3.2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar																			
				Koordinasi Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	k	8	8.905.524	3	8.457.270,00	Terpenuhi nya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	238	8.426.580	238	8.052.750	238	7.565.670	238	6.868.340	952	48.276.134,00	
				Jumlah nakes non ASN penerima Insentif penanganan covid	OB	1380	8.905.524	1350	8.457.270,00													
		1.2.3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Persentase Ketercapaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	%	0	193.860	100	1.087.734,80	Ketercapaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	Orang	300	1.208.860	300	1.328.860	300	1.443.860	300	1.558.860	300	6.822.034,80	
				Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	0	193.860	85	1.087.734,80	Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang	300	1.208.860	300	1.328.860	300	1.443.860	300	1.558.860	300	6.822.034,80	
		1.2.3.2.03.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																			
				Jumlah SDM yang mengikuti Capacity Building untuk mendukung pelayanan kesehatan	orang	0		360	1.087.734,80	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	300	1.208.860	300	1.328.860	300	1.443.860	300	1.558.860	300	6.628.174,80	
				Capacity Building	orang	0		165	1.087.734,80													
				Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	kategori	0		9	1.087.734,80													
				Studi banding	k	0		2	1.087.734,80													
				Seminar / Lokakarya Bidang Kesehatan	orang	0		30	1.087.734,80													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Bimtek kepada pengelola fasilitas kefarmasian	orang	120		0	1.087.734,80													
				Pelatihan Teknis dan Fungsional Tenaga Kesehatan	orang	30		40	1.087.734,80													
		1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																			
				Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	71	568.920	76	350.000.000,00	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	81	400.000.000	86	460.000.000	91	480.000.000	96	560.000.000	96	2.250.568.920,00	
		1.2.4.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																			
				Sarana kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) jmemiliki izin operasional yang masih aktif.	%	97,48	68.325	100	89.726,00	Sarana kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) jmemiliki izin operasional yang masih aktif.	%	100	59.763	100	45.000	100	45.000	100	52.000	100	359.814,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Targe t	Rp	Targe t	Rp			Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.2.4.2.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																			
				Terlaksananya binuwas ke sarana Apotek dan toko obat	sarana	100	34.162	100	19.763,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	48	19.763	148	64.763,00	148	67.000,00	148	76.000,00	240	281.451,00	
		1.2.4.2.01.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah	
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja			
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Pembinaan dan pengawasan ke sarana Apotek dan toko obat	sarana	100	34.163	100	39.763,00	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam Rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	100	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	113.926	
				Pendampingan dan Verifikasi Izin apotek, Toko obat, TKA, Optikal dan UMOT	sarana	90	34.163	100	39.763,00												113.926		
		1.2.4.2.01.3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi dan Solo raya	k	0	0	4	30.200,00	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.200,00	
				Koordinasi program ke puskesmas	puskesmas	0	0	12	30.200,00													
				Pembahasan hasil visitasi	k	0	0	8	30.200,00													
				Pembinaan pemilik sarana izin apotek, toko obat, alkes, dan UMOT	k	0	0	1	30.200,00													
				Sosialisasi peraturan terkait izin apotek, toko obat, toko alkes, optik dan UMOT	k	0	0	2	30.200,00													
				Visitasi lokasi pemohon Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	sarana	0	0	36	30.200,00													
		1.2.4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Persentase jumlah sarana IRTP berSPPIRT yang dinowas	%	100	89.210	100	80.000,00	Prosentase Sarana IRTP yang penerbitan SPPIRT melalui OSS-RBA sudah sesuai dengan ketentuan	%	100	80.000	100	80.000	100	85.000	100	85.000	100	499.210,00	
		1.2.4.2.03.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			
				Penerbitan SPPIRT bagi IRTP baru	sarana	50	89.210	80	80.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	165	80.000	90	80.000	90	85.000	90	85.000	435	499.210,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
											Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											
				Pendampingan dan Verifikasi penerbitan Sertifikat Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Kelas 1 dan PKRT kelas 1	sarana	15	89.210	25	80.000,00													
				Pendampingan dan Verifikasi penerbitan sertifikat PIRT	sarana	182	89.210	200	80.000,00													
		1.2.4.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																			
				Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene	%	95	232.415	98	212.895,00	Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene	%	99	222.000	100	232.000	100	239.000	100	255.000	100	1.393.310,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.2.4.2.04.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)																			
				Penerbitan SPPIRT bagi IRTP baru	sarana	80	232.415	80	212.895,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	222.000	1	232.000	1	239.000	1	255.000	6	1.393.310,00	
				Pendampingan dan Verifikasi penerbitan sertifikat Laik Hygiene sanitasi, tempat Pengelolaan Makanan jasa boga, Rumah Makan/ restoran dan Dopot Air Minum (DAM)	sarana	20	232.415	30	212.895,00			35	222.000	35	232.000	35	239.000	40	255.000	40	1.393.310,00	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Persentase sarana TPM yang diterbitkan Sertifikat Laik Higiene	%	97	232.415	98	212.895,00													
				Pertemuan Koordinasi Pengawasan Jasa boga	k	2	232.415	2	212.895,00													
				Pembinaan dan Pengawasan Jasa boga	lok	1	232.415	100	212.895,00													
				Fasilitasi Kantin Sekolah Dasar	orang	80	232.415	80	212.895,00													
				Kursus Higiene Sanitasi Pangan Pada Penjamah Makanan	orang	100	232.415	100	212.895,00													
				Advokasi dan Sosialisasi Pada Tim Pembina Jasa Boga	k	0	232.415	2	212.895,00													
		1.2.4.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																			
				Stikerisasi laik sehat pada Pedagang kaki lima	orang	0	40.000	200	44.000,00	Stikerisasi laik sehat pada Pedagang kaki lima	orang	200	52.800	200	63.630	200	76.032	200	91.238	200	367.700,40	
		1.2.4.2.05.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Puskesmas melaksanakan program stikerisasi Makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	puskesmas	2	40.000	5	44.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	1	52.800	1	63.630	1	76.032	1	91.238	5	367.700,40	
		1.2.4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																			
				Persentase jumlah sarana IRTP berSPPIRT yang dibinwas	%	31	138.970	47	142.270,00	Persentase jumlah sarana IRTP berSPPIRT yang dibinwas	%	62	142.270	78	135.970	88	136.000	100	136.000	100	831.480,00	
		1.2.4.2.06.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pengujian sampel pangan (makanan dan minuman) yang dicurigai mengandung bahan berbahaya	sampel	900	135.770	900	135.770,00	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	261	135.770	261	143.650	213	143.680	213	144.000	948	838.640,00	
				Pengawasan peredaran pangan dan obat di sarana produksi, distributor, outlet, pasar/ swalayan/ minimarket	sarana	28	135.770	25	135.770,00													
				Sarana Binwas ke IRTP	sarana	150	135.770	150	135.770,00													
				Pengujian sampel pangan IRTP	sampel	42	135.770	40	135.770,00													
		1.2.4.2.06.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga																			
				Koodinasi dan konsultasi ke Solo Raya dan Provinsi	k	4	3.200	28	6.500,00	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen	1	6.500	0	0	0	0	0	0	1	16.200	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																			
				Persentase Desa siaga aktif mandiri	%	45	4.864.817	46	5.000.000,00	Persentase Desa siaga aktif mandiri	%	47	5.500.000	48	5.700.000	49	6.000.000	50	6.350.000	50	33.414.817,00	
		1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																			
				Persentase kecamatan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	33	267.300	41	341.940,00	Persentase kecamatan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	50	341.940	58	441.940	66	349.440	75	349.440	75	2.092.000,00	
		1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Advokasi Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	k	0	267.300	4	341.940,00	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	13	341.940	13	441.940	13	349.440	13	349.440	54	2.092.000,00	
				Koordinasi Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kabupaten	k	0	267.300	4	341.940,00													
				Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten	k	1	267.300	1	341.940,00													
				Penggerakan GERMAS	orang	310	267.300	310	341.940,00													
				Kampanye Lokal Dalam Mendukung Pelaksanaan GERMAS	orang	360	267.300	360	341.940,00													
				Lokakarya Forum Kesehatan Desa (FKD)	orang	334	267.300	334	341.940,00													
				Pemberdayaan Kader Kesehatan	orang	0	267.300	735	341.940,00													
				Pengiriman peserta Pertijusada Tingkat Provinsi	Paket	0	267.300	0	341.940,00													
				KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat	orang	459	267.300	450	341.940,00													
				Penyebarluasan Informasi Kesehatan	M	2	267.300	2	341.940,00													
		1.2.5.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	%	90	37.747	90	109.709,00	Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	%	90	111.000	90	121.000	90	123.000	90	123.000	90	625.456,00	
		1.2.5.2.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																			
				Penyuluhan Kelompok	orang	180	37.747	200	109.709,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	2	111.000	2	121.000	2	123.000	2	123.000	2	625.456,00	
				Orientasi kader Daslat / kader Posyandu dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang program unggulan	orang	0	37.747	130	109.709,00													
				Penyediaan Media sosial dalam rangka pelaksanaan GERMAS	orang	0	37.747	60	109.709,00													
		1.2.5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Persentase kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 %	%	67	4.559.770	75	4.655.685,00	Persentase kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 %	%	83	4.707.898	92	5.172.762	100	5.686.966	100	6.320.636	100	31.103.716,02	
				Persentase Posyandu Aktif Mandiri	%	52	4.559.770	53	4.655.685,00	Persentase Posyandu Aktif Mandiri	%	54	4.707.898	58	5.172.762	59	5.686.966	60	6.320.636	60	31.103.716,02	
		1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
				Evaluasi Pelaksana Terbaik Desa Siaga Ber - PHBS	kec	12	4.559.770	12	4.655.685,00	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	7	4.707.898	5	5.172.762	5	5.686.966	5	6.320.636	5	31.103.716,02	
				Konsultasi dan koordinasi program promkes dan pemberdayaan masyarakat	k	4	4.559.770	6	4.655.685,00													
				Bimtek UKBM	lap	12	4.559.770	12	4.655.685,00													
				Pembinaan Masyarakat dalam rangka Evaluasi Program Kesehatan	lok	2	4.559.770	2	4.655.685,00													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Operasional Kader Posyandu	kader	7432	4.559.770	7575	4.655.685,00													
				Pemantauan Operasional Posyandu	k	1	4.559.770	1	4.655.685,00													
				Penggerakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	orang	40	4.559.770	40	4.655.685,00													
		1.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik																			
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	74		75		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	76	77	78	79							
		0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																			
				Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	304.957.026,8	100	308.274.855,81	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	316.901.423	100	324.632.091	100	332.009.850	100	338.483.885	100	1.925.259.131	
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD)	%	0	304.957.026,8	100	308.274.855,81			100	316.901.423	100	324.632.091	100	332.009.850	100	338.483.885	100	1.925.259.131	
		0.0.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	155.261.534,1	100	159.934.110,05	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	165.073.944	100	170.727.762	100	176.946.961	100	183.788.080	100	1.011.732.391	
		0.0.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
				Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang	1337	154.201.614,1	1410	158.874.190,05	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1142	164.014.024	1498	169.667.842	1549	175.887.041	1605	182.728.160	1605	1.005.372.871	
		0.0.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD																		0	
				Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan	dok	4500	1.059.920	5000	1.059.920,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5000	1.059.920	5000	1.059.920	5500	1.059.920	5500	1.059.920	5500	6.359.520	
		0.0.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
				Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	1.571.160	100	2.443.535,00	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	2.490.265	100	2.554.865	100	2.618.425	100	2.186.341	100	13.864.591	
		0.0.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
				Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	stel	4140	1.424.360	4170	1.421.485,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4210	1.446.485	4240	1.471.485	4260	1.491.485	4290	1.511.485	4290	8.766.785	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.0.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
				Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 jpl per tahun per orang	orang	180	0	190	760.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	796.000	210	835.600	220	879.160	230	427.076	1230	3.697.836	
				Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	pegawai	0	0	40	760.000,00			40	796.000	40	835.600	40	879.160	40	427.076	40	3.697.836	
		0.0.1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
				Jumlah Sarpras Disiplin pegawai yang diadakan	unit	0	0	650	22.940,00	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	400	13.920	400	13.920	400	13.920	400	13.920	400	78.620	
		0.0.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
				Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun	lap	1	63.200	1	82.060,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	76.810	1	76.810	1	76.810	1	76.810	6	452.500	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.0.1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
				Jumlah ASN yang memanfaatkan Sistem Informasi Kepegawaian	pegawai	100	0	100	5.400,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	5.400	1	5.400	1	5.400	1	5.400	6	27.000	
		0.0.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
				Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	dok	1	80.000	1	148.050,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	148.050	1	148.050	1	148.050	1	148.050	6	820.250	
		0.0.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
				Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	pegawai	40	3.600	40	3.600,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	3.600	40	3.600	40	3.600	40	3.600	240	21.600	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.0.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
				Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	12.500	100	1.225.250,00	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.865.250	100	852.500	100	972.500	100	12.500	100	4.940.500	
		0.0.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit	0	0	2	560.000,00	Jumlah Unit Peningkatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	840.000	3	840.000	2	560.000	0	0	13	2.800.000	
		0.0.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit	0	0	1	652.750,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	912.750	0	0	1	300.000	0	0	2	1.865.500	
		0.0.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	2	12.500	2	12.500,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	12.500	2	12.500	2	12.500	2	12.500	2	75.000	
		0.0.1.2.07.5	Pengadaan Mebel																			
				Jumlah Mebel yang diadakan	unit	0	0	0	0	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	Unit	25	100.000	0	0	25	100.000	0	0	0	200.000	
		0.0.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																			
				Persentase ketercapaian pelayanan BLUD	%	100	145.830.094	100	142.280.354,44	Persentase ketercapaian pelayanan BLUD	%	100	144.280.354	100	146.280.354	100	148.280.354	100	149.280.354	100	876.231.866	
		0.0.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
				Pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang medik dan non medik serta pelayanan administrasi pendukung pelayanan kesehatan	%	98	145.830.094	100	142.280.354,44	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	13	144.280.354	13	146.280.354	13	148.280.354	13	149.280.354	13	876.231.866	
		0.0.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	40.017,09	100	57.092,00	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	57.092	100	57.092	100	57.092	100	57.092	100	325.477	
		0.0.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	2	17.092	2	17.092,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	17.092	2	17.092	2	17.092	2	17.092	12	102.552	
		0.0.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dok	1	5.000	1	5.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	6	30.000	
		0.0.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dok	1	5.000	1	5.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	6	30.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.0.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	dok	1	5.000	1	5.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	30.000	
		0.0.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dok	1		1	5.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	6	25.000	
		0.0.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
				Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dok	4	20.000,00	4	20.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	20.000	4	20.000	4	20.000	4	20.000	6	120.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.0.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
				Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	131.690	100	116.417,69	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	116.418	100	116.418	100	116.418	100	116.418	100	713.778	
		0.0.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
				Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	dok	1	17.690	1	17.690	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	18.000	1	18.000	1	18.000	1	18.000	6	107.380	
		0.0.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	lap	1	114.000	1	116.400,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	116.400	1	116.400	1	116.400	1	116.400	6	696.000	
		0.0.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
				Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	471.585,25	100	579.650,25	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	579.650	100	579.650	100	579.650	100	579.650	100	3.369.837	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.0.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																			
				Jumlah komponen listrik yang disediakan	bh	15	19.378,75	15	19.378,75	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Pengerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	19.379	15	19.379	15	19.379	15	19.379	15	116.273	
		0.0.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
				Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	bh	27	59.000	27	59.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	27	59.000	27	59.000	27	59.000	27	59.000	27	354.000	
		0.0.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
				Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	bh	18	101.009,50	18	101.009,50	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	18	101.010	18	101.010	18	101.010	18	101.010	18	606.057	
		0.0.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
				Jumlah logistik kantor yang disediakan	jns	4	193.025	4	193.025,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	193.025	4	193.025	4	193.025	4	193.025	4	1.158.150	
		0.0.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	jns	32	86.500,00	32	86.500,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	32	86.500	32	86.500	32	86.500	32	86.500	32	519.000	
		0.0.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
				Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	bh	3	4.872,00	3	4.872,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	4.872	3	4.872	3	4.872	3	4.872	3	29.232	
		0.0.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
				Jumlah Tamu yang difasilitasi	orang	400	7.800	400	9.900,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	9.900	1	9.900	1	9.900	1	9.900	6	57.300	
		0.0.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	k	45	0	45	105.965,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	105.965	45	105.965	45	105.965	45	105.965	45	529.825	
		0.0.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.167.849,38	100	1.167.849,38	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.167.849	100	1.167.849	100	1.167.849	100	1.167.849	100	7.007.096	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.0.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
				Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar	surat	22720	17.220,00	22720	17.220,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	17.220	1	17.220	1	17.220	1	17.220	6	103.320	
		0.0.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
				Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	rekening	12	482.442,00	12	482.442,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	482.442	12	482.442	12	482.442	12	482.442	12	2.894.652	
		0.0.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
				Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	orang	37	668.187,38	37	668.187,38	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	668.187	1	668.187	1	668.187	1	668.187	6	4.009.124	
		0.0.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
				Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	470.597,00	100	470.597,00	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.270.600	100	2.295.600	100	1.270.600	100	1.295.600	100	7.073.594	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.0.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/ difasilitasi	unit	2	71.450,00	2	71.450,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	71.450	2	71.450	2	71.450	2	71.450	2	428.700	
		0.0.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara/ difasilitasi	unit	15	86.950,00	15	86.950,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	86.950	15	86.950	15	86.950	15	86.950	15	521.700	
		0.0.1.2.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Alat Besar yang dipelihara/ difasilitasi	unit	3	60.150,00	3	60.150,00	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinanny a	Unit	3	60.150	3	60.150	3	60.150	3	60.150	3	360.900	
		0.0.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel																			
				Jumlah mebeleur yang dipelihara	unit	0	0	0	0	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0	0	10	25.000	0	0	10	25.000	0	50.000	
		0.0.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
				Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	45	32.050	45	32.050,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	32.050	45	32.050	45	32.050	45	32.050	45	192.300	
		0.0.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	11	199.997,00	1	199.997,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	14	1.000.000	14	2.000.000	14	1.000.000	14	1.000.000	14	5.399.994	
		0.0.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Lama	Satuan	Target				Indikator Baru	Satuan	Target										Unit Kerja Perangkat Daerah
						2021		2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	32	20.000,00	32	20.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	32	20.000	32	20.000	32	20.000	32	20.000	32	120.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya dan biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya indikator kinerja harus memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan/

atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU Dinas Kesehatan, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 - 2026 sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut:

Tabel VII.1

**Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 - 2026**

Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja pada					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan							
AKI (Angka Kematian Ibu)	97,8	97	96	95	94	93	92
AKB (Angka Kematian Bayi)	7,4	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,9
AKABA (Angka Kematian Balita)	8,88	8,5	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1
Persentase Stunting	7,80%	7,75%	7,70%	7,65%	7,60%	7,55%	7,50%
Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	96%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	59%	62	64	66	69	72	75
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	21%	21	27	36	45	54	65
Nilai Sakip	72	72	75	76	77	78	80

Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja pada					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sesudah Perubahan							
AKI (Angka Kematian Ibu)	97,8	97	96	95	94	93	92
AKB (Angka Kematian Bayi)	7,4	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,9
AKABA (Angka Kematian Balita)	8,88	8,5	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1
Persentase Stunting	7,8%	7,75%	7,7%	7,65%	7,6%	7,55%	7,5%
Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	96%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	59%	62%	64%	66%	69%	72%	75%
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	21%	21%	27%	36%	45%	54%	65%
Nilai Sakip		72	75	76	77	78	80

Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana terlampir sebagai berikut :

NO	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1 Persentase Puskesmas dengan peningkatan program penyakit menular	100	100	100	100	100	100	100	100
		2 Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		kesehatan jiwa								
		3 Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	100	100	100	100	100	100	100	100
		4 Persentase FKTP terakreditasi	18	18	21,6	22	30	40	50	50
		5 Persentase FKTL terakreditasi	34	34	43	43	50	65	80	80
		6 Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	20	20	40	40	60	80	100	100
		7 Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	0,5	49	49	50	52	53	53	53
		8 Persentase Capaian UHC	81,4	81,4	85	90	95	95	95	95
		9 Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu		100	100	100	100	100	100	100
		10 Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi		100	100	100	100	100	100	100
		11 Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita		100	100	100	100	100	100	100
		12 Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat		100	100	100	100	100	100	100
		13 Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100	100	100
		14 Persentase Puskesmas dengan cakupan yan	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
		kesehatan pada kesehatan reprduksi								
		15 Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia	100	100	100	100	100	100	100	100
		16 Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	47	58	67	78	89	94	97	97
		17 Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	33	42	58	67	75	92	100	100
		18 Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	83	92	100	100	100	100	100	100
		19 Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	80	80	82	84	85	86	87	87
		20 NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap- tiap 1000 pasien keluar	47%	<46%	<45%	<40%	<35%	<30%	<25%	<25%
		21 Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	22 Persentase Pemanfaatn Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya	100	100	100	100	100	100	100	100
III	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	23 Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	71	71	76	81	86	91	96	96
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	24 Persentase Desa siaga aktif mandiri	40	45	46	47	48	49	50	50

NO	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal	Target / Tahun							Kondisi pada akhir periode
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
V	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	22 Prosentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, sebagaimana terlampir sebagai berikut :

NO	Indikator SPM	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	100	100	50
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	80
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	100	100	100	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	100	100	100	100	100	53
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100	100	100	100	100	95
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator SPM	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100	100	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	100	100	100	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

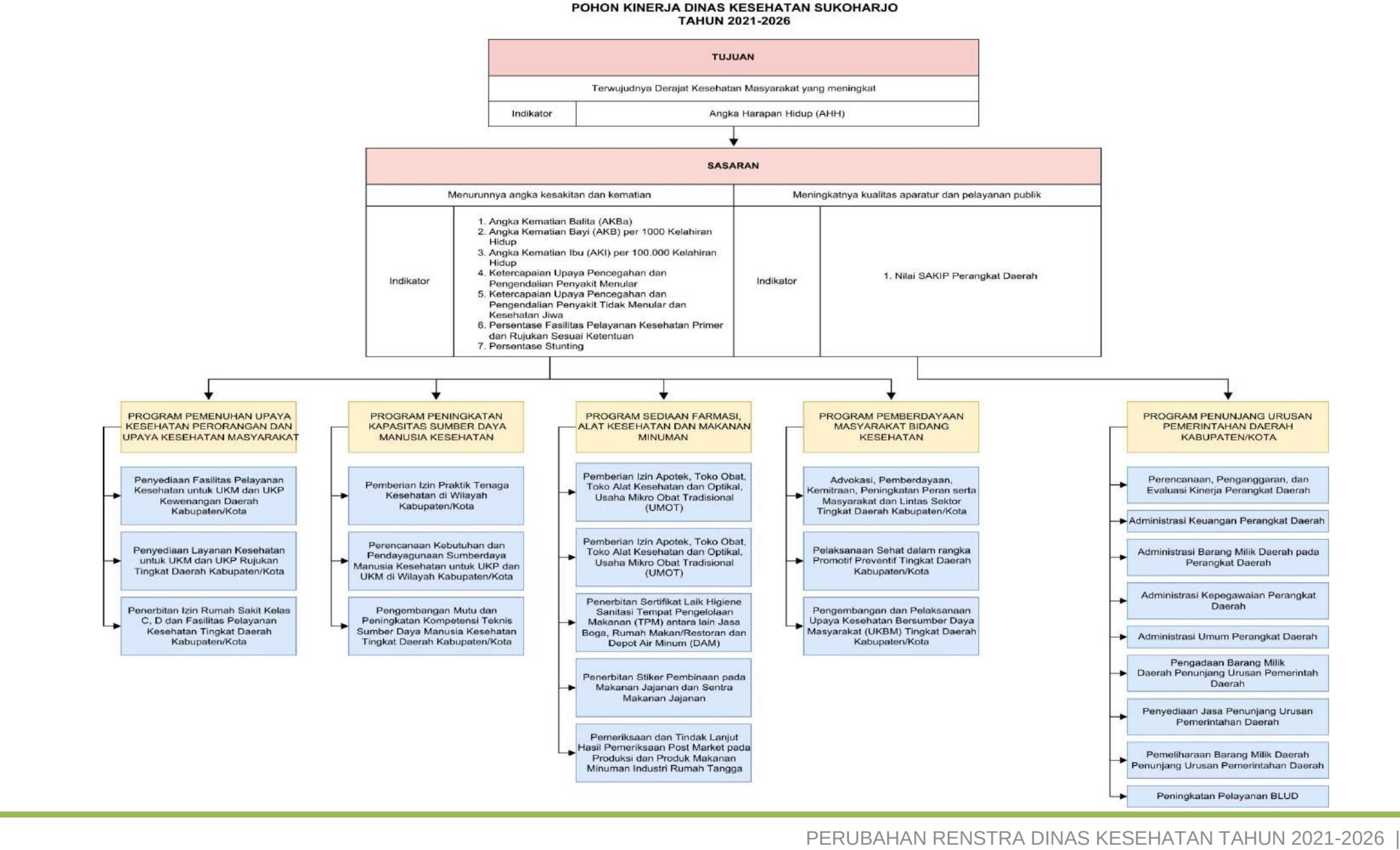
PENUTUP

Dokumen perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan sampai tahun 2026. Renstra juga disusun tidak saja sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Mengingat dokumen perubahan Renstra merupakan penyempurnaan dari Renstra sebelumnya, maka indikator kinerja dan capaian target yang ditetapkan didalamnya tidak berlaku bagi program dan kegiatan pada tahun sebelum dilakukan perubahan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, baik citra aparatur, masyarakat dan lingkungan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, sehingga visi dan misi yang tersusun memang layak dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Agenda-agenda strategis pembangunan kesehatan harus dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam visi dan misi unit kerjanya, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan secara bersama-sama.

Keterlibatan seluruh unsur jajaran kesehatan di Kabupaten Sukoharjo dalam karya nyata dalam rangka menjabarkan visi dan misi merupakan modal yang paling penting, sehingga bukan hanya memiliki visi dan misi yang paling utama tetapi bagaimana visi dan misi itu dituangkan dalam karya yang nyata dalam membangun Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu perlu penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo demi mewujudkan RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu , konsistensi, kerjasama, transparansi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Lampiran 1



**METADATA INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 - 2026**

No	Uraian Indikator	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target						Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub)	Kualitas Indikator (Kuantitatif/ Kualitatif /Persentase/ Rasio/ Rata-rata/ Indeks)	Sifat Indikator (Positif / Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental /Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/ LP PD/ SPM/ SDGs/ RPJMN/ Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022	2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	AKI (Angka Kematian Ibu)	Jumlah kematian Ibu yang disebabkan karena kehamilan,persalinan,nifas dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000 KH	100.000 kelahiran hidup	57.08	97	96	96	95.6	95.5	95	95	Indikator Tujuan	per 100.000 Kelahiran hidup	Negatif	Incremental	RPJMN	Kesehatan
2	AKB (Angka Kematian Bayi)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun)pada satu tahun tertentu didaerah tertentu dibagi jumlah lahir hidup dikali 1000 KH	1000 kelahiran hidup	7.42	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7	7	Indikator Tujuan	per 1000 Kelahiran Hidup	Negatif	Incremental	RPJMN	Kesehatan
3	AKABA (Angka Kematian Balita)	Jumlah kematian balita (berumur 0 sampai 59 bulan)pada satu tahun tertentu didaerah tertentu dibagi jumlah lahir hidup dikali 1000 KH	1001 kelahiran hidup	8.88	8.5	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	Indikator Tujuan	per 1000 Kelahiran Hidup	Negatif	Incremental	RPJMN	Kesehatan
4	Persentase Stunting	(Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki z-score kurang dari -2SD / Jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)) X 100	%	7.32	7.75	7.7	7.7	7.69	7.65	7.6	7.6	Indikator Sasaran	Persentase	Negatif	Incremental	RPJMN	Kesehatan
5	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	Rata rata persentase capaian kinerja dari 4 indikator prioritas (HIV, TBC, Malaria dan DBD))	%	96	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	Indikator Sasaran	Persentase	Positif	Incremental	lainnya	Kesehatan
6	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Rata rata persentase penderita/penyandang Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (Hipertensi,DM,ODGJ) yang mendapat pelayanan standar di FKTP	%	59	62	64	66	69	72	75	75	Indikator Sasaran	Persentase	Positif	Incremental	lainnya	Kesehatan
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	Jumlah fasyankes terakreditasi dibagi jumlah semua fasyankes dikali 100	%	21	21	27	27	30	40	50	50	Indikator Sasaran	Persentase	Positif	Kumulatif	SDGs	Kesehatan

METADATA INDIKATOR PROGRAM DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 - 2026

No	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program		Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif/Kualitatif/Persentase/Rasio/ Rata-rata/ Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental/ Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD/SPM /SDGs/ RPJMN/ Lainnya)	Bidang Urusan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026						
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1	Persentase Puskesmas dengan peningkatan program penyakit menular	Jumlah puskesmas yang mencapai minimal 2 kriteria dari 4 program prioritas yaitu prevalensi HIV/AIDS ≤ 0,21 %, Angka Kesembuhan BTA positif TBC 85%, API Malaria < 1 dan DBD < 49/10.000 penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program	Persentase	Positif	Incremental	RPJMN	Kesehatan
		2	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	Jumlah puskesmas yang meningkat kinerjanya dibanding tahun lalu minimal 3 kriteria dari 1, penemuan dan pelayanan kasus DM, 2. Hipertensi dan 3. ODGJ Berat 4. keganasan kanker leher rahim dan payudara 5. pelayanan kesehatan indra (penglihatan dan pendengaran)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program	Persentase	Positif	Incremental	SPM	Kesehatan
		3	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	Jumlah puskesmas yang mencapai minimal 3 kriteria dari 5 program imunisasi dan Surveilans: UCI desa/kel, imunisasi dasar lengkap, imunisasi bawah dua tahun , imunisasi Anak Sekolah dan KLB P3I ditangani ≤ 24 jam	%	80	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	Lainnya	Kesehatan
		4	Persentase terakreditasi FKTP	(Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi/ Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Sukoharjo) X 100	%	18	18.00	21.69	27.71	31.82	39.77	50.00	50.00	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	SDGs	Kesehatan

No	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program		Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif/Kualitatif/Persentase/Rasio/ Rata-rata/ Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental/ Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD/SPM /SDGs/ RPJMN/ Lainnya)	Bidang Urusan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026						
		5	Persentase FCTL terakreditasi	(Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) terakreditasi/ Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) di Kabupaten Sukoharjo) X 100	%	34	34.00	43.00	60.00	78.00	86.00	100.00	100.00	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	SDGs	Kesehatan
		6	Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	(Jumlah Fasilitas KesehatanLainnya terakreditasi/ Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya di Kabupaten Sukoharjo) X 100	%	20	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	SDGs	Kesehatan
		7	Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	(Jumlah Fasyankes yang memberikan layanan JKN/ Jumlah Fasyankes di Kabupaten Sukoharjo) X 100	%	45.90	49.00	49.00	49.00	50.00	50.00	53.00	53.00	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	Lainnya	Kesehatan
		8	Persentase Capaian UHC	(Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN/ Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo) X 100	%	81.4	81.40	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	SDGs	Kesehatan
		9	Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	(Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan Ibu hamil (K6) pada Trimester 1 sebanyak 1 kali,Trimester 2 sebanyak 2 kali,Trimester 3 sebanyak 3 kali sesuai standar di Kabupaten Sukoharjo) x 100 %	%	95.3	100	100	100	100	100	100	100	Indikator program	persentase	positif	Komulatif	RPJMN	Kesehatan
				(Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan Ibu bersalin sesuai standar di Kabupaten Sukoharjo) x 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator program	persentase	positif	Komulatif	RPJMN	Kesehatan
		10	Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	(Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan bayi sesuai standar dibagi jumlah puskesmas di Kabupaten Sukoharjo) x 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator program	persentase	positif	Komulatif	RPJMN	Kesehatan

No	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program		Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif/Kualitatif/Persentase/Rasio/ Rata-rata/ Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental/ Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD/SPM /SDGs/ RPJMN/ Lainnya)	Bidang Urusan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026						
		11	Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	(Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan balita usia 0-59 bulan sesuai standar di Kabupaten Sukoharjo dibagi jumlah puskesmas di Kabupaten Sukoharjo) x 100 %	%	85.5	100	100	100	100	100	100	100	Indikator program	persentase	positif	Kumulatif	RPJMN	Kesehatan
		12	Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah puskesmas yang meningkat kinerja perbaikan gizi masyarakat dibagi jumlah puskesmas di Kabupaten Sukoharjo x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	Lainnya	Kesehatan
		13	Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan pada anak usia Pendidikan dasar sesuai standar dibagi jumlah puskesmas di Kabupaten Sukoharjo x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Prosentase	Positif	Kumulatif	SPM	Kesehatan
		14	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan pada kesehatan reproduksi	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan pada kesehatan reproduksi sesuai standar dibagi jumlah puskesmas di Kabupaten Sukoharjo x 100%		100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	Lainnya	Kesehatan
		15	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan pada lansia	Jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Kesehatan Lansia x 100%	%	75.38	80	80	80	100	100	100	100	Indikator Program	Prosentase	Positif	Kumulatif	RPJMN	Kesehatan
		16	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar dibagi jumlah puskesmas di Kabupaten Sukoharjo x 100%	%	47	58	67	78	89	94	97	97	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	Lainnya	Kesehatan
		17	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan kerja sesuai standar dibagi jumlah puskesmas di Kabupaten Sukoharjo x 100%	%	33	42	58	67	75	92	100	100	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	Lainnya	Kesehatan

No	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program		Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif/Kualitatif/Persentase/Rasio/ Rata-rata/ Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental/ Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD/SPM /SDGs/ RPJMN/ Lainnya)	Bidang Urusan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026						
		18	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan olahraga sesuai standar dibagi jumlah puskesmas di Kabupaten Sukoharjo x 100%	%	83	92	100	100	100	100	100	100	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	Lainnya	Kesehatan
		19	Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	Persentase kepuasan pelanggan rawat jalan + Persentase kepuasan pelanggan rawat inap + Persentase kepuasan pelanggan Ponek	%	80	80	82	84	85	86	87	87	Indikator Program	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Kesehatan
		20	NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	Jumlah kematian pasien yang sudah dirawat 48 jam dibagi 1000	‰	47‰	<46‰	<45‰	<40‰	<35‰	<30‰	<25‰	<25‰	Indikator Program	Permil	Positif	Absolut	Lainnya	Kesehatan
		21	Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Hasil akreditasi rumah sakit	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	22	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya	realisasi pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang dikembangkan kompetensinya	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator program	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	23	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	Jumlah sarana sesuai ketentuan dibagi Jumlah seluruh sarana dikali 100% (Sarana Pelayanananan Kefarmasian adalah Apotek dan toko obat; Sarana Alat Kesehatan yaitu toko alat kesehatan dan toko optikal; Sarana Produksi Farmasi adalah UMOT; Sarana Produksi Pangan adalah IRTP; sesuai ketentuan adalah Sarana masih berizin aktif, terdapat Penanggungjawab yang berSIP, sarananya sesuai GDP/GMP.)	%	71	71	76	81	86	91	96	96	Indikator Program	Persentase	Positif	Kumulatif	Lainnya	Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	24	Persentase Desa siaga aktif mandiri	Jumlah Desa Siaga Aktif Mandiri dibagi Jumlah Desa Siaga Aktif X 100 %	%	40%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	40	Indikator Program	Persentase	Positif	Incremental	Lainnya	Kesehatan

No	Program / indikator program	Indikator Kinerja Program		Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target / Tahun						Kondisi pada akhir periode	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif/Kualitatif/Persentase/Rasio/ Rata-rata/ Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental/ Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD/SPM /SDGs/ RPJMN/ Lainnya)	Bidang Urusan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026						
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	25	Prosentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%)	Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator program	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Kesehatan



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo Telp. (0271) 593015 Fax. (0271) 592251
website: dkk.sukoharjokab.go.id, email: dkk@sukoharjokab.go.id